

Regalia: Jurnal Riset Gender dan Anak



Penulis:

Mirza Ayunda Pratiwi

Desy Kristiani, Sri Wahyuni, Emmy Solina

Shelly Rahmadani Putri, Casiavera, Meildia Stefanie, Rahma Hayati Harahap

Renaldi Afriansyah, Habibah Aura Kesuma dan Reva Dwy Anggriany

Iqbal Pradana, Raja Saputra Lokmana, Inka Kristin Pranata Hutasoit, Febi Triyanti

Mika Ela, Aisyah Savira, Nabila Utami Sandra Dewi, Febi Triyanti

DITERBIKAN OLEH:

PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK (PSGA)

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

(UMRAH)

VOL 1

NO 2

TAHUN 2022

Regalia: Jurnal Riset Gender dan Anak



DITERBITKAN OLEH:

PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK (PSGA)

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH)

VOL 1

NO 2

TAHUN 2022

Reviewer

Prof. Dr. Asan Ali Golam Hassan. Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia
Dr. Silfia Hanani, M.Si. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Indonesia
Dr. Nurul Azizah, S.Ag., M.Pd.I. Universitas Ibrahimy, Situbondo, Indonesia.
Dr. Asrul Nur Iman, M.IKom. Universitas Pejuang Republik Indonesia, Indonesia
Dr. Jendrius, M.Si. Universitas Andalas, Indonesia.
Dr. Elvi Rahmi, S.Pd.I., M.A. STIT Ahlussunah Bukittinggi, Indonesia.
Dr. Napsiah., M.A UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Marisa Elsera, M.Si. Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Kepulauan Riau, Indonesia.
Heni Nopianti, M.Si Universitas Bengkulu, Indonesia
Ritha Safitri Universitas Tadulako, Indonesia
Drs. FX Sri Sadewo, M.Si, Universitas Surabaya, Indonesia
Rizki Setiawan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Editorial Team

Sri Wahyuni, M.Si/ *Editor-in-Chief*
Marisa Elsera/ *Assosiate Editors*
Irwandi Syahputra, S.H., M.H./ *Assosiate Editors*
Edison S.AP., M.AP./ *Assosiate Editors*
Dr. Zaitun, M.Pd./ *Assosiate Editors*
Ayu Efritadewi, SH., M.H./ *Assosiate Editors*
Anissa Valentina, S.Sos., MA./ **Production Editor**
Nikodemus Niko / **Editor, Layouter**

ISSN: 2962-3979 viii + 72 halaman, 21 x 29 cm

Alamat Redaksi:

Regalia: Jurnal Gender dan Anak PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK (PSGA)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH), Dompok, Tanjung Pinang, Kepulauan
Riau

Email: puslit_ppga@umrah.ac.id

Penerbit: PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK (PSGA)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH)

PENGANTAR REDAKSI

Segala puji bagi Allah SWT dan shalawat beserta salam keharibaan Nabi Muhammad SAW. Setelah melalui proses editorial dan review, editor telah menyelesaikan publikasi artikel untuk volume 1 nomor 2 tahun 2022 ini. Artikel yang dipublikasi merupakan hasil karya dari para dosen beserta mahasiswa perguruan tinggi Indonesia, namun edisi ini didominasi oleh penulis Universitas Maritim Raja Ali Haji. Regalia: Jurnal Riset Gender dan Anak merupakan jurnal ilmiah milik diterbitkan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Kepualaun Riau. Kata Regalia berasal dari bahasa Inggris yang berarti lambang kebesaran, lahir di tahun 2022. Untuk ke depannya, Regalia mengabdikan diri dalam bidang publikasi ilmiah yang dilakukan secara online. Beberapa hal yang masih perlu perbaikan dan terus akan dibenahi untuk mencapai target akreditasi jurnal ilmiah.

Demikianlah tulisan pada edisi ini, dan kepada para penyumbang tulisan pada edisi ini redaksi mengucapkan terima kasih atas karya intelektual dan buah pemikiran mereka, dan kepada para pembaca, redaksi mengucapkan selamat membaca. Semoga ke depannya akan ada artikel-artikel ain buah pemikiran dan riset dari penulis berbagai perguruan tinggi atau institusi lainnya. Terima kasih

TANJUNG PINANG, DESEMBER 2022

EDITOR REGALIA: JURNAL RISET GENDER DAN ANAK

Table of Content

WORK-LIFE BALANCE PEKERJA PEREMPUAN DI KEPULAUAN RIAU (KEPRI) <i>Mirza Ayunda Pratiwi</i>	1-11
TRADISI REBU OLEH SUKU KARO YANG MERANTAU DI KOTA TANJUNG PINANG <i>Desy Kristiani, Sri Wahyuni, Emmy Solina</i>	13-18
PARTISIPASI LANSIA DALAM KEGIATAN POSYANDU LANSIA ANGGREK ANALISIS TEORI AKTIVITAS <i>Shelly Rahmadani Putri, Csiavera, Meildia Stefanie, Rahma Hayati Harahap</i>	19-31
PERAN UN WOMEN DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN <i>EQUAL PAY</i> FIFA SEPAK BOLA WANITA DI INGGRIS <i>Iqbal Pradana, Raja Saputra Lokmana, Inka Kristin Pranata Hutasoit, Febi Triyanti</i>	33-46
IMPLEMENTASI CEDAW DALAM MENGATASI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP KAUM PEREMPUAN DI INDONESIA STUDI KASUS: KEKERASAN SEKSUAL DI DUNIA PENDIDIKAN <i>Renaldi Afriansyah, Habibah Aura Kesuma dan Reva Dwy Anggriany</i>	47-60
FENOMENA CHILDFREE DI JEPANG DALAM PERSPEKTIF TEORI FEMINISME EKSISTENSIALIS <i>Mika Ela, Aisyah Savira, Nabila Utami Sandra Dewi, Febi Triyanti</i>	61-72



WORK-LIFE BALANCE PEKERJA PEREMPUAN DI KEPULAUAN RIAU

Mirza Ayunda Pratiwi

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: mirzaayunda@umrah.ac.id

Artikelinfo

Artikel history:

Diterima: 19 Juli 2022

Diterima dalam bentuk revisi: 8 November 2022

Diterbitkan: 23 November 2022

Kata Kunci:

Work-Life Balance;
Pekerja Perempuan;
Keseimbangan Kerja-Hidup.

Abstrak

Keseimbangan kerja atau disebut dengan Work-Life Balance (WLB) merupakan kebutuhan semua individu untuk mencapai dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan yang dibayar dan kehidupan mereka di luar pekerjaan. Kebijakan WLB di tempat kerja terbukti memberikan berbagai dampak positif. Penelitian ini ingin mengetahui tingkat dan kategori WLB di kalangan pekerja wanita di Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui survey online dengan google form kepada 206 responden. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan tingkat WLB yang ditinjau dari 19 atribut WLB di kalangan pekerja perempuan di Provinsi Kepulauan Riau sudah baik atau berkategori tinggi. Ada 10 atribut yang berkategori tinggi, ada 6 atribut dengan kategori sedang, dan hanya 3 atribut berkategori rendah. Harus ada upaya dari pemerintah dan organisasi untuk meningkatkan performa atribut WLB yang berkategori sedang dan rendah. Penelitian juga memberikan rekomendasi kepada organisasi yang ada di kepulauan Riau untuk menerapkan family friendly policy di tempat kerja, mengadakan hari olah raga pekerja, dan sarana konseling untuk mendukung kesehatan mental pekerja.

Corresponden author: Mirza Ayunda Pratiwi

Email: mirzaayunda@umrah.ac.id

Pendahuluan

Di era perkembangan *megatrend* dunia yang mencakup kemajuan teknologi, perubahan demografi, migrasi, perubahan iklim, dan 17 item tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) serta guncangan yang tidak terduga seperti pandemi COVID-19 yang terjadi di akhir 2019. Berubahnya budaya dan lingkungan kerja merupakan salah satu bentuk dampak dari adaptasi perubahan *megatrend*. Perubahan budaya kerja akibat dampak dari *megatrend* tersebut membuat banyak organisasi menerapkan sistem *work-from home*, *working remote*, dan bekerja hampir tanpa batas waktu atau bekerja 24/7. Akibatnya waktu kerja menjadi lebih fleksibel dibandingkan sebelum era *megatrend*. Maka pekerja masa kini dituntut harus mampu mengatur waktu kerja, gaya kerja dan jadwal kerja mereka secara mandiri. Ketidakmampuan mengatur secara mandiri akan menyebabkan ketidakseimbangan kerja. Pekerjaan dapat mengganggu kehidupan pribadi, atau sebaliknya

kehidupan pribadi mengganggu produktivitas kerja. Oleh sebab itu, mampu bekerja dan hidup secara seimbang merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh pekerja di masa kini.

Keseimbangan kerja atau disebut dengan *Work-Life Balance* (WLB) dalam studi ini mengacu pada definisi yang diungkapkan oleh Lockett (2008), yaitu, WLB merupakan kebutuhan semua individu untuk mencapai dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan yang dibayar dan kehidupan mereka di luar pekerjaan. Kata keseimbangan tidak selalu menyiratkan pembagian yang seimbang antara pekerjaan dan kehidupan; namun, keseimbangan berarti berhasil mengelola semua tanggung jawab yang Anda miliki di kedua bidang kehidupan (Lockett 2008). Keseimbangan kerja/kehidupan tidak terbatas pada orang dengan anak-anak atau pasangan hidup. Kehidupan di luar pekerjaan dapat berkisar dari penitipan anak hingga pekerjaan rumah tangga, olahraga, rekreasi, dan kegiatan pengembangan diri, kesehatan dan hampir apa saja yang berkaitan dengan kehidupan personal.

Organisasi yang peduli pada WLB pekerja terbukti dapat menciptakan hasil yang positif terhadap kinerja, komitmen, serta kepuasan kerja (Pasamar 2020). Organisasi yang gagal menjaga WLB pekerja akan berdampak pada konsekuensi negatif terhadap kesejahteraan dan efektivitas fungsi organisasi (Guest 2002). Hasil penelitian Malik et al. (2014) menunjukkan bahwa keseimbangan kehidupan kerja memediasi hubungan antara *job benefit* dan kepuasan kerja. Artinya, tunjangan pekerjaan semata-mata seperti gaji, asuransi, cuti medis dan lainnya tidak dapat menjamin kepuasan kerja. Rangkaian tunjangan pekerjaan tersebut harus memberikan keseimbangan kehidupan pribadi dan profesional yang baik, jika tidak, maka tidak ada gunanya karena orang akan tetap kurang puas atau tidak puas, dan akhirnya berdampak ke tingkat kinerja organisasi yang rendah.

Mengatur hidup dan bekerja secara seimbang bukan hal yang mudah untuk dilakukan, terutama bagi seorang pekerja dengan peran ganda. Artinya pekerja menjalankan perannya sebagai pekerja sekaligus orang tua, atau pekerja sekaligus anak yang sedang menjaga orang tua yang sedang sakit, atau peran lainnya yang dijalankan di luar aktivitas bekerja. Contohnya pada penelitian Anuradha and Pandey (2016) menemukan bahwa dokter wanita mengalami beban kerja profesi medis menjadi lelah dan terkuras dan tidak dapat melakukan tanggung jawab keluarga karena *shift* harian mereka. Guest (2002) juga mengemukakan pasangan wanita mungkin pernah mengalami konflik pekerjaan-keluarga; berdampak pada kelelahan dan kesehatan, pada akhirnya memiliki dampak negatif pada kepuasan pernikahannya, serta memengaruhi kepuasan bekerja mereka. Intinya adalah, kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi; seperti untuk diri sendiri, kehidupan sosial, keluarga, kesehatan dan keluarga tidak bisa dipisahkan antar satu dan lainnya. Dengan menciptakan keseimbangan maka akan terjadi harmonisasi kepuasan dalam berbagai lini kehidupan, dan akhirnya menciptakan kontribusi positif bagi organisasi.

Penelitian ini berfokus pada pekerja wanita. Karena jumlah pekerja wanita yang meningkat setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja perempuan sebanyak 39,52% atau sebanyak 51,79 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun ke atas. Angka tersebut meningkat dari 1,09 juta orang di tahun 2020, menjadi 50,7 juta orang tahun 2021. Tak terkecuali di Kepulauan Riau (Kepulauan Riau), terjadi peningkatan jumlah pekerja perempuan yang meningkat tiap tahunnya, yaitu 2019 hingga 2021, berturut-turut dari 45.35, 48.93, dan 51.92 persen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat WLB di kalangan pekerja wanita di Provinsi Kepulauan Riau, apakah sudah mencapai performa yang baik atau belum. Dengan mengetahui tingkat WLB pada pekerja wanita, dapat diambil inisiatif kebijakan formal atau non-formal di dalam atau di luar organisasi. Baik pihak pemerintah, perusahaan dan individu dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai tolak ukur keberhasilan pekerja wanita dalam menjaga keseimbangan kerja dan hidup mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *survey online* melalui *google form* yang disebarakan melalui media sosial seperti whatsapp, telegram, facebook, dan instagram. Metode sampling menggunakan metode kuota (Prof.Dr.Sugiyono 2016). Dengan kuota minimal yaitu 100 responden dengan kriterianya adalah pekerja berjenis kelamin wanita berumur diatas 18 tahun, bekerja minimal satu tahun di organisasi yang sama, serta bekerja dan domisili di Provinsi Kepulauan Riau.

Instrument yang berisi pertanyaan terkait WLB terdiri dari 19 pertanyaan tertutup menggunakan 5 skala likert yang diadaptasi dari penelitian Pratiwi, Haryani, and Putri (2021) dan Putri, Pratiwi, and Haryani (2021). Dalam penelitian tersebut juga telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas sehingga tidak lagi dilakukan pengujian instrument dalam penelitian ini. Pertanyaan dalam instrumen WLB terdiri dari "dimensi kerja" dan "dimensi kehidupan/pribadi". Pertanyaan dapat dilihat pada tabel 1, pertanyaan dimensi kerja atau yang berkaitan dengan kegiatan di tempat kerja adalah pertanyaan nomor 1, 2, 3, 7, 12, 13, 14, dan 18. Pertanyaan dimensi kehidupan/pribadi adalah nomor 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, dan 19. Pertanyaan dengan jenis skala likert *favorable* dimana 1 menyatakan sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju adalah pertanyaan nomor 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 18, dan 19. Pertanyaan *unfavorable* adalah kebalikan dari *favorable*, artinya poin yang tinggi adalah skala 1, jika responden menjawab 5 artinya responden menunjukkan sikap yang mengarah pada tingkat WLB yang rendah. Pertanyaan *unfavorable* yaitu nomor 2,3,7,8,12,13,dan 15. Data diolah dengan menggunakan Ms.Excel dengan analisis statistik deskriptif.

Tabel 1 Daftar Pertanyaan Kuesioner *Work-Life Balance*

No	Atribut	Dimensi	Jenis Skala likert
1	Saya mampu membagi waktu antara bekerja dan kehidupan pribadi	Pekerjaan	<i>Favorable</i>
2	Saya membawa pekerjaan kantor ke rumah	Pekerjaan	<i>Unfavorable</i>
3	Pekerjaan di kantor mengganggu kehidupan pribadi saya	Pekerjaan	<i>Unfavorable</i>
4	Saya meluangkan waktu untuk berolah raga	Pribadi	<i>Favorable</i>

5	Saya memiliki "me time" minimal 30 menit dalam sehari. ("Me-Time" adalah waktu untuk diri sendiri tanpa kehadiran orang lain, sehingga kita bisa beraktivitas sendirian)	Pribadi	<i>Favorable</i>
6	saya selalu mengonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang	Pribadi	<i>Favorable</i>
7	Apakah anda selalu melewati jam makan siang saat di kantor?	Pekerjaan	<i>Unfavorable</i>
8	Apakah Anda selalu terburu-buru berangkat ke kantor?	Pribadi	<i>Unfavorable</i>
9	Apakah anda pergi ke acara kegiatan keagamaan	Pribadi	<i>Favorable</i>
10	Saya selalu pergi bersama teman-teman di luar jam kerja	Pribadi	<i>Favorable</i>
11	Saya selalu menghabiskan waktu bersama keluarga di saat hujung minggu (weekend)	Pribadi	<i>Favorable</i>
12	Apakah anda selalu menambah jam bekerja di luar jam kerja atau overtime?	Pekerjaan	<i>Unfavorable</i>
13	Saya merasa stress dengan pekerjaan	Pekerjaan	<i>Unfavorable</i>
14	Saya merasa tugas-tugas saya di kantor terlalu banyak	Pekerjaan	<i>Unfavorable</i>
15	Saya merasa pekerjaan rumah saya terlalu banyak	Pribadi	<i>Unfavorable</i>
16	Saya selalu berlibur	Pribadi	<i>Favorable</i>
17	Saya selalu mengambil jatah cuti saya untuk liburan	Pribadi	<i>Favorable</i>
18	Saya membalas email/pesan/chat yang berkaitan dengan pekerjaan saat di rumah	Pekerjaan	<i>Favorable</i>
19	Saya tidur paling sedikit 7 jam dalam sehari	Pribadi	<i>Favorable</i>

Sumber: (Pratiwi et al. 2021)

Hasil dan Pembahasan

Data yang terkumpul dan sesuai dengan kriteria responden adalah 206 orang. Tabel 2 menyajikan data demografi dari responden. Dari data yang terkumpul responden terdiri dari 76,21% menikah, 20,39% lajang, dan 3,40% adalah duda/janda. Responden yang masuk kategori generasi Gen X (lahir 1965-1976) sebanyak 18,93%, Gen Z (1997-1995) sebanyak 8,74% dan sisanya sebesar 72,33% adalah reponden kelahiran 1965- 1976 atau disebut Gen Y. Bidang pekerjaan responden didominasi sektor pendidikan yaitu sebanyak 78,64%, keuangan dan perbankan sebanyak 15,05%, kesehatan 1,94%, wiraswasta 2,43% dan sektor lainnya 1,94%. Tingkat penghasilan perbulan responden terdiri dari 6 kategori, paling banyak

adalah yang berpenghasilan di bawah tiga juta rupiah, yaitu sebanyak 46,60% responden, penghasilan tiga hingga lima juta rupiah sebanyak 22,33%, penghasilan lima hingga tujuh juta rupiah sebanyak 19,90%, penghasilan sepuluh hingga tiga belas juta rupiah sebanyak 1,94%, dan penghasilan di atas tiga belas juta rupiah sebanyak 0,97%. Responden terdiri dari 85% pekerja pemerintahan atau organisasi publik, sedangkan sisanya sebanyak 14,56% adalah responden dari organisasi berorientasi profit atau swasta.

Tabel 2 Data Karakteristik Responden

<i>Variabel Demografi</i>		<i>Frekuensi</i>	<i>Persentase</i>
<i>Status</i>	Duda/Janda	7	3,40
	Lajang	42	20,39
	Menikah	157	76,21
<i>Generasi</i>	X	39	18,93
	Y	149	72,33
	Z	18	8,74
<i>Bidang Pekerjaan</i>	Pendidikan	162	78,64
	Keuangan/Perbankan	31	15,05
	Kesehatan	4	1,94
	Wiraswasta	5	2,43
	Lainnya	4	1,94
<i>Pendapatan per bulan</i>	< 3 juta	96	46,60
	> 3 juta - 5 juta	46	22,33
	> 5 juta - 7 juta	41	19,90
	> 7 juta- 10 juta	17	8,25
	> 10 juta - 13 juta	4	1,94
	> 13 juta	2	0,97
<i>Bidang pekerjaan</i>	Organisasi <i>Non Profit</i>	176	85,44
	Organisasi <i>For Profit</i>	30	14,56

Sumber: Data diolah oleh Penulis menggunakan Ms.Excel

Dari hasil pengumpulan data yang disajikan dalam tabel 3, bisa disimpulkan tingkat WLB secara keseluruhan adalah Tinggi dengan total skor mean adalah 3,81. Kategori per atribut dilihat dari nilai mean dari skala likert masing-masing atribut, dan dibagi menjadi lima kategori: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi, interpretasi kategori ini dapat dilihat di tabel 4.

Dari 19 atribut pertanyaan, ada 10 atribut dengan tingkat kategori **tinggi** adalah:

1. Atribut 1: Kemampuan membagi waktu bekerja dan kehidupan pribadi
2. Atribut 3: Pekerjaan di kantor mengganggu kehidupan pribadi saya
3. Atribut 5: Memiliki "me time" minimal 30 menit perhari
4. Atribut 6: Konsumsi makanan sehat dan gizi seimbang
5. Atribut 9: Pergi ke kegiatan keagamaan

6. Atribut 11: Menghabiskan waktu bersama keluarga saat hujung minggu (weekend)
7. Atribut 13: Stress Kerja
8. Atribut 14: Beban tugas kantor yang banyak
9. Atribut 15: Beban kerja rumah yang banyak
10. Atribut 19: Jam tidur cukup 7 jam

Sepuluh atribut dengan kategori WLB yang tinggi artinya secara rata-rata responden memiliki kemampuan yang baik dalam mengatur keseimbangan mereka berdasarkan sepuluh atribut tersebut. Secara rata-rata responden mampu mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, atau kehidupan pekerja tidak mengganggu kehidupan kerja atau sebaliknya (atribut 1 dan 2). Responden secara rata-rata juga mampu menyediakan waktu mereka minimal 30 menit perhari untuk "me time" atau waktu untuk diri sendiri tanpa kehadiran orang lain, sehingga kita bisa beraktivitas sendirian (atribut 5). Responden secara rata-rata juga selalu mengonsumsi makanan yang sehat bergizi seimbang dan sehat (atribut 6). Responden secara rata-rata juga sering datang ke aktivitas-aktivitas keagamaan (atribut 9). Di hujung minggu secara rata-rata responden juga sering menghabiskan waktu untuk berlibur bersama keluarga (atribut 11). Responden secara rata-rata juga mampu mengelola stress dengan baik, mereka tidak merasa stress karena pekerjaan (atribut 13). Responden secara rata-rata juga tidak merasa bahwa pekerjaan kantor dan rumah membebani mereka (atribut 14 dan 15). Dari sisi kesehatan, responden secara rata-rata juga memiliki waktu tidur yang cukup yaitu 7 jam dalam sehari (atribut 19)

Dari 19 atribut pertanyaan, ada 6 atribut dengan tingkat kategori **sedang** adalah:

1. Atribut 2: Membawa pekerjaan kantor ke rumah
2. Atribut 4: Meluangkan waktu untuk berolah raga
3. Atribut 7: Melewati jam makan siang saat di kantor
4. Atribut 8: Terburu-buru berangkat ke kantor
5. Atribut 12: Menambah jam bekerja di luar jam kerja atau overtime
6. Atribut 16: Berlibur

Enam atribut berkategori sedang artinya secara rata-rata responden cukup mampu mengatur keseimbangan WLB berdasarkan enam atribut tersebut. Secara rata-rata responden jarang membawa pekerjaan kantor ke rumah (atribut 2). Secara rata-rata responden juga cukup baik dalam meluangkan waktu untuk berolah raga (atribut 4). Secara rata-rata responden jarang melewati makan siang, atau mereka cukup baik mengatur jam istirahat untuk makan siang (atribut 7). Secara rata-rata responden juga jarang terburu-buru berangkat ke kantor (atribut 8) serta mereka juga jarang bekerja secara *overtime* (atribut 12). Secara rata-rata responden juga cukup sering menggunakan waktu libur ujung minggu atau tanggal merah untuk berlibur (atribut 16). Enam atribut ini pada dasarnya sudah mampu dijalani oleh responden secara rata-rata dengan cukup baik, dimana rentang kategori mean yaitu 2.61 hingga 3.20. Namun perlu adanya upaya untuk meningkatkan WLB agar menjadi kategori tinggi atau sangat tinggi. Atribut 4, 7 dan 16 meskipun berkategori sedang namun nilai mean berada di bawah 3,00 dan mendekati ambang batas bawah atau hampir berkategori rendah.

Tabel 3 Frekuensi Skala Likert dan Mean Work-Life Balance Responden

No	Atribut	Skala Likert					Mean	Kategori
		1	2	3	4	5		
1	Saya mampu membagi waktu antara bekerja dan kehidupan pribadi	6	4	30	126	40	3,922	Tinggi
2	Saya membawa pekerjaan kantor ke rumah	17	39	89	39	22	3,049	Sedang
3	Pekerjaan di kantor mengganggu kehidupan pribadi saya	0	3	61	38	104	4,18	Tinggi
4	Saya meluangkan waktu untuk berolah raga	14	47	116	22	7	2,811	Sedang
5	Saya memiliki "me time" minimal 30 menit dalam sehari. ("Me-Time" adalah waktu untuk diri sendiri tanpa kehadiran orang lain, sehingga kita bisa beraktivitas sendirian)	18	37	65	55	31	3,214	Tinggi
6	saya selalu mengonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang	0	11	60	106	29	3,743	Tinggi
7	Apakah anda selalu melewati jam makan siang saat di kantor?	58	0	103	23	22	2,762	Sedang
8	Apakah Anda selalu terburu-buru berangkat ke kantor?	43	0	94	45	24	3,034	Sedang
9	Apakah anda pergi ke acara kegiatan keagamaan	5	26	98	63	14	3,267	Tinggi
10	Saya selalu pergi bersama teman-teman di luar jam kerja	30	76	83	15	2	2,432	Rendah
11	Saya selalu menghabiskan waktu bersama keluarga di saat hujung minggu (weekend)	1	10	56	75	64	3,927	Tinggi
12	Apakah anda selalu menambah jam bekerja di luar jam kerja atau overtime?	10	40	94	32	30	3,155	Sedang
13	Saya merasa stress dengan pekerjaan	1	8	96	60	41	3,641	Tinggi
14	Saya merasa tugas-tugas saya di kantor terlalu banyak	3	57	47	91	8	3,214	Tinggi
15	Saya merasa pekerjaan rumah saya terlalu banyak	2	41	36	115	12	3,456	Tinggi
16	Saya selalu berlibur	10	56	108	28	4	2,806	Sedang
17	Saya selalu mengambil jatah cuti saya untuk liburan	73	41	58	30	4	2,277	Rendah
18	Saya membalas email/pesan/chat yang berkaitan dengan pekerjaan saat di rumah	38	81	72	12	3	2,325	Rendah
19	Saya tidur paling sedikit 7 jam dalam sehari	6	33	73	81	13	3,301	Tinggi

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Ms.Excel

Dari 19 atribut pertanyaan, ada 3 atribut dengan tingkat kategori **rendah** adalah:

1. Atribut 10: Pergi bersama teman-teman di luar jam kerja
2. Atribut 17: Mengambil jatah cuti saya untuk liburan
3. Atribut 18: Membalas email/pesan/chat yang berkaitan dengan pekerjaan saat di rumah.

Ketiga atribut dengan kategori rendah memiliki arti mereka belum cukup baik dalam mengelola WLB dari ketiga atribut tersebut. Secara rata-rata responden memiliki intensitas yang rendah dalam menghabiskan waktu untuk bersosialisasi atau menghabiskan waktu bersama teman di luar jam kerja (atribut 10). Secara rata-rata responden juga jarang sekali memanfaatkan waktu cuti mereka untuk berlibur (atribut 17). Secara rata-rata responden masih sering membalas email/pesan/chat yang berkaitan dengan pekerjaan saat berada di rumah (atribut 18).

Tabel 4 Interpretasi Skor Mean

Skor Mean	Interpretasi
1.00-1.80	sangat rendah
1.81-2.60	rendah
2.61-3.20	sedang
3.21-4.20	tinggi
4.21-5.00	sangat tinggi

Secara keseluruhan tingkat WLB yang ditinjau dari atribut-atribut WLB di kalangan pekerja perempuan di Provinsi Kepulauan Riau sudah baik atau berkategori tinggi. Ada 10 atribut yang berkategori tinggi, ada 6 atribut dengan kategori sedang, dan hanya 3 atribut berkategori rendah. Harus ada upaya dari pemerintah dan organisasi untuk meningkatkan performa atribut WLB yang berkategori sedang dan rendah karena WLB memiliki berbagai dampak positif bagi individu dan juga organisasi.

Lockett (2008) menyatakan bahwa orang kebijakan organisasi yang mendukung keseimbangan hidup dan bekerja akan meningkatkan performa organisasi seperti menjadi organisasi yang diminati banyak pekerja, meningkatkan moral dan komitmen pekerja, mengurangi *turnover* (keinginan keluar dari organisasi) pekerja, mengurangi ketidakhadiran pekerja, meningkatkan peminat dalam proses rekrutmen, meningkatkan kesehatan dan keselamatan pekerja, serta meningkatkan produktivitas pekerja.

Organisasi yang telah memperkenalkan pengaturan WLB di tempat kerja terbukti telah memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya dan upaya yang dikeluarkan untuk membuat perubahan, terutama dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang terampil dan produktif. Berbagai studi terdahulu menemukan bahwa WLB akan memberikan dampak positif terhadap pekerja seperti:

- Jam kerja yang fleksibel yang dapat mengurangi stress pekerja (Fandl and Smith 2021; Lockett 2008)

- Meningkatkan fokus, motivasi dan kepuasan kerja karena adanya sinkronisasi antara kebutuhan pribadi dan kerja yang terpenuhi (Bumhira, Musara, and Nzongo 2017; Heriyadi, Tjahjono, and Rahayu 2020; Nurdin, Munizu, and Sumardi 2021; Rondonuwu, Rumawas, and Asaloei 2018; Shobana and Siddiq 2021)
- Pekerja akan merasa lebih dihargai atas pekerjaan dan tugas diluar tempat kerja yang akhirnya akan meningkatkan job security dan komitmen kerja (Lockett 2008; Nurdin et al. 2021)
- Meningkatkan performa dan produktivitas kerja karena meningkatnya keterlibatan atau keterkaitan antara perusahaan dengan karyawan (*job engagement*)
- Kesuksesan dalam karir dan profesi (Benita and Jacklin 2021)

Kesimpulan

Secara keseluruhan tingkat WLB yang ditinjau dari atribut-atribut WLB di kalangan pekerja perempuan di Provinsi Kepulauan Riau sudah baik atau berkategori tinggi. Namun perlu adanya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan performa kinerja karyawan serta loyalitas pekerja perempuan di organisasi. Oleh sebab itu, upaya dan implikasi yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah anggota eksekutif organisasi mempertimbangan untuk menerapkan *family friendly policy* yang memiliki empat dimensi kebijakan berdasarkan rekomendasi UNICEF (UNICEF 2020):

1. *Maternity protection and paid parental leave*. Kebijakan ini termasuk cuti orang tua termasuk untuk ibu dan ayah berbayar tanpa pemotongan gaji minimal tiga bulan.
2. *Nutritional and breastfeeding support*. Kebijakan ini dukungan nutrisi bagi ibu hamil serta ketersediaan ruangan laktasi di tempat kerja.
3. *Accessible, quality childcare, and flexible work arrangements*. Kebijakan ini termasuk kemudahan dan keramahan organisasi untuk menyediakan sarana ramah anak di tempat kerja. Dimensi kebijakan ini juga termasuk waktu fleksibel dalam bekerja agar memberikan kemudahan bagi para orang tua mengurus anak mereka yang balita dan sekolah.
4. *Social protection and income*. Kebijakan ini memberikan tunjangan untuk keluarga dan anak.

Selain kebijakan *family friendly policy*, penelitian ini juga merekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Seperti menyediakan hari khusus olah raga bersama para pekerja *Human Resource Department* di sebuah organisasi direkomendasikan untuk menyediakan sarana konseling untuk menjaga kesehatan mental pekerja.

Untuk penelitian di masa akan datang, direkomendasikan membuat perbandingan antara pekerja wanita yang sudah menikah dan belum menikah, pekerja wanita yang sudah memiliki anak dan belum memiliki anak, serta perbandingan WLB pekerja wanita di berbagai sektor misalnya perbankan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Bibliografi

Pustaka yang berupa judul buku

K. Lockett, *Work/Life Balance for Dummies*, vol. 53, no. 1. Australia: Wiley Publishing Australia Pty Ltd, 2008.

UNICEF. 2020. *Family-Friendly Policies Handbook For Business*.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

- Anuradha, and Mrinalini Pandey. 2016. "Impact of Work-Life Balance on Job Satisfaction of Women Doctors." *Problems and Perspectives in Management* 14(2):0–6. doi: 10.21511/ppm.14(2-2).2016.07.
- Benita, S. Monica, and Mary J. Jacklin. 2021. "Work Life Balance and Career Plans of Female Dentist Entrepreneurs." *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* 26(02). doi: 10.47750/cibg.2020.26.02.056.
- Bumhira, Willard, Mazanai Musara, and Jennifer Chishamiso Nzonzo. 2017. "Moderating Effect of Employee Wellness on the Relationship between Work-Life Balance and Job Satisfaction among Teachers in Zimbabwe." *International Journal of Learning and Intellectual Capital* 14(3). doi: 10.1504/IJLIC.2017.086391.
- Fandl, Kevin, and Jamie Smith. 2021. "Forming Good Habits to Reduce Stress, Find a WorkLife Balance, and Succeed in School." in *Success as an Online Student*.
- Guest, David E. 2002. "Perspectives on the Study of Work-Life Balance." *Social Science Information* 41(2):255–79. doi: 10.1177/0539018402041002005.
- Heriyadi, Heriyadi, Heru Kurnianto Tjahjono, and Meika Kurnia Puji Rahayu. 2020. "Improving Organizational Citizenship Behavior through Job Satisfaction, Leader-Member Exchange, and Work-Life Balance." *Binus Business Review* 11(2). doi: 10.21512/bbr.v11i2.6193.
- Malik, Maria, Difang Wan, Laiba Dar, Aqsa Akbar, and Muhammad Akram Naseem. 2014. "The Role of Work Life Balance in Job Satisfaction and Job Benefit." *Journal of Applied Business Research* 30(6). doi: 10.19030/jabr.v30i6.8879.
- Nurdin, Putri Bayina Rahma, Muzran Munizu, and Sumardi. 2021. "Employee Performance : Worklife Balance to Maintain Organizational Commitment and Work Motivation." *YUME : Journal of Management* 4(2).
- Pasamar, Susana. 2020. "Why a Strong Work-Life Balance System Is Needed?" *Cuadernos de Gestion* 20(3):99–107. doi: 10.5295/cdg.180903sp.
- Pratiwi, Mirza Ayunda, Dwi Septi Haryani, and Anggie Sekar Putri. 2021. "Work-Life Balance Dan Kepuasan Ke Rja Pada Pekerja Di Non-Profit Organization Kota Tanjungpinang." *Jurna Inovasi Penelitian* 2(2):397–408.
- Prof.Dr.Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research, Dan Penelitian Evaluasi)*. Bandung: Alfabeta,CV.

Putri, Anggia Sekar, Mirza Ayunda Pratiwi, and Dwi Septi Haryani. 2021. "Work-Life Balance Dan Kepuasan Kerja Pada Pekerja Di For Profit Organization (Fpo) Kota Tanjungpinang." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2(2):623–34. doi: <https://doi.org/10.47492/jip.v2i2.702>.

Rondonuwu, F., W. Rumawas, and S. Asaloei. 2018. "Pengaruh Work-Life Balance Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Hotel Sintesa Peninsula Manado." *Jurnal Administrasi Bisnis* 7(2).

M. D. Shobana and I. Siddiq, "Work-Life Balance and Job Satisfaction among Educators of Higher Education Institutions in Dimapur District," *Int. J. Trend Sci. Res. Dev.*, vol. 5, no. 5, pp. 612–616, 2021.



TRADISI *REBU* OLEH SUKU KARO YANG MERANTAU DI KOTA TANJUNGPINANG

Desy Kristiani¹, Sri Wahyuni², Emmy Solina³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: desyskristiani@gmail.com

Artikelinfo

Diterima: 6 Oktober 2022

Diterima dalam bentuk

revisi: 8 Desember 2022

Diterbitkan: 8 Desember
2022

Kata Kunci:

Masyarakat Karo; Tradisi
Rebu; Menjaga Tradisi

Abstrak

Tradisi *Rebu* adalah tradisi yang tidak boleh berbicara langsung antara menantu dan menantu serta antara mertua yang berbeda jenis kelamin. Tradisi *Rebu* adalah tata krama yang membatasi cara berkomunikasi untuk menjaga hubungan baik dan saling menghormati. Tradisi *Rebu* tetap dilakukan oleh masyarakat Karo walaupun telah merantau, tinggal di perantauan tidak membuat masyarakat Karo meninggalkan tradisi yang mereka gunakan di kampung halaman mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana masyarakat Karo mempertahankan Tradisi *Rebu* di Kota Tanjungpinang dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Karo mempertahankan Tradisi *Rebu* di Kota Tanjungpinang karena terdapat nilai-nilai yang baik dalam tradisi *Rebu* seperti nilai sopan santun dan saling menghormati untuk tidak sembarangan berbicara dan berperilaku. Keberadaan tradisi *Rebu* di Kota Tanjungpinang dapat bertahan karena adanya upaya dari masyarakat Karo sendiri untuk menjaga antara lain dengan konsisten menjalankan, menjaga dan mewariskan nilai-nilai tradisi *Rebu* secara turun temurun.

Corresponden author: Desy Kristiani

Email: desyskristiani@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, suku bangsa, agama, hingga aliran-aliran kepercayaan. Berbagai macam tradisi dan kebudayaan masing-masing memiliki arti dan ciri khas tertentu bagi yang meyakini. Tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang, atau dilupakan. Di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar dari masa lalu. (Piotr Sztompka, 2007).

Berbagai jenis tradisi dan kebudayaan terdapat di seluruh daerah yang ada di Indonesia, salah satu daerah yang memiliki banyak jenis suku dan tradisi adalah Provinsi Sumatera Utara. Berbagai jenis suku terdapat di Sumatera Utara di antaranya Suku Melayu, Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Pakpak, dan Suku Nias. Dari setiap suku ini memiliki beraneka ragam tradisi salah satunya adalah Tradisi *Rebu* yang dimiliki oleh masyarakat Suku Karo. Tradisi *rebu* merupakan pantang larang berbicara secara langsung antara mertua laki-laki (*bengkila*) dan menantu perempuan (*permain*) begitu juga mertua perempuan (*mami*) dan menantu laki-laki (*kela*) dan juga saudara ipar yang

berbeda jenis kelamin (*turangku*). Jika ingin saling berkomunikasi untuk menyampaikan sesuatu maka harus ada perantara. Biasanya pesan akan disampaikan melalui orang lain. Karena sudah saling mengerti kalau ada tata krama *rebu*, biasanya orang yang menjadi perantara itu langsung paham tanpa bertanya mengapa ia harus menjadi perantara. Berkomunikasi dalam kondisi tertentu (darurat) boleh dilakukan tanpa harus ada perantara, hanya saja pelaku *Rebu* tidak boleh berkomunikasi berhadapan secara langsung bertatap muka atau kontak mata dengan lawan bicaranya, tetapi komunikasi dapat dilakukan dengan cara menghadap ke arah lain dan harus dengan jarak yang berjauhan. Tradisi *Rebu* ini terjadi apabila sebuah perkawinan telah selesai dilaksanakan, sehingga ada orang-orang tertentu oleh adat dilarang berkomunikasi secara langsung.

Rebu merupakan bagian adat yang lahir dari kebudayaan. Secara historis adat *rebu* ini terbentuk karena pada zaman dahulu bentuk rumah karo adalah “Rumah Siwaluh Jabu” dimana di dalam rumah ini terdapat delapan kepala rumah tangga yang Bersama-sama tinggal di dalamnya, jadi untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan (seperti khilaf sehingga terjadi hubungan seks antara mereka) maka dibuat adat *rebu* ini gunanya untuk menghormati orang yang seharusnya di hormati. Bagi sebagian orang kondisi tersebut menjadi aneh. Namun, inilah adat yang harus tetap dijalankan. Sebab, tujuannya untuk menjaga moral rasa hormat dan sopan santun. Ketika *rebu* ini dilanggar, maka yang bersangkutan akan kena sanksi moral dari lingkungan. Ia akan dicap sebagai orang yang tidak punya sopan santun.

Bagi Masyarakat Suku Karo, tradisi *Rebu* tidak hanya berlaku dan wajib dilaksanakan di daerah asalnya di Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi juga berlaku bagi masyarakat Suku Karo yang merantau ke luar dari Provinsi Sumatera Utara. Salah satunya adalah masyarakat suku karo yang ada di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Walaupun mereka sudah berbaur, berinteraksi dan bersosialisasi dengan penduduk tempatan dan masyarakat pendatang dari berbagai suku di antaranya Jawa, Bugis, Minang, China yang terdapat di Kota Tanjungpinang, namun hal ini tidaklah memberi pengaruh dan perubahan bagi masyarakat suku karo dalam memaknai Tradisi *Rebu*. Bahkan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Suku Karo untuk tetap melaksanakan Tradisi *Rebu*. Bagi masyarakat Suku Karo tradisi *rebu* itu tetap dilaksanakan dan tidak dilupakan walaupun masyarakat Suku Karo sudah tidak tinggal di daerah asal dan pergi merantau, karena masyarakat Karo menganggap tradisi adalah bagian dari kehidupan mereka dan tidak bisa dipisahkan atau dilupakan begitu saja meskipun sudah jauh dari kampung halaman, karena tradisi *Rebu* merupakan peninggalan secara turun temurun dari keluarga yang harus terus dilaksanakan. Berangkat dari fenomena inilah yang menjadi *starting point* bagi penulis untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana Masyarakat Karo dapat mempertahankan Tradisi *Rebu* di tengah keberagaman budaya masyarakat Kota Tanjungpinang. Dengan adanya penelitian ini maka diperoleh pengetahuan baru terhadap suatu tradisi yang masih terus bertahan di perantauan, selain letak geografisnya yang berbeda juga ruang lingkup masyarakat yang multikultural tetapi tradisi itu masih tetap bertahan dan tidak tergerus dengan lingkungan yang baru.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini adalah masyarakat Suku Karo yang merantau dan masih melaksanakan tradisi *Rebu* sama seperti di daerah asalnya. Lokasi penelitian adalah Kota Tanjungpinang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti berupa pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti seperti menganalisis perilaku, tempat dan kegiatan masyarakat Karo yang melaksanakan tradisi *Rebu*. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan membawa dan

menggunakan pedoman wawancara tentang topik yang diteliti yaitu masyarakat Karo yang melaksanakan tradisi *Rebu*. Hasil dari penelitian dapat didokumentasikan dengan kamera dan alat perekam suara serta data tambahan dapat diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Terdapat berbagai macam suku yang ada di Kota Tanjungpinang seperti suku Melayu yang merupakan mayoritas penduduk dan ada juga suku pendatang diantaranya China, Minang, Jawa, Bugis, Flores, tentunya ketika penduduk ini saling berinteraksi dan bersosialisasi akan menampilkan kebudayaan masing-masing sebagai ciri khas dari suku yang mereka miliki. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat suku Karo dalam mempertahankan tradisi *rebu* di Kota Tanjungpinang. Adapun upaya yang dilakukan oleh masyarakat Suku Karo agar tradisi *rebu* bisa tetap bertahan seperti di wilayah asalnya diantara ;

1. Melaksanakan Tradisi *Rebu*

Masyarakat Karo di Tanjungpinang masih melaksanakan tradisi *rebu* walaupun sudah merantau, pelaksanaan tradisi *rebu* yang diterapkan di Tanjungpinang sama persis dengan yang diterapkan di kampung halaman Masyarakat Suku Karo yaitu Kabupaten Karo, persamaan dari cara pelaksanaan dan juga persamaan siapa saja orang-orang yang melaksanakan tradisi *rebu* tidak ada perbedaan yang terjadi dalam pelaksanaan *rebu* di Tanjungpinang dengan Tanah Karo karena masyarakat Karo menganggap suatu tradisi yang diciptakan sejak awal seperti apa pun bentuknya tidak boleh dirubah karena akan mengurangi nilai dan makna tradisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tradisi *rebu* bisa terus bertahan di Tanjungpinang.

a. Nilai tradisi *Rebu*

Tradisi *rebu* memiliki nilai yang baik yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mengingatkan orang akan prinsip sosial dalam cara hidup berkerabat. Masyarakat Karo meyakini, *rebu* akan menimbulkan rasa sungkan dari sungkan menimbulkan rasa hormat, rasa hormat menimbulkan sopan santun sebagai bentuk saling menghormati dan bentuk sopan santun dalam berbicara dan bertingkah laku terhadap sesama orang Karo hal ini akan menghasilkan rasa saling menghargai dan rasa sungkan untuk tidak sembarangan berbicara. Falsafah tersebut menjadi salah satu alasan mengapa tradisi *rebu* masih dilaksanakan hingga saat ini. (Alem, 2020)

b. Menghormati

Masyarakat Karo sangat menjunjung tinggi tradisi yang diwarisi dari para leluhur mereka. Menghormati disini ialah bagaimana mereka tetap melaksanakan tradisi *rebu* sampai pada saat ini walaupun mereka sudah merantau dan tinggal dengan masyarakat yang bukan hanya berasal dari suku Karo tetapi telah berbaur dengan masyarakat dari suku lain tetapi suatu tradisi harus terus dilaksanakan sebagai bentuk menghargai para leluhur yang telah menciptakan Tradisi *Rebu*. Selain bentuk untuk menghormati leluhur yang telah menciptakan Tradisi *Rebu*, tradisi ini juga memiliki manfaat bagi masyarakat Karo di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk membatasi perilaku dan berbicara terhadap orang tertentu yang kemudian menghasilkan bentuk sopan santun dan akhirnya menimbulkan rasa saling menghargai. (Alem, 2020)

2. Menjaga Tradisi *Rebu*

Masyarakat Karo yang ada di Kota Tanjungpinang sering melangsungkan beberapa

kegiatan yang bertujuan sebagai wadah untuk masyarakat Karo bisa berkumpul dan menjaga silaturahmi seperti kegiatan rutin tiap bulan adalah arisan masyarakat Karo IMK Mbuah page dan juga tradisi tahunan berupa pesta perayaan ulang tahun IMK Mbuah Page, pada saat kegiatan ini berlangsung bisa dilihat siapa saja dan bagaimana tradisi *rebu* digunakan, orang yang saling *rebu* akan menjaga jarak satu sama lain dan tidak berkomunikasi secara langsung melainkan menggunakan perantara untuk menyampaikan apa pesan yg ingin disampaikan kepada orang yang di *rebu* kan. Dengan adanya perkumpulan rutin yang sering diadakan oleh IMK Mbuah Page menjadi cara untuk menjaga tradisi *rebu* di tempat perantauan masyarakat Karo di Kota Tanjungpinang. Suatu tradisi dapat terjaga keberadaanya apabila masyarakat itu sendiri terus menggunakannya, letak wilayah tempat tinggal dan lingkungan sekitar yang berbeda kebudayaan tidak membatasi masyarakat itu untuk tetap melaksanakan tradisi.

3. Melestarikan Tradisi *Rebu*

Tradisi biasanya tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat karena warisan turun temurun yang dilakukan. Untuk melestarikan suatu tradisi seringkali yang menjadi sasaran adalah generasi muda karena generasi muda itu adalah penerus tradisi. Menurut Hanafi (2016:145) “Peran pemuda dibedakan atas: yang mendukung, meneruskan, dan melestarikan tradisi dan dengan sendirinya berkewajiban dan berusaha menaati tradisi yang berlaku” Merekalah yang menjadi target tokoh masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu tradisi. Keluarga adalah agen sosial pertama bagi seorang anak untuk bersosialisasi sehingga peran orangtua sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai suatu tradisi. Adapun tujuan memberikan pemahaman mengenai tradisi *rebu* ialah memberikan tuntunan, pengajaran, serta tujuan dalam tradisi *rebu* supaya generasi muda mengetahui apa dan bagaimana tradisi *rebu*. Baik itu tata cara pelaksanaanya maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

4. Eksistensi Tradisi *Rebu*

Suatu kebudayaan dan tradisi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Masyarakat memaknai tradisi sebagai bagian dari kehidupan karena sejak pertama kali dilahirkan sudah memiliki tradisi dan kebudayaan yang diturunkan secara turun temurun dari keluarga dan sudah melekat kedalam kehidupan masyarakat itu sendiri. tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar ada hingga kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan. Disini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar tersisa dari masa lalu. (Piotr Sztompka,2007:69). Tradisi merupakan bagian dari sebuah kebudayaan yang universal, dimana masing-masing masyarakat memiliki kebudayaan dan tradisi yang berbeda-beda. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa kini berasal dari masa lalu. (Piotr Sztompka,2007:69).

Hal ini sesuai dengan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat Karo, bahwa adanya proses internalisasi dan sosialisasi dari generasi sebelumnya yang saat ini direpresentasi masyarakat suku Karo di Tanjungpinang yaitu dengan melaksanakan Tradisi *rebu* ini karena ini merupakan kebiasaan sejak dulu kala yang dilakukan oleh nenek moyang dalam menjaga sikap dan bertutur terhadap sesama orang Karo. Dapat dilihat bahwa cara bertindak dan berpikir seperti itu yang dinamakan fakta sosial karena masyarakat Karo melaksanakan tradisi *rebu* yang didalamnya memuat aturan/ larangan berbicara antara mertua dengan menantu dan sesama ipar yang berbeda jenis kelamin merupakan aturan yang sifatnya memaksa, aturan yang berlaku secara turun-temurun dan menjadi sebuah kebiasaan/tradisi. Tradisi yang merupakan warisan nenek moyang yang tetap langgeng hingga saat ini dan diyakini bersama oleh masyarakat suku Karo bahwa hal tersebut memiliki nilai dan norma didalamnya

Tradisi *rebu* di Tanjungpinang dapat dipertahankan oleh masyarakat Karo itu karena

terdapat nilai dan fungsi yang baik dari tradisi itu sendiri di kehidupan masyarakat. Eksistensi tradisi ini juga dapat bertahan karena ada upaya dari masyarakat itu sendiri untuk mempertahankannya. Tradisi bisa beradaptasi dimana pun jika masyarakat yang menganut tradisi itu terus menggunakannya dalam kesehariannya, tradisi *rebu* ini beradaptasi di antara banyak kebudayaan lain di tempat perantauan namun tradisi ini tidak hilang karena masyarakat Karo masih terus menggunakan tradisi tersebut. Adanya suatu paguyuban IMK Mbuah Page menjadi salah satu wadah masyarakat Karo yang merantau dapat berkumpul, dimana pun masyarakat Karo berkumpul tradisi *rebu* sudah pasti digunakan. Tradisi *rebu* memiliki nilai sopan santun dan dari sopan santun muncul nilai untuk saling menghargai dan menghormati dalam bertindak, dengan adanya nilai dan tujuan dari *rebu* dapat membatasi masyarakat dalam bertindak.

Fakta sosial yang bersifat eksternal itu menurut Durkheim juga bersifat repressif yakni memaksa individu. Individu dalam konteks ini dipaksa, dibimbing, diyakinkan dan didorong untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan seperti nilai dan norma yang sudah ada di dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tradisi *rebu* masyarakat dipaksa dan dibimbing untuk mengetahui aturan dalam menjalankan tradisi *rebu* agar pelaksanaan tradisi ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam adat, di tradisi *rebu* terdapat pelaku *rebu* yang terdiri dari mertua laki-laki, menantu perempuan, mertua perempuan, menantu laki-laki, dan saudara ipar yang berbeda jenis kelamin. Masing-masing pelaku *rebu* harus tau apa aturan dan hal yang tidak boleh mereka lakukan dan harus paham tradisi *rebu* itu seperti apa karena ketidakpahaman salah satu pelaku *rebu* terhadap tradisi ini maka membuat salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik. Jika masing-masing pelaku *rebu* sudah mengerti sehingga tradisi ini dapat berjalan dengan baik. Memelihara dan memperbaiki baik motivasi para individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan menopang motivasi itu.

Dalam upaya ini dimaksudkan bahwa tradisi harus dipelihara dengan memberikan motivasi yang baik kepada generasi ke generasi selanjutnya mengenai nilai tradisi *rebu* sehingga tradisi ini bisa terus terpelihara. Orangtua yang melaksanakan Tradisi *Rebu* ini berperan memberi gambaran dan menjelaskan kepada anak-anaknya seperti apa Tradisi *Rebu* ini sehingga kemana pun pergi tradisi ini tetap ada dan dilaksanakan karena telah dipahami dan sudah mengerti apa tujuan dari tradisi tersebut. Ada pula kekuatan dalam adat yang diyakini bersama memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai budaya dalam adat istiadat disosialisasikan dan diperkuat hingga saat ini.

Kesimpulan

Masyarakat Suku Karo yang merantau walaupun jauh dari daerah asalnya, tetap masih menjalankan tradisi *Rebu* sebagaimana pelaksanaan di tempat daerah asalnya, tanpa mengurangi nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalam tradisi *Rebu* itu sendiri. Karena masyarakat menyakini nilai-nilai dari suatu tradisi pasti mempunyai pengaruh yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti nilai dan makna yang terkandung di dalam tradisi *rebu* dapat berfungsi dalam menjalankan tatanan kehidupan masyarakat khususnya dalam kehidupan berkeluarga seperti nilai sopan santun dan saling menghormati antara menantu dengan mertua begitu juga sebaliknya mertua dengan menantu baik laki-laki maupun perempuan, sehingga tercipta harmonisasi di dalam keluarga dan masyarakat.

Eksistensi Tradisi *Rebu* ini dapat bertahan karena ada upaya dari masyarakat itu sendiri untuk mempertahankan diantaranya dengan cara tetap konsisten melaksanakan, menjaga dan mewariskan nilai-nilai Tradisi *Rebu* dari generasi-kegenerasi. Karena hal yang paling mendasar bagi masyarakat dalam sebuah tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan. Informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi merupakan hasil dari berkembangnya cara hidup sebuah kelompok yang diwariskan secara turun temurun. Kebudayaan dan tradisi tidak akan hilang

walaupun penganut tradisi itu pergi dari tempat asal budaya dan tradisi itu diciptakan.

Bibliografi

Pustaka yang berupa judul buku

Elly M.S., dkk. 2006. *Ilmu Sosial Budaya Dasar "edisi ketiga"*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

George, Ritzer. 2014. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

George, Ritzer., & Goodman, D.J. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sulasman, Setia Gumilar. 2013. *Teori-teori Kebudayaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Suyanto, Bagong., & Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Group.

Sztompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

Azka, A.M.A.M. 2020. Tradisi *Rebu* Ngerana Pasca Perkawinan Pada Masyarakat Karo Sumatera Utara. *Al-Qahda: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. 7(2). pp. 88-98.

Sinuraya, J.A., & Malau, W. 2019. *Rebu* Dalam Sistem Keekerabatan Etnis Batak Karo di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo. *Gondang: Jurnal Seni dan Budaya*. 3(1). pp 35-49.

Pustaka yang berupa disertasi/thesis/skripsi:

Asnita, Sri. 2020. *Adat Istiadat Rebu Pada Keluarga Karo di Yogyakarta 1970-1998*. Skripsi Sejarah. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Rosi, Milka. 2020. *Gaya Komunikasi Rebu Dalam Adat Istiadat Suku Karo Di Kabupaten Karo*. Skripsi Ilmu Komunikasi. Universitas Sumatera Utara.



PARTISIPASI LANSIA DALAM KEGIATAN POSYANDU ANGGREK DI KELURAHAN LUBUK SEMUT, KABUPATEN KARIMUN

Shelly Rahmadani Putri¹; Casiavera²; Meildia Stefanie³; Rahma Hayati Harahap⁴;
Universitas Maritim Raja Ali Haji^{1,2,3} Universitas Sumatera Utara⁴;
Email: shellyrahmadaniputri@gmail.com, 190569201085@student.umrah.ac.id

Artikelinfo

Artikel history:

Diterima: 11 Oktober
2022
Diterima dalam
bentuk revisi: 20
November 2022
Diterbitkan: 12
Desember 2022

Kata Kunci:

Posyandu, lansia,
partisipasi

Abstrak

Perhatian dari orang sekitar kepada penduduk lanjut usia sangat diperlukan agar penduduk lanjut usia menjadi berkuliatas dan produktif, sehingga dapat mensejahterakan diri. Indikator masyarakat sejahtera adalah terpenuhinyakebutuhan-kebutuhan dasar individu. Posyandu sebagai wadah pelayanan kepada lanjut usia yang menitikberatkan kepada pelayanan kesehatan, psikologi, rohani, pemenuhan gizi agar lanjut usia dapat memenuhi kebutuhannya dan menciptakankesejahteraan sosial yang memadai. Salah-satu posyandu lansia yang tujuannya untuk mensejahterakan lanjut usia adalah Posyandu Anggrek di Kelurahan Lubuk Semut, Kabupaten Karimun. Program yang dilakukan pada posyandu ini dalam mewujudkan kesejahteraan sosial lanjut usia seperti; pemeriksaan kesehatan, senam lansia, dan pemenuhan gizi lansia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan mengambil dua sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pernyataan informan melalui wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan data sekunder yang bersumber dari buku, dan jurnal yang terkait dengan judul penelitian. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini terkait dengan peran Posyandu Anggrek terhadap kesejahteraan lansia di Kelurahan Lubuk Semut adalah adanya kegiatan rutin setiap satu bulan seperti pemeriksaan kesehatan dan senamlansia. Dari adanya kegiatan dari Posyandu Anggrek ini membawa pengaruh yang positif bagi lansia di Kelurahan Lubuk Semut, yang mewujudkan kesejahteraan lansia lebih baik dari sebelumnya.

Corresponden author: Shelly Rahmadani Putri

Email: shellyrahmadaniputri@gmail.com

Pendahuluan

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografi Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan namun memiliki tujuan untuk menetap. Konsep penduduk tersebut diperbaharui pada pelaksanaan sensus penduduk pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari satu tahun namun memiliki tujuan untuk menetap (BPS.go.id). Menurut WHO (World Health Organization) dalam (Nugroho, 2014: 2) "Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun baik laki-laki maupun perempuan". Lanjut usia sebagai sekelompok orang yang sedang mengalami proses perubahan yang bertahap dalam jangka waktu tertentu. Meningkatkan jumlah pertumbuhan kelompok penduduk disebabkan tingginya rata-rata harapan hidup.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (2020), disebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia Tahun 2020 berjumlah 270.203.9 jiwa orang. Data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Setiap jumlah ini terbagi atas berbagai komponen seperti pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, usia, latar belakang, sosial dan budaya. (bps.go.id, 2020). Dalam hal ini jumlah penduduk lanjut usia tahun 2020 berjumlah sekitar 17.600.000 jiwa dengan berdasarkan kategori usia di dalamnya (lokadata,2020).

Menurut Fiori, dkk (2006:26) "Individu yang terintegrasi secara lokal membutuhkan dukungan sosial yang ditandai terpenuhinya kebutuhan informal dari keluarga, teman, dan tetangga, serta terlibat dalam kelompok masyarakat adalah yang paling beresiko untuk masalah kesehatan moral seperti kesepian dan depresi". Perubahan yang terjadi dapat meliputi perubahan fisik, biologis, kognitif, psikologis, ekonomi, dan peranan sosial masyarakat. Perubahan fisik dan kognitif yang dilihat dari perubahan warna rambut dan tumbuh menjadi bungkuk serta mudah mengalami penyakit dan mengalami kepikunan. Kemampuan biologis terlihat dari sistem reproduksinya seperti perempuan lanjut usia yang mengalami menopause. Sedangkan untuk kemampuan sosial yang awalnya hangat dan harmonis menjadi mengalami disfungsi sosial. Oleh karena itu, lanjut usia harus dipandang sebagai individu yang memiliki, kebutuhan khusus seperti intelektual, emosional dan spiritual. (Nugroho, 2014:2)

Perhatian dari orang sekitar kepada penduduk lanjut usia sangat diperlukan agar penduduk lanjut usia menjadi berkualitas dan produktif, sehingga dapat mensejahterakan diri. Indikator masyarakat sejahtera adalah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar individu. Menurut Abraham dalam Sudjana (2004 :187), ada lima tingkat kebutuhan yang harus terpenuhi yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, rasa ingin dihargai, dan aktualisasi diri. Kelima tingkatan kebutuhan tersebut menjadi tolak ukur sejahtera

penduduk lanjut usia dengan indikator, di antaranya :

- a) Keadaan fisik dan kesehatan yang baik,
- b) Tidak tergantung secara ekonomi,
- c) Mampu menyesuaikan diri secara sosial dengan masyarakat,
- e) Penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial untuk lanjut usia yang baik.

Usaha dalam mencapai kesejahteraan penduduk lansia bukan berarti akan diwajibkan secara pribadi, namun secara kolektif baik itu dari dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah juga harus menjamin usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan tersebut yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan sosial, yang berbunyi “Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia dapat diberdayakan, sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan kondisi fisik serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Salah satu dalam mencapai kesejahteraan sosial lanjut usia adalah dengan dibentuknya posyandu.

Posyandu sebagai wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat yang menitikberatkan kepada pelayanan kesehatan, psikologi, rohani, pemenuhan gizi agar lanjut usia dapat memenuhi kebutuhannya dan kesejahteraan sosial yang memadai. Kegiatan lanjut usia diadakan setiap 1 (satu) bulan sekali yaitu : a). pelayanan kesehatan agar lanjut usia dapat mengetahui kondisi tubuhnya dan melakukan pencegahan apabila terdapat gejala atau penyakit, b). pelayanan psikologis merupakan pelayanan yang bertujuan untuk membuat psikologis lanjut usia selalu bahagia dan senang sehingga selalu percaya diri, c). pelayanan rohani yang dilakukan dengan sistem tutor sebaya, dan d). pelayanan pemenuhan gizi yaitu dengan pemberian makanan dan minuman tambahan kepada lanjut usia, pelayanan yang dilakukan oleh posyandu lansia dilakukan agar lanjut usia merasa mendapatkan penghargaan oleh orang-orang disekitarnya dan dapat menerapkan prinsip kemandirian (self-reliance) agar terbebas dari sifat ketergantungan.

Salah satu posyandu lansia yang usahanya untuk mensejahterakan lanjut usiadalah Posyandu Anggrek Kelurahan Lubuk Semut, Kabupaten Karimun. Program yang dilakukan pada posyandu ini dalam mewujudkan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah dengan melakukan koordinasi melalui masyarakat dan pemerintah melalui program posyandu lanjut usia. Kegiatan yang dilakukan beragam seperti pemeriksaan kesehatan, senam lansia, siraman rohani, pemenuhan gizi lansia dan pembinaan psikologi. Selain itu berdasarkan observasi lapangan yang telah dilakukan, terlihat lanjut usia yang berpartisipasi sangat antusias dalam menyambut program tersebut. Tidak hanya itu, dukungan dari masyarakat sekitar mensukseskan program tersebut, sehingga harapannya adanya program ini masalah kesejahteraan sosial lanjut usia menjadi semakin berkurang.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai peran posyandu terhadap kesejahteraan sosial lansia yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yuli Kusumawati, dkk (2016) dengan judul penelitian “Pengembangan Kegiatan Posyandu Lansia Anthurium di Surakarta”. Dengan menjelaskan tentang adanya beberapa masalah yang dihadapi oleh Posyandu Anthurium dalam programnya untuk mendidik dan membina masyarakat yang sehat hingga masa lanjut usia. Masalah-masalah yang dihadapi oleh posyandu ini, adalah belum adanya papan nama posyandu, sarana dan prasarana yang belum lengkap, dan

kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari pengelola posyandu dalam memberikan pelayanan. Untuk itu diperlukan adanya pengembangan posyandu agar bisa menjalankan programnya dengan baik dengan bentuk kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh peneliti. Kegiatan pengabdian tersebut dilakukan dalam bentuk pelatihan untuk membenahi posyandu baik itu dari administrasi, penambahan sarana dan prasarana dalam mengontrol kesehatan lansia (alat pemeriksaan dan alat konseling kesehatan berupa poster dan leaflet kesehatan), pelayanan berupa penyuluhan dan latihan fisioterapi, dan konsultasi gizi lansia. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah subjek yang diteliti adalah sama-sama mengenai kegiatan posyandu lansia. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek penelitian sebelumnya adalah mengenai pengembangan kegiatan posyandu lansia Anthurium sedangkan objek penelitian ini adalah mengenai partisipasi lansia dalam kegiatan posyandu lansia Anggrek. Lalu fokus kajian penelitian sebelumnya adalah mengenai pengembangan kegiatan posyandu lansia Anthurium dengan melakukan kegiatan pengabdian, sedangkan fokus kajian penelitian ini adalah partisipasi dari lansia dalam melakukan kegiatan posyandu lansia Anggrek dengan dianalisis teori aktivitas (*activity theory*). Dan lokasi penelitian sebelumnya berada di wilayah Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sedangkan lokasi penelitian ini di Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memfokuskan terhadap peran Posyandu Anggrek terhadap Kesejahteraan Lansia di Kelurahan Lubuk Semut, Kabupaten Karimun dengan analisis teori aktivitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan peran Posyandu Anggrek terhadap lansia di Kelurahan Lubuk Semut sebagai wadah bagi lansia dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka agar tetap produktif di hari tua.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkaji objek untuk mengungkapkan fenomena-fenomena yang secara konseptual melalui pengumpulan data yang diperoleh. Fenomena ini terdiri dari bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, dan perbedaan antara fenomena satu dengan fenomena yang lain (Syamsuddin, 2016).

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu) lanjut Usia Taman Anggrek yang berada di Jl. H. Sahabu, RT/RW 002/001, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Pada bagian ini perlu ditampilkan metode penelitian, pendekatan, cara pengumpulan dan analisis data yang digunakan. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena di Posyandu ini melakukan kegiatan rutin setiap bulannya dalam hal meningkatkan kesejahteraan sosial Lanjut usia.

Penelitian kualitatif memiliki sumber data yaitu Data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari informan dengan secara langsung melalui wawancara dan observasi lapangan yang diperoleh dari kader posyandu, tenaga kesehatan, lansia, dan masyarakat di sekitar posyandu Anggrek. Sedangkan data sekunder yang bersumber dari catatan-catatan, buku-buku, dan jurnal yang terkait dengan judul penelitian ini.

Teknik pengumpulan data adalah bagian yang penting sebuah penelitian, karena tujuan utama dilakukan penelitian adalah mendapatkan data. Instrumen penelitian ini merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam pengumpulan data. Dalam rencana

penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Setelah diperoleh masalah dan dapat dilihat dengan jelas, maka instrumen didukung dengan daftar atau pedoman wawancara, rencana observasi, kamera, buku catatan dan alat-alat yang digunakan etode penelitian yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Keterangan gambar diletakkan menjadi bagian dari judul gambar (*figure caption*) bukan menjadi bagian dari gambar.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Posyandu

Posyandu pertama kali di cetus pada tahun 1975 oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Menetapkan Posyandu sebagai sebuah kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat desa (PKMD) yang merupakan bagian dari kesejahteraan umum. Pada tahap awal, kegiatan PKMD adalah untuk memperbaiki gizi melalui pos penanggulangan diare, serta untuk imunisasi. Pada tahun 1984 dikeluarkan intruksi bersama antara Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN, dan, Menteri dalam Negeri yang mengintergrasikan berbagai kegiatan yang ada dimasyarakat dalam satu wadah yang disebut Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselegraraan pembangunan kesehatan. UKBM (Unit Kegiatan Berbasis Masyarakat) yaitu wadah pemberdayaan masyarakat dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat melalui bimbingan petugas pukesmas, lintas sektor, dan lembaga terkait lainnya. Hal ini dikarenakan, posyandu sebagai wadah pelayanan dari berbagai program, maka penyelegaraan posyandu perlu menyertakan berbagai aspek pemberdayaan masyarakat secara konsisten. Aspek pemberdayaan masyarakat menjadi tumpuan upaya peningkatan posyandu, yang dalam pelaksanaannya perlu tetap memperoleh bantuan teknis dari pemerintah, serta menjalin kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak.

Fungsi, Manfaat, Sarana dan Prasarana Posyandu Anggrek

1. Fungsi Posyandu Angrek
 - a) Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam ahli informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan anter sesama masyarakat dalam rangka mensejahterakan lanjut usia.
 - b) Wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi lanjut usai.

2. Manfaat Posyandu Anggrek
 - a. Bagi Masyarakat, memperoleh informasi tentang kesehatan terkait dan menyelesaikan masalah kesehatan terutama bagi lanjut usia.
 - b. Bagi Kader Posyandu, membantu masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan terutama lanjut usia
 - c. Bagi Puskesmas, mengoptimalkan fungsi puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama bagi lansia.
3. Sarana dan Prasarana Posyandu Anggrek

Adapun sarana dan prasana posyandu Anggrek dalam pelaksanaan kegiatan posyandu, yang terdiri dari obat-obatan untuk lansia yang membutuhkannya, seperti lansia yang mengalami tekanan darah tinggi (tensi). Kemudian, timbangan badan sebagai alat untuk menimbang berat badan, mengukur tinggi badan dan mengukur kadar lemak dalam tubuh lansia. Lalu meja pelayanan sebagai sarana dalam memeriksa kadar gula, kolesterol dan pemberian obat-obatan sekaligus untuk penyuluhan. Serta alat-alat kesehatan lainnya, seperti alat pengukur kadar gula, suntikan, tensimeter, dan sebagainya.

Mekanisme Pelayanan Program Posyandu oleh Kader Posyandu.

Pelayanan memberikan tambahan oleh Posyandu dalam hal kesehatan lanjut usia setiap bulannya dalam mengadakan penimbangan berat badan, pengobatan lanjut usia yang sakit, penyuluhan kesehatan lanjut usia, pemeriksaan kesehatan lanjut usia dan pemberian vitamin. Pelaksanaan posyandu lansia berlangsung setiap sebulan sekali dengan jumlah 5 orang kader. Posyandu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara terpadu yang mudah dijangkau.

Tahapan Pelayanan Program Posyandu yang dimonitori oleh Kader Posyandu

- a) Tahapan Pendaftaran

Pada meja pendaftaran peran kader posyandu adalah mencatat data lanjut usai yang datang ke posyandu, yaitu nama dan umur lansia. Buku catatan ini akan menggambarkan kehadiran lanjut usia selama posyandu dilaksanakan. Berdasarkan buku catatan tersebut dapat diketahui oleh lansia yang aktif dan yang tidak aktif mengikuti posyandu setiap bulannya di Posyandu Anggrek. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa kader posyandu meminta lanjut usia untuk membawa dan menyerahkan pada kader posyandu gunanya untuk mempercepat pelayanan diberikan. Apabila sudah memiliki KMS berarti bulan lalu sudah melakukan pemeriksaan. Setelah itu akan dilakukan tahapan penimbangan dan kolomnya diisi secara lengkap, nama lansia dicatat di kertas dan diselipkan di KMS kemudian lansia dapat melakukan penimbangan.



Gambar 1. Tahap Pendaftaran

b) Tahapan penimbangan

Setelah melakukan pendaftaran, kemudian lansia akan di timbang oleh kader posyandu. Penimbangan berat badan merupakan kegiatan rutin posyandu yang berfungsi memantau berat badan lanjut usia yang dilaksanakan setiap bulannya.

Gambar 2. Tahap Penimbangan



c) Tahap pencatatan

Pada meja pencatatan peran kader adalah memindahkan hasil penimbangan ke dalam KMS lansia memberikan gambaran keadaan lansia yaitu status gizi lanjut usia. Di dalam KMS berat badan lansia hasil penimbangan akan ditandai dengan titik lalu dihubungkan dengan garis, sehingga akan membentuk garis pertumbuhan lansia. Berdasarkan garis pertumbuhan tersebut akan di nilai berat badan lanjut usia naik dengan simbol (N) dan turun dengan simbol (T).

d) Tahapan Penyuluhan

Pada tahap ini, kader posyandu memberikan informasi yang penting kepada lansia. Penyuluhan dilakukan dengan meminta KMS lansia dengan memperhatikan umur dan hasil penimbangan pada bulan ini, selanjutnya lansia atau pendampingnya akan diberikan penyuluhan. Informasi diberikan dapat berupa masalah-masalah gizi atau upaya peningkatan status gizi

e) Tahap pelayanan

Tahap ini dilakukan langsung oleh tenaga kesehatan. Namun fungsi kader

disini hanya melakukan pendampingan kepada lanjut usia yang biasanya tidak mampu memberikan penjelasan kepada pihak kesehatan ketika ada beberapa pertanyaan.

Gambar 3. Tahap Pencatatan, penyuluhan, dan pelayanan



Peran Posyandu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Posyandu Anggrek

Peran kader Posyandu adalah bagian vital dalam meningkatkan partisipasi lanjut usia untuk ikut program Posyandu. Oleh karena itu, dalam hal ini akan dijelaskan seperti apa peran kader posyandu. Berdasarkan hasil penelitian, ada 3 (tiga) peran kader posyandu yaitu: sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan. Dalam kegiatan posyandu, banyak komponen yang terlihat baik secara langsung. Pada dasarnya setiap masyarakat berperan dalam mengikuti kegiatan program posyandu, seperti penimbangan, konsultasi kesehatan, gizi, dan pemeriksaan kesehatan. Namun demikian, tingkat keberhasilan program posyandu akan sangat tergantung kepada ketercapaian tujuan pelaksanaan di lapangan. Terlihat dari sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap kegiatan posyandu, akan di pengaruhi oleh ketepatan sasaran program posyandu. Berhasilnya pelaksanaan program posyandu sangat tergantung pula dari peran masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan fasilitas di posyandu.

Berdasarkan observasi lapangan, maka ketercapaian tujuan program tersebut perlu dijadikan perhatian mengingat masih lemahnya kontrol program posyandu. Implementasi kegiatan posyandu selama ini, tentunya banyak sekali faktor yang mendukung maupun menghambatnya. Tingkat pendidikan tentang medis dan masyarakat, keterlibatan penuh dari kader posyandu, tim penggerak PKK, serta komitmen pemerintah kelurahan dan kabupaten akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan program posyandu. Faktor-faktor inilah yang masih belum diperhatikan secara optimal, sehingga implementasi program sesuai dengan harapan yang ingin dicapai.

Posyandu Anggrek merupakan wadah untuk mendapatkan pelayanan dasar terutama dalam bidang kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola oleh masyarakat, penyelenggaraanya dilaksanakan oleh kader yang telah dilatih dibidang kesehatan dan KB, dimana anggotanya berasal dari PKK, dan tokoh masyarakat. Namun, saat ini kinerja posyandu belum optimal dengan jumlah kader yang hanya 5 (lima) orang saja. Adapun peran kader Posyandu Anggrek dalam meningkatkan Kesejahteraan sosial khususnya di bidang kesehatan lanjut usia yaitu :

a. Sosialisasi

Suksesnya suatu program dalam hal ini program Posyandu Anggrek, sangat bergantung pada aktif atau tidak adanya partisipasi masyarakat sekitar untuk menyukseskan dan ikut adil pada program tersebut. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat sangat penting artinya bagi kelancaran dan keberhasilan program posyandu. Sebelum melakukan tahap lain, tahapan awal yang dilakukan adalah tahap sosialisasi. Sosialisasi adalah penyebarluasan informasi hari buka posyandu yang disampaikan dengan bantuan tokoh masyarakat ataupun tokoh agama setempat dengan fasilitas sarana ibadah (mesjid).

b. Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan untuk perorangan yang dapat diperkaya dengan penyuluhan kelompok dengan cara mengumpulkan masyarakat di Kelurahan Lubuk Semut dalam hal lanjut usia. Penyuluhan dilakukan 4 sampai 5 kali dalam setahun dengan materi yang menyangkut tentang perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengenai makanan yang baik untuk dikonsumsi. Materi penyuluhan tentang pemberian makanan asupan gizi merupakan hal yang penting untuk diberitahukan organ pencernaan lansia yang mengalami penurunan kinerja. Hal ini telah dicapai dari hasil penyuluhan oleh kader Posyandu Anggrek adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat agar dapat mengerti dan memahami cara pemilihan makanan yang tepat bagi lanjut usia karena sudah berusia 60 tahun keatas.

c. Pendampingan

Pendampingan adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan. Pendampingan dapat dipahami sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menepatkan tenaga pendampingan sebagai fasilitator, komunikator, motivator, dan dinamisator. Pada dasarnya pendampingan ini dilakukan oleh kader Posyandu Anggrek merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi, sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan kajian kesejahteraan sosial, menurut Segal dan Brzuzy, “Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsi sosialnya“. Terwujudnya kesejahteraan warga negara dapat menciptakan struktur masyarakat atau negara yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua warga (Suud, 2006). Dari penjelasan di atas mengenai kesejahteraan sosial, dapat disimpulkan bahwa keberadaan kader posyandu sangat membantu tenaga kesehatan dalam meminimalisir permasalahan kesehatan lansia di Kabupaten Karimun, terkhususnya di Kelurahan Lubuk Semut. Pada saat melakukan pelayanan semua kader berperan aktif mulai membuka penyelenggaraan kegiatan hingga sampai kegiatan penyuluhan dan pemberian obat-obatan jika kondisi kesehatan lansia mulai menurun. Dalam mewujudkan

peran yang akan dilakukan oleh Posyandu Anggrek, untuk itu dibutuhkan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap kader Posyandu Anggrek. Adapun nilai-nilai tersebut, yaitu :

1) Tanggap

Melihat dari peranan yang telah dilakukan oleh kader posyandu, terlihat bahwa setiap kader melakukan perannya dengan tanggap. Tanggap berarti setiap permasalahan secepat mungkin memberikan solusi dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam menanggapi permasalahan.

2) Akurat

Tidak hanya tanggap, akurat juga menjadi peran yang telah dilakukan oleh posyandu. Setiap informasi ataupun prosedur pelaksanaan program secara akurat disampaikan, oleh karena itu tidak benar yang beredar di lingkungan masyarakat tanjung balai karimun tentang posyandu anggrek.

3) Tanggungjawab

Tanggungjawab menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dari peran kader posyandu. Tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kader hendaknya harus dilaksanakan sebaik mungkin, sehingga tujuan posyandu tercapai dan kesejahteraan lanjut usia dapat terwujud.

Selain itu, peran dari posyandu lansia juga dapat mewujudkan keluarga lansia yang sadar akan pentingnya kebutuhan gizi dan kesehatan lansia melalui upaya promotif, preventif, rehabilitatif dan kuratif. Melalui upaya promotif, dengan mengajak keluarga untuk terlibat langsung dalam pemeriksaan kesehatan sebagai pendamping lansia. Melalui upaya preventif, posyandu mengadakan sosialisasi kebutuhan gizi dan cara menjaga kesehatan lansia bagi keluarga lansia. Melalui upaya rehabilitatif dan kuratif, posyandu lansia membuka konseling mengenai perawatan lansia dan hambatan dalam pemenuhan gizi lansia yang berlangsung secara informal. Jenis pelayanan bagi lansia yang terdapat di posyandu lansia meliputi pemeriksaan kesehatan, menimbang berat badan, cek tekanan darah, pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bagi lansia, senam lansia, konseling lansia, dan sosialisasi kebutuhan gizi lansia bagi keluarga lansia (Gita Nilasari & Prabawati, 2018). Dari hal tersebut diharapkan dapat menjadi kebiasaan yang baik bagi keluarga lansia dan masyarakat secara umum. Kegiatan posyandu yang dapat diikuti oleh keluarga lansia yaitu pemeriksaan kesehatan rutin. Keluarga lansia menjadi pendamping lansia dalam pemeriksaan, selain karena lansia membutuhkan bantuan dalam hal berjalan, membaca, dan beberapa lansia mengalami kemunduran kemampuan pendengaran, dengan adanya keluarga menjadi pendamping maka keluarga dapat mengetahui secara langsung kondisi kesehatan lansia yang nantinya akan disesuaikan dengan pola masak di rumah dan perawatan lansia.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan posyandu lansia dapat dalam bentuk dukungan finansial, ide, tenaga, maupun evaluator. Evaluasi dilaksanakan setiap selesai kegiatan posyandu telah usai. Pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pelayanan posyandu lansia disusun ialah perangkat setempat, para

kader, pihak desa, dan puskesmas(Saputri, 2021). Dampak dari adanya layanan posyandu lansia tersebut adalah keluarga lansia mulai memiliki pengetahuan dan kesadaran pentingnya kebutuhan gizi lansia dan kesadaran untuk menjaga kesehatan. Keluarga lansia mulai merubah pola masak, merubah perawatan kepada lansia menjadi lebih baik dan memperhatikan gizi lansia. Dampak dari adanya layanan Posyandu lansia tersebut adalah keluarga lansia mulai memiliki pengetahuan dan kesadaran pentingnya kebutuhan gizilansia dan kesadaran untuk menjaga kesehatan. Tumbuh kesadaran untuk memeriksakan kesehatan lansia secara rutin. Keluarga lansia mulai merubah pola masak, merubah perawatan kepada lansia menjadi lebih baik dan memperhatikan gizi lansia. Kegiatan posyandu lansia tersebut bermanfaat memudahkan akses kesehatan bagi keluarga lansia untuk melakukan konsultasi mengenai kondisi kesehatan lansia.

Analisis Teori Aktivitas

Teori Aktivitas dikembangkan oleh Palmore dan Lemon et al dengan mengatakan bahwa proses penuaan yang sukses jika seorang lansia merasakan kepuasan dalam melakukan aktivitasnya, yang dimana aktivitas tersebut dipertahankan lebih penting dibandingkan aktivitas lain yang dilakukan. Teori ini menekankan kepada pentingnya peran serta lansia dalam kegiatan masyarakat. Penerapan teori aktivitas dalam menyusun kebijakan itu sangat positif terhadap kehidupan lansia, hal ini dikarenakan para lansia memungkinkan mereka untuk melakukan interaksi di dalam masyarakat. Seorang lansia mempunyai banyak waktu luang, yang dimana lansia perlu melakukan aktivitasnya baik itu yang berhubungan dengan hobi seperti melukis, menjahit, berolahraga, bergabung dalam perkumpulan sosial bersama teman sebaya ataupun tetangga, aktivitas keagamaan seperti mengikuti siraman rohani, dan aktivitas yang bersifat hiburan seperti bermain, menonton, berekreasi ke tempat wisata, dan lain sebagainya. Berbagai aktivitas yang dilakukan lansia itu menjadi penting, karena berhubungan dengan kepuasan hidup yang nantinya menjadi indikator sejahtera atau tidaknya kehidupan lansia.

Posyandu Anggrek dengan berbagai kegiatannya yang bertujuan agar lansia sejahtera dan tetap beraktivitas dalam usia tuanya. Dengan partisipasi dan wawancara yang peneliti lakukan, dapat menyebutkan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh lansia dan tanggapan lansia mengenai kegiatan yang diselenggarakan Posyandu Anggrek. Sebelum memulai kegiatan posyandu, lansia diarahkan untuk melakukan senam lansia terlebih dahulu agar lansia tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitasnya. Pelaksanaan senam lansia ini dilakukan pada pukul 08.00 pagi setiap bulannya sebagai kegiatan awal posyandu lansia. Selanjutnya kegiatan pemeriksaan kesehatan, kegiatan tersebut dilakukan secara rutin seperti penimbangan berat badan, mengukur kolestrol, pemeriksaan kadar gula, pemeriksaan asam urat, mengukur tekanan darah (tensi), dan pemberian obat-obatan kepada lansia oleh tenaga kesehatan dari puskesmas.

Kegiatan posyandu lansia ini dilakukan setiap sebulan sekali dengan mendatangi wilayah yang bisa dijangkau oleh semua lansia di Kelurahan Lubuk Semut, yang dimana kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan warga bukan di posyandu. Dengan adanya kegiatan ini lansia tidak perlu lagi untuk mengecek kesehatannya ke rumah sakit, karena untuk ke

rumah sakit diperlukan lagi biaya pengecekan dan untuk menjangkau rumah sakit bagi lansia itu sulit apalagi ditambah tidak ada keluarga yang mendampingi lansia. Berdasarkan hal tersebut, para lansia mengatakan bahwa mereka mengikuti kegiatan posyandu lansia sebagai pemeriksaan dasar (pemeriksaan awal) untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka, seperti mengecek tekanan darah dan berat badan mereka.

Dalam penelitian ini dapat dikaji dengan teori aktivitas, yang dimana para lansia yang mengikuti kegiatan dari posyandu Anggrek ini dapat dikatakan lansia yang produktif. Setiap bulannya mereka mengikuti kegiatan dari Posyandu Anggrek, misalnya seperti senam lansia. Yang dimana senam lansia ini bermanfaat untuk kesehatan lansia khususnya pada kesehatan motorik lansia agar tubuh tidak terlalu kaku dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Selain itu, lansia diarahkan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan agar mengetahui kondisi kesehatannya. Saat mengikuti kegiatan posyandu, lansia lebih banyak bercengkrama dengan sesamanya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lansia lebih banyak menghabiskan waktu mereka di rumah saja, kemampuan sosialisasi mereka menurun, dan tidak ada interaksi dengan teman sebayanya. Untuk itu dengan adanya kegiatan posyandu ini, lansia lebih banyak berinteraksi dengan lansia lainnya ataupun kader-kader posyandu. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa standar keberhasilan pelayanan posyandu lansia adalah adanya partisipasi yang tinggi dari lansia itu sendiri dan masyarakat sekitar khususnya keluarga lansia dan kader posyandu. Partisipasi lansia di Kelurahan Lubuk Semut cukup tinggi dalam mengikuti kegiatan Posyandu Anggrek, hal ini dapat dikatakan keberhasilan pelayanan Posyandu Anggrek berhasil mewujudkan lansia yang sejahtera.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka peran Posyandu Anggrek dalam mewujudkan kesejahteraan lansia di Kelurahan Lubuk Semut adalah melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan. Dalam mewujudkan peran yang akan dilakukan oleh Posyandu Anggrek, dibutuhkan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki seperti tanggap, akurat, dan tanggungjawab oleh setiap kader Posyandu Anggrek. Selain itu, peran dari posyandu lansia juga dapat mewujudkan keluarga lansia yang sadar akan pentingnya kebutuhan gizi dan kesehatan lansia melalui upaya promotif, preventif, rehabilitatif dan kuratif. Dalam penelitian ini dapat dikaji dengan teori aktivitas, yang dimana para lansia yang mengikuti kegiatan dari posyandu Anggrek ini dapat dikatakan lansia yang produktif. Setiap bulannya mereka mengikuti kegiatan dari Posyandu Anggrek dengan melakukan senam lansia dan segala rangkaian pemeriksaan kesehatan. Senam lansia tersebut bermanfaat pada kesehatan motorik lansia agar tubuh tidak terlalu kaku dan bisa menjalankan aktivitasnya. Saat mengikuti kegiatan posyandu, lansia lebih banyak bercengkrama dengan sesamanya dan hal ini meningkatkan kemampuan bersosialisasinya. Standar keberhasilan pelayanan posyandu lansia adalah adanya partisipasi yang tinggi dari lansia itu sendiri, dan itu dapat dikatakan bahwa pelayan Posyandu Anggrek berhasil dengan adanya partisipasi dari lansia di Kelurahan Lubuk Semut.

Bibliografi

- Ari, A. (2016). *Penerapan Teori Aktivitas Lansia di Panti Budhi Dharma Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga.
- Fiori, d. (2006). *Social Network Typologies and Mental Health Among Older Adults*. 61 B, No. 1, P 25-32.
- Lexy, J. M. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Nugroho, W. (2014). *Keperawatan Gerontik dan Geriatrik: Edisi Ketiga*. Jakarta: EGC.
- Said, R. (2012). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: LP3ES.
- Siti, K. N. (2016). *Keperawatan Gerontik*. Jakarta Selatan : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia .
- Statistik, B. P. (2014). *Statistik Jumlah Penduduk Lanjut Usia*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Sudjana. (2004). *Pendidikan Non Formal*. Bandung: Falah Production.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suud, M. (2006). *Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pusaka Publisher .
- Syamsuddin. (2016). *Paradigma Metode Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Makassar: Shofia.
- Yuli Kusmawati, Y. M. (2016). *Pengembangan Kegiatan Posyandu Lansia Anthurium di Surakarta*. Warta LPM VOL. 19 No. 2, September , 125- 133.



PERAN UN WOMEN DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN *EQUAL PAY FIFA* SEPAK BOLA WANITA DI INGGRIS

Iqbal Pradana¹, Raja Saputra Lokmana², Inka Kristin Pranata Hutasoit³, Febi Triyanti⁴

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Email: iqbalpradanastalin17@gmail.com¹, rajasaputra48478@gmail.com²,
inkakristin1234@gmail.com³ febity62@gmail.com⁴

Artikelinfo

Artikel history:

Diterima: 22 November
2022

Diterima dalam bentuk
revisi: 14 Desember 2022

Diterbitkan: 16 Desember
2022

Kata Kunci:

Sepak bola, UN Women,
Equal Pay FIFA

Abstrak

Sepak bola merupakan olahraga populer dengan jumlah penggemar luar biasa yang tersebar di seluruh dunia. Setiap orang dapat dipastikan memiliki pengetahuan dasar mengenai olahraga sepak bola. Ini tidak lepas dari kemampuan publisitas yang baik serta daya tarik spesial dari olahraga tersebut, seperti pemain, klub sepak bola, sampai pada sejarahnya. Melalui survei yang dilaksanakan oleh FIFA, tercatat sebanyak 250 juta pemain sepak bola aktif yang tersebar di 200 negara dengan penggemar sebesar 3,5 milyar manusia (Avaz, 2021). Dalam menjelaskan permasalahan ini, jenis metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui berbagai strategi yang dilaksanakan UN Women untuk mendukung Equal Pay FIFA dan mengetahui proses implementasi kebijakan Equal Pay FIFA terhadap pemain sepak bola wanita di Inggris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggandeng FIFA, UN Women berusaha untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesetaraan gender di olahraga sepak bola.

Corresponden author: Iqbal Pradana

Email: iqbalpradanastalin17@gmail.com

Pendahuluan

Sepak bola merupakan olahraga populer dengan jumlah basis penggemar luar biasa yang tersebar di seluruh dunia. Setiap orang dapat dipastikan memiliki pengetahuan dasar mengenai olahraga sepak bola. Ini tidak lepas dari kemampuan publisitas yang baik serta daya tarik spesial dari olahraga tersebut, seperti pemain, klub sepak bola, sampai pada sejarahnya. Melalui survei yang dilaksanakan oleh FIFA, tercatat sebanyak 250 juta pemain sepak bola aktif yang tersebar di 200 negara dengan penggemar sebesar 3,5 milyar manusia (Avaz, 2021).

Dominasi penggemar olahraga sepak bola tersebut membuat beberapa negara memfokuskan kebijakannya, seperti Inggris. Inggris merupakan negara spesial yang terletak di wilayah benua Eropa. Status spesial ini didapat lantaran sejarah dan kultur sepak bolanya yang sangat kental. Meskipun sepak bola memiliki sejarah kompleks dengan usia 3000 tahun yang masih diperdebatkan, tetapi kelahiran sepak bola modern resmi tercatat berasal dari tanah

Inggris. Ini dibuktikan dengan dibentuknya *Football Association* (FA) pada tahun 1863 dan pelaksanaan liga sepak bola pertama di dunia pada tahun 1888 dengan 12 klub sepak bola sebagai pesertanya (Alegi, 1999). Jadi tidak heran apabila budaya dan sejarah sepak bola di Inggris sangatlah kental.

Sepak bola telah berkembang menjadi olahraga dengan banyak penggemar dengan jumlah lebih dari 3,5 miliar yang dilansir dari *worldatlas.com*. Karena status dan kekayaan mereka yang membuat mereka sangat menarik bagi para pemain, salah satu daya Tarik sepakbola adalah hal hal non teknis yang menyebabkan ketidak-pastian dalam suatu pertandingan sepak bola. Penonton belum tau hasil akhir pertandingan sebelum wasit meniup peluit tanda pertandingan telah berakhir. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dari aspek ekonomi, sejarah, dan hubungan diplomasi antar klub. Dapat dilihat bahwa kebanyakan klub raksasa sepak bola merupakan klub dengan sejarah yang panjang, seperti *Manchester United*, Pada tahun 1878, tim ini didirikan dengan nama *Newton Heath Lancashire dan Yorkshire Railway F.C.* sebagai tim *Lancashire dan Yorkshire* yang mewakili stasiun kereta api *Newton Heath*. Tim asal yang menggunkan Jersey berwarna hijau-emas. Selama empat tahun sebelum pindah ke *Bank Street* di lingkungan Clayton pada tahun 1893, mereka bermain di sebuah lapangan kecil di *North Road*, dekat stasiun kereta api *Piccadilly* di *Manchester*. Tim sebelumnya berpartisipasi dalam kompetisi sepak bola, dan dia sekarang mulai memperkuat hubungannya dengan staf administrasi stadion, menjadi perusahaan swasta, dan menghilangkan huruf "L&YR" dari namanya menjadi *Newton Heath F.C.*

Klub dengan ekonomi yang kuat seperti *Manchester City* dan *Paris Saint-Germain*, Seperti yang diketahui, berdasarkan pembaruan informasi terhitung sejak ditutupnya jendela transfer musim panas tahun 2021, *Manchester City* lah yang menjadi klub sepak bola terkaya dan termahal di dunia dengan total valuasi sebesar €1.04 miliar atau sekitar Rp16.8 triliun. Selanjutnya, deretan tersebut disusul klub sepak bola *Paris Saint-Germain* dengan total valuasi sebesar €998 juta atau sekitar Rp16.7 triliun. serta klub dengan transaksi dan hubungan diplomasi antar klub yang baik, seperti *FC Porto* dan *Ajax Amsterdam*. Yang Menghasilkan pemain pemain berkelas. Status dari klub tersebut menjadi penjamin bagi para pemain sepak bola pria untuk mendapatkan kekayaan yang setimpal dengan loyalitas yang mereka berikan.

Hanya saja, ini menjadi masalah ketika sepak bola mengalami peningkatan minat yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Masalah ini muncul dikarenakan identitas sepak bola yang diidentikkan dengan pria, padahal faktanya adalah sepak bola dapat dimainkan oleh semua gender dan seks tanpa batasan. Peningkatan minat ini dibuktikan oleh jumlah penonton semua platform pada *FIFA Women's World Cup 2019* yang mencapai angka 1,2 milyar penonton secara keseluruhannya (Bendi, 2020). Jumlah fantastis tersebut bahkan melebihi turnamen internasional sepak bola pria di wilayah region tertentu.

Peningkatan tersebut membuktikan bahwa sepak bola menjadi olahraga dengan tingkat komersil yang tinggi. Bahkan, sepak bola wanita yang kurang menjadi fokus dari FIFA mampu mendapatkan jumlah penonton yang masif. Ini menjadikan identitas gender sangat tidak berhubungan dengan tingkatan komersil yang diperkirakan. Hanya saja, jumlah tersebut tidak sebanding dengan bonus yang didapatkan oleh pemain sepak bola wanita. FIFA hanya mengalokasikan dana hadiah sebesar 30 juta US Dollar yang hanya sebanding dengan 7,5% dana hadiah dari turnamen sepak bola pria FIFA dengan total nilai 400 juta US Dollar (Hess, 2019).

Sepak bola merupakan bukti bahwa olahraga ini masih mengedepankan identitas status jenis kelamin, meskipun mendapat hasil yang sangat signifikan. Padahal, sepak bola wanita merupakan olahraga dengan tingkat perkembangan yang paling pesat dibandingkan dengan olahraga lainnya. Ini menjadi bukti bahwa status olahraga sepak bola wanita masih dapat dieksplorasi dan mungkin berpotensi seimbang dengan sepak bola pria dalam hal komersil. Meskipun begitu, status yang didapatkan para pemain sepak bola wanita masih memiliki jarak yang signifikan dibandingkan pemain sepak bola pria, terutama di Inggris.

Status ini bisa dibuktikan dengan bagaimana klub dan negara memperlakukan pesepakbola wanita. Pemain sepak bola wanita dibayar sangat rendah, bahkan lebih rendah dari klub amatir. Selain itu, tingkat profesionalitas staf klub juga tidak sebanding dengan perlakuan dari staf klub sepak bola pria. Perbedaan tingkat profesionalitas tersebut dapat memicu kehancuran karir, seperti cedera berkepanjangan, atau standar hidup yang semakin rendah. Dalam hal ini, FIFA telah melakukan survey terhadap 3000 pemain sepak bola wanita yang bermain di 33 negara lainnya dengan mayoritas bermain pada klub profesional mendapati hasil yang cukup memilukan. Upah yang sangat jauh dibawah standar negara, tidak adanya dukungan kontrak secara resmi, bahkan komitmen klub yang sangat tidak jelas membuat karir pesepak bola wanita terancam setiap waktu (Sellers, 2019).

Akibat dari hal tersebut adalah berbagai aktivis feminis menyerukan protes terhadap perlakuan yang didapatkan dari pemain sepak bola wanita karena terlihatnya perbedaan dukungan negara dan klub terhadap sepak bola wanita. Padahal, jika dianalisis, sepak bola wanita juga memiliki potensi komersil yang tidak kalah dengan sepak bola pria. Perbedaan perlakuan ini dapat dilihat dari upah yang diterima pemain sepak bola wanita di Inggris yang bermain pada klub derajat kedua, bahkan klub tersebut tidak mampu membeli perangkat latihan, seperti sepatu dan set baju training. Berbeda dengan pemain sepak bola di derajat ketiga liga Inggris yang mampu mendapatkan gaji diatas rata-rata pemain wanita dan fasilitas yang sangat lengkap. Fenomena ini bahkan membuat Toni Duggan selaku pemain tim nasional sepak bola wanita dengan posisi sebagai penyerang merasa bahwa fasilitas menjadi hal yang terpenting lantaran upah yang didapat sangat tidak mungkin meningkat tajam (Wrack, 2019). Ini jelas berbeda dengan status pemain sepak bola pria dari Inggris yang menjadi penyerang dengan gaji beberapa juta Euro.

Di sisi lain, para pemain sepak bola wanita yang bermain di Inggris juga harus dihadapi dengan perlakuan tidak menyenangkan dari berbagai pihak, seperti komentator dan fans yang terkesan *sexism*. Perlakuan tersebut dapat berupa ucapan verbal dengan memposisikan pemain sepak bola wanita sebagai obyek seksual yang tentu sangat menghina eksistensi feminis. Berbagai protes telah dilancarkan melalui media sosial dan secara resmi mengenai perilaku dari beberapa oknum tersebut. Perlindungan juga menjadi fokus dari aktivis feminis terhadap para pemain sepak bola wanita agar dapat bermain dalam posisi yang nyaman.

Dalam hal ini, *UN Women* memahami posisi kompleks dari sepak bola wanita dengan tingkat komersil tinggi, namun perlakuan yang didapat kurang menyenangkan. Sebagai organisasi yang mendukung adanya kesetaraan gender, *UN Women* perlu merencanakan dengan matang mengenai apa yang menjadi hal terpenting dari situasi kompleks tersebut. Tentu saja, *UN Women* tidak bekerja sendiri dengan mengajak FIFA sebagai *strategic partnership* dalam menunjang kesetaraan gender bagi pemain sepak bola wanita dunia, terutama Inggris. Hal inilah yang menjadika penelitian ini menjad penting di mana ini menjadi sebuah

kesempatan penting bagi *UN Women* untuk merubah posisi ketidaksetaraan yang sangat masif di dalam dunia sepak bola, menjadi lebih mendukung pemain sepak bola wanita.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif, Penelitian memiliki kemampuan untuk meng-upgrade ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan menjadi lebih berkembang, up to date serta dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) ditekankan dalam penelitian kualitatif.

Landasan teori digunakan sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta subjek. Selain itu, landasan teori berfungsi sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga berfungsi sebagai gambaran lingkungan penelitian dan sebagai topik pembahasan hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

a. Sejarah Sepak Bola Wanita di Inggris

Sepak bola wanita di Inggris memiliki sejarah perkembangan yang rumit. Tim dengan julukan '*The Three Lioness*' ini berkembang dalam waktu yang hampir satu abad. Dalam hal ini, sepak bola wanita berada di bawah naungan FA England sejak tahun 1970-an, akan tetapi mulai menjadi fokus sejak tahun 1993. Klub pertama yang muncul adalah Mrs. Graham's XI, didirikan di Skotlandia pada tahun 1881, oleh Helen Graham Matthews.

Gambar 1.1 Tim Sepak Bola Wanita Mrs. Graham's XI



Mrs. XI Nyonya Graham

Kompleksitas tersebut didasarkan pada prasangka sejarah yang buruk bagi kategori olahraga sepak bola wanita di Inggris. Ini dikarenakan adanya pelarangan pertandingan sepak bola wanita profesional di Inggris selama 50 tahun. Penyebabnya adalah peningkatan perhatian masyarakat Inggris terhadap sepak bola wanita sebagai hiburan akibat Perang Dunia. Pelarangan tersebut resmi dicabut atas dasar peningkatan euphoria masyarakat Inggris atas prestasi tim nasional sepak bola pria di tahun 1966. Hal ini dikarenakan adanya rencana jangka

panjang dari UEFA dalam rangka mengintegrasikan unsur sepak bola sebagai olahraga universal, termasuk sepak bola wanita di Inggris. (Culvin et al., 2022)

Ini yang menjadi pendorong dibentuknya *Women Football Association* pada tahun 1969 yang diinisiasi oleh 44 klub sepak bola wanita. Arthur Hobbs menjadi ‘bapak sepak bola wanita’ di Inggris dikarenakan perannya yang sangat signifikan dalam pengembangannya. Beliau berjasa dalam membentuk 7 Liga Regional di wilayah Inggris yang menjadi pondasi dari kesuksesan sepak bola wanita saat ini. Langkah tersebut mendapatkan dukungan penuh dari berbagai klub sepak bola di wilayah Inggris dengan mulai menginisiasi pembentukan sektor profesional sepak bola wanita. Bahkan, Arthur Hobbs mampu menarik minat masyarakat dan klub yang berada di Chekoslavia untuk mulai mengikuti Liga Regional sebagai turnamen sepak bola wanita berskala profesional setelah pencabutan aksi pelarangan gelaran sepak bola wanita profesional di Inggris. Sayangnya, Arthur Hobbs harus mengundurkan diri pada tahun 1972 dikarenakan kondisi kesehatan yang memburuk dan meninggal pada tahun 1975. Gelaran ‘*Deal Tournament*’ menjadi prestasi terbesar dari Arthur Hobbs.

Tabel 1.1 Data Women's Ranking – FIFA 2019

RK	Team	Total Points	Previous Points	+/-
1.	USAUSA	2087.48	2111.47	-23.99
2.	SwedenSWE	2066.3	2050.18	16.12
3.	GermanyGER	2064.75	2059.75	5.00

Sumber: <https://www.fifa.com>

Kursi panas dari WFA England tersebut dilanjutkan oleh Patricia Gregory yang secara resmi meneruskan posisi Arthur Hobbs. Kesuksesan Patricia Gregory dikenal atas pelaksanaan gelaran *FA Women's Cup* sebagai turnamen berskala nasional pertama yang dilakukan oleh sektor sepak bola wanita Inggris. Selain itu, kemampuan Patricia Gregory dalam mencari staf profesional dalam menangani WFA England juga sangat diapresiasi. David Marlowe sebagai salah satu staf *Public Relations* dibawah naungan Patricia Gregory menjadikan gelaran sepak bola wanita di Inggris mampu dicatat sejarah dan mendapatkan perhatian besar di Inggris. Patricia Gregory juga mampu mendapatkan investor utama bernama Arthur McMullen yang menjadi penjamin stabilitas sepak bola wanita di Inggris. Selain itu, Patricia Gregory juga mengundang Florence Bilton untuk menjadi staf khusus keuangan yang mencetuskan sistem ‘*Promotions, Membership, and Development*’ yang menjadikan fokus strategi pengembangan sepak bola wanita di Inggris. Sistem tersebut mampu membiayai gelaran turnamen, bahkan mampu menutupi kerugian apabila WFA England tidak mampu menutupi biaya gelaran sepak bola wanita di Inggris. Patricia Gregory resmi mengundurkan diri dari posisi *Chairman* dari WFA England pada tahun 1982, namun tetap menjadi staf kehormatan dari EFA England sampai pada tahun 1993 sebagai pembubaran organisasi WFA England.

Akan tetapi, WFA England harus mengalami pembubaran dan dileburkan fungsinya dengan FA England atas terjadinya perebutan kekuasaan yang mengganggu stabilitas sepak bola wanita di Inggris. Perebutan kekuasaan tersebut harus terjadi dikarenakan adanya kekurangan sumber daya yang menyebabkan terhambatnya perkembangan sepak bola wanita

Inggris. Meskipun begitu, WFA England tetap berupaya mendukung gelaran turnamen professional sepak bola wanita di Inggris dengan kerjasamanya bersama FA England dalam membentuk *County Football Association*. Ini menjadi sarana desentralisasi yang membuat dampak dari perebutan kekuasaan di dalam WFA England dapat berkurang. Dibentuknya asosiasi tersebut diharapkan mampu menjadi kesempatan baru bagi klub-klub sepak bola wanita di Inggris untuk lebih berkembang. Langkah ini terbukti berhasil dikarenakan kesuksesan pembentukan divisi turnamen sepak bola wanita professional tingkat nasional dengan diikuti oleh 24 klub sepak bola dengan nama '*National League*' pada tahun 1991.

Perebutan kekuasaan tersebut semakin memburuk dan memaksa FA England ikut turun tangan demi perkembangan sepak bola wanita Inggris atas potensi besar yang masih dapat dieksplorasi tersebut. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembubaran WFA England pada tahun 1993. Ini dilakukan atas keputusan bahwa citra WFA England di Inggris secara keseluruhan sudah terlalu buruk dan digantikan dengan pembentukan *Women Football Committee* dibawah naungan FA England. Langkah selanjutnya adalah upaya re-branding dari turnamen nasional yang telah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Pendataan menjadi langkah FA England dalam menentukan format turnamen yang sesuai. Tercatat sebanyak 137 klub professional sepak bola wanita telah terdata dan menjadi landasan FA melakukan rebranding dengan membentuk *FA Women's Premier League* pada tahun 1994. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan oleh FA England untuk mendukung kapitalisasi dari sepak bola wanita Inggris untuk mendukung perkembangan sektor olahraga tersebut.

Langkah FA England dinilai cukup berhasil dan disetarakan dengan keberhasilan dari Arthur Hobbs dalam mengelola sektor olahraga sepak bola wanita di Inggris. Setelah keberhasilan rebranding tersebut, FA England berupaya untuk mengubah citra sepak bola wanita Inggris untuk mendukung perkembangannya dan menarik minat berbagai pihak. Pada tahun 1997, FA England membentuk rencana jangka panjang untuk mendukung perkembangan keseluruhan klub sepak bola wanita dalam berbagai standar. Selanjutnya, pada tahun 1998, FA England membentuk 20 Centre of Excellence. Pembentukan Center of Excellence ini menjadi fokus pemain sepak bola wanita di Inggris atas potensi dan pengakuan dalam strategi jangka panjang FA England sebagai *spokeperson* dari FA England dalam sektor olahraga sepak bola wanita Inggris (Brown, 2017). Dampaknya adalah sponsor didapatkan terhadap ajang gelaran *FA Women's Cup* dan *FA Women's Premier League*. Dalam hal ini, FA England juga menerapkan strategi *Gameplan of Growth* setiap tiga tahun sekali dan puncak keberhasilannya terjadi pada tahun 2020. Strategi tersebut berhasil meningkatkan partisipasi wanita dalam sepak bola sebesar 3,4 juta pemain sepak bola wanita telah berpartisipasi dan peningkatan fans dari klub sepak bola WSL maupun tim nasional sepak bola wanita Inggris. Rencana ini tidak lepas dari desakan UN Women pada FIFA untuk menjunjung tinggi kesetaraan gender pada bidang olahraga sepak bola, khususnya sepak bola wanita di Inggris.

b. Permasalahan yang Dihadapi Pemain Sepak Bola Wanita Inggris

Sepak bola wanita memang memiliki potensi yang luar biasa, namun masih banyak permasalahan yang harus dialami para pemain sepak bola wanita di Inggris. Seperti yang telah diketahui bahwa sepak bola wanita merupakan olahraga dengan tingkat perkembangan paling cepat di dunia. Ini dibuktikan dari pelaksanaan FIFA Women's World Cup pada tahun 2019 yang mencatatkan rekor penonton sebesar 1,7 milyar penonton dari segala platform. Jumlah tersebut menjadi bukti bahwa potensi olahraga sepak bola wanita termasuk dalam olahraga

dengan potensi komersial paling besar di dunia. Hanya saja, potensi tersebut tidak diimbangi dengan perlakuan-perlakuan dari berbagai pihak di lingkungan sepak bola. Perlakuan ini menjadikan olahraga sepak bola wanita masih perlu untuk *survive* sebelum mampu merealisasikan potensinya.

Dalam kasus sepak bola wanita di Inggris, FA England selaku federasi sepak bola resmi di Inggris pernah melarang pelaksanaan pertandingan sepak bola professional wanita selama 50 tahun sampai dengan 1971. Hal ini cukup memilukan mengingat tim nasional sepak bola wanita Inggris saat ini menduduki peringkat ke-8, bahkan pernah mencapai peringkat ke-3. Tindakan pelarangan pertandingan sepak bola pada tahun 1921 tersebut tidak terlepas dari popularitas sepak bola wanita yang menyamai sepak bola pria di Inggris. Ini membuat FA selaku asosiasi sepak bola Inggris merasa terancam diakibatkan jumlah investasi yang dikeluarkan kepada sepak bola pria jauh lebih besar bila dibandingkan dengan sepak bola wanita.

Tindakan pelarangan pertandingan professional sepak bola wanita tersebut diiringi dengan berbagai pelarangan staf resmi dan klub sepak bola untuk protes terhadap FA England. Hal ini jelas menghilangkan potensi komersial sepak bola wanita di Inggris yang saat itu menjadi satu-satunya hiburan akibat adanya perang dunia II. Di sisi lain, tindakan memalukan FA England tersebut membuka kesempatan baru bagi Amerika Serikat. Hal ini dapat terjadi karena Amerika Serikat dan Kanada mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan adanya pertandingan sepak bola wanita di negara tersebut. Banyak pihak menyatakan bahwa langkah Amerika Serikat dan Kanada dinilai cemerlang dalam merekrut pasar potensial sepak bola wanita. Ini dibuktikan dengan mayoritas penonton sepak bola wanita di Amerika Serikat pada tahun tersebut mencapai angka maksimal 10.000 penonton, sekaligus mendirikan pondasi bagi hegemoni sepak bola wanita Amerika Serikat di dunia internasional.

Dampak dari pelarangan pertandingan professional sepak bola wanita di Inggris tersebut masih terasa hingga saat ini. Sepak bola wanita di Inggris telah mengakhiri masa kelamnya di tahun 1971, namun dampak kebijakan tak bertanggung jawab FA England tersebut membuat olahraga sepak bola wanita di Inggris sulit untuk bangkit. Ini dikarenakan adanya kewajiban penggabungan asosiasi sepak bola di Inggris dengan FA England atas dasar putusan dari UEFA selaku induk organisasi sepak bola wanita di Eropa. Kebijakan ini terpaksa diterima oleh para pemain sepak bola wanita sekaligus klubnya dikarenakan tidak ada jalan lain untuk mendapatkan pengakuan resmi dari UEFA dan FIFA. Dampaknya adalah FA England memanfaatkan kewenangannya untuk membatasi perkembangan sepak bola wanita dengan hanya memberikan koneksi semata dan tidak memberikan bantuan biaya sama sekali sampai saat ini.

Meskipun perhatian internasional terhadap sepak bola wanita di Inggris semakin berkembang, akan tetapi ini tidak sejalan dengan perlakuan yang diberikan. Ketidaksetaraan gender telah jelas terlihat dalam kasus ini. Meskipun FIFA telah mengklaim bahwa terdapat 30 juta pemain sepak bola wanita di seluruh dunia dan lebih dari 1 juta pemain sepak bola wanita di Inggris di berbagai kelas kompetisi. Sebanyak 89% diantaranya memutuskan untuk pensiun dini dan mencari potensi karir olahraga lainnya. Ini tidak lepas dari perlakuan berbagai pihak yang ada, termasuk fans, klub sepak bola, dan asosiasi sepak bola.

Masalah pertama adalah prasangka sejarah yang menodai sepak bola wanita di Inggris. Seperti yang telah diketahui bahwa Inggris merupakan negara yang kental dengan sejarahnya,

terutama sepak bola. Sejarah tersebut dapat menjadi nilai lebih bagi suatu tim untuk melangkah maju dalam menembus berbagai aspek, seperti ekonomi, budaya, dan sosial. Pelarangan pertandingan pada tahun 1921 hingga tahun 1971 tersebut menodai sejarah sepak bola Inggris. Hal tersebut membuat posisi sepak bola wanita di Inggris kurang mampu dimaksimalkan potensinya, seperti mencari dukungan penggemar atau dukungan sponsor. Maka dari itu, para pemain sepak bola wanita di Inggris berusaha lebih keras untuk menarik minat penggemar dan sponsor dengan membuat sejarah baru, seperti *Women's World Cup* di tahun 2019 dengan capaian semi-finalisnya.

Selanjutnya adalah permasalahan gaji yang sampai saat ini dinilai kurang sesuai dengan status sepak bola wanita di Inggris. Meskipun telah berhasil meningkatkan *exposure* dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, pemain sepak bola wanita di Inggris masih harus dihadapi dengan gaji yang rendah. Dalam kurun waktu sebelum tahun 2019, pemain sepak bola wanita di Inggris hanya mampu mendapat gaji yang kurang cukup untuk kebutuhannya (Humphreys, 2021). Berdasarkan dari data, biaya hidup di Inggris dengan minimal nominal sebesar 2000 Euro yang dapat diartikan bahwa mayoritas pemain sepak bola diberi upah dibawah itu. Ini kemudian diperparah dengan perawatan atlet sepak bola yang memakan biaya tidak murah. Maka dari itu, gaji menjadi permasalahan paling penting dalam dunia sepak bola wanita. Ini dikarenakan mayoritas pemain sepak bola pria di Inggris pada turnamen tingkat dua '*Skybet League One*' mendapat gaji diatas 20.000 Euro per-minggu. Sedangkan, pemain sepak bola wanita di kasta tertinggi FA Women Super League pada klub klasemen menengah kebawah masih harus bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhannya.

Perlakuan tidak menyenangkan yang dialami wanita ini juga diberlakukan oleh para pihak-pihak yang berada di lingkungan sepak bola pula. Kata-kata bernada *sexism* sekaligus pelecehan verbal sering dilontarkan oleh fans, bahkan komentator 'pundit' sepak bola. Sebagai contoh adalah kasus pemenang *Women Ballon d'Or* yang menjadi simbol pemain terbaik dunia yaitu Ada Hegerberg dari Amerika Serikat mendapatkan pelecehan verbal dari DJ dari Prancis yang bernama Martin Solveig (Aarons, 2018). Insiden memalukan yang menghancurkan kesakralan momen gelaran tersebut seakan menjadi bukti bahwa diskriminasi gender masih tetap ada. Survei yang dilakukan di Inggris menyatakan bahwa 34% pemain sepak bola wanita pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan atas gendernya. Akan tetapi, 66% dari pemain tersebut mendapatkan dukungan penuh dari tim sepak bolanya dalam melawan hal tersebut. Meskipun begitu, ini menjadi bukti bahwa masih banyak klub sepak bola wanita yang enggan membela pemainnya sebagai bentuk dari diskriminasi gender.

Atas dasar hal tersebut, para pemain sepak bola wanita di Inggris berupaya menggalang suara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap diskriminasi gender. pemain sepak bola wanita bersatu mengikuti gerakan *Equal Pay* yang diinisiasi oleh tim nasional sepak bola wanita Amerika Serikat atas dasar hal yang sama. Hal yang dituntut adalah status gaji yang setara dengan pemain sepak bola pria dan pemenuhan fasilitas profesional sepak bola yang lengkap sesuai dengan standar sepak bola professional.

c. Gerakan Feminis *Equal Pay*

Gerakan *Equal Pay* menjadi jawaban dari adanya diskriminasi gender terhadap sektor olahraga sepak bola wanita. Gerakan ini diinisiasi oleh pemain tim nasional sepak bola wanita di Amerika Serikat yang merasa tidak mendapatkan keadilan atas kemenangan yang didapatnya. Seperti yang telah diketahui bahwa tujuan utama dari permainan sepak bola adalah

meraih kemenangan dan akan jauh lebih istimewa apabila menjuarai suatu kompetisi. Sementara itu, pemain tim nasional sepak bola wanita Amerika Serikat selalu mendapatkan peringkat ke-1 dan sering menjuarai FIFA *Women's World Cup*. Prestasi ini tidak diiringi dengan besaran upah dan bonus yang memicu terjadinya perselisihan. Pemain timnas sepak bola wanita Amerika Serikat berargumen bahwa upah dan bonus yang didapat tidak sebanding dengan prestasi yang telah diraih. Mereka membandingkan dengan upah yang didapat oleh pemain tim nasional sepak bola pria.

Faktanya gaji yang didapat tim nasional sepak bola wanita tersebut mencerminkan perlakuan yang didapat dari sektor olahraga sepak bola wanita, termasuk Inggris. Seperti yang telah diketahui bahwa tim nasional sepak bola Inggris telah meraih prestasi yang menjanjikan. Pada tahun 2019, tim nasional sepak bola wanita berhasil meraih hasil positif dengan menjadi semi finalis FIFA *Women's World Cup* dan harus tersingkir karena melawan tim nasional sepak bola Amerika Serikat. Hal ini berbanding terbalik dengan gaji dan perlakuan yang didapatkan dikarenakan mayoritas gaji pemain sepak bola wanita di turnamen nasional hanya setara dengan gaji pemain pria di turnamen kelas regional. Seperti survey yang telah dilakukan dengan hasil 88% pemain sepak bola wanita Inggris di FAWSL hanya mendapatkan gaji mingguan kurang dari 18.000 Euro (Solicitors, 2019). Ini jelas berbeda dengan standar gaji pada '*Skybet League One*' Inggris yang mendapatkan gaji minimal 30.000 sampai 50.000 Euro tergantung pada skala klub sepak bola wanita. Perlu digaris bawahi bahwa FAWSL merupakan turnamen divisi tertinggi sepak bola wanita dengan jumlah penonton dan sponsor yang lebih masif dibandingkan dengan *Skybet League One* sebagai turnamen divisi kedua sepak bola pria di Inggris.

Di sisi lain, pemain sepak bola wanita di Inggris merasa bahwa gaji dan fasilitas menjadi hal terpenting dalam aksi Equal Pay. Berbeda dengan tim nasional sepak bola wanita Amerika Serikat yang berfokus pada upah yang didapat, pemain sepak bola Inggris merasa bahwa fasilitas dan perlakuan berbagai pihak menjadi hal yang paling penting. Seperti yang telah diketahui bahwa berbagai insiden pelecehan verbal yang dilakukan oleh fans maupun pihak ofisial beberapa kali terjadi di sektor olahraga sepak bola wanita. Ini sesuai dengan ucapan pelatih dari tim sepak bola wanita *Manchester United Women*, Casey Stone yang menganggap bahwa kesetaraan gaji masih harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi FAWSL (SkySport, 2020). Beliau menganggap bahwa kesetaraan gaji yang didapat lebih kepada status gaji yang menjadi pertimbangan dan didukung dengan perlakuan profesional dari berbagai pihak. Ini terjadi karena keuntungan yang didapat dari FAWSL masih belum sebanding dengan pemasukan yang didapat dari EPL yang menjadi liga sepak bola dengan tingkat komersialitas paling besar. Tujuan utama dari EqualPay bagi para pemain sepak bola wanita seharusnya lebih berfokus pada peningkatan rata-rata gaji pemain sepak bola wanita untuk mengurangi potensi pension dini.

d. Peran UN Women dalam Gerakan Equal Pay di Inggris

Gaji yang didapatkan oleh pemain sepak bola wanita ini menjadi salah satu fokus permasalahan yang ditangani oleh UN Women. Sebagai contoh adalah adanya perbedaan status gaji yang didapatkan pemain sepak bola pria dengan rata-rata gaji sebesar 82 juta US Dollar yang setara dengan keseluruhan gaji dari pemain sepak bola wanita di 7 turnamen sepak bola wanita dengan skala terbaik (UN Women, 2019). Jumlah ini dilatar belakangi oleh kurangnya fokus FIFA terhadap perkembangan sepak bola wanita yang menjadikan

terhambatnya perkembangan sektor olahraga tersebut. Maka dari itu, UN Women mendesak FIFA untuk menjunjung tinggi kesetaraan gender dalam sektor olahraga sepak bola dengan memberikan perhatian seimbang tanpa mempertimbangkan gender.

Desakan tersebut tidak lepas dari rencana jangka panjang UN Women melalui kampanye '*Planet 50-50 by 2030. Step it up for Gender Equality*'. Aspek utama dari strategi tersebut adalah mengubah kondisi patriarki dan diskriminasi pada olahraga, termasuk aspek hukum, peraturan, dan struktur institusi. Ini ditujukan untuk meningkatkan suara perempuan dan perannya sebagai pemimpin dari perubahan. Di sisi lain, kampanye tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan peran gender, termasuk pria dan wanita yang harus mengalami diskriminasi melalui gerakan HeForShe. Selain itu, UN Women juga berusaha untuk menghilangkan kekerasan fisik dan verbal yang harus dialami semua gender. Dengan menggandeng media sebagai aspek penting dalam meningkatkan peran perempuan, olahraga menjadi salah satu target yang menjadi sasaran utama dari UN Women.

Maka dari itu, desakan yang dilancarkan oleh UN Women mendapatkan respon positif dari FIFA dengan berkomitmen dalam membangun kesetaraan gender. Melalui kampanye '*FIFA Forward Programme*' yang memberikan dukungan finansial terhadap berbagai negara dan menyerukan kesetaraan terhadap peran wanita di sepak bola. Dapat dikatakan bahwa kampanye tersebut sebagai strategi reformasi FIFA dalam membentuk situasi dan kondisi sektor olahraga sepak bola menjadi lebih baik. Dalam hal ini, FIFA menggandeng UN Women dalam melaksanakan kampanye tersebut dengan menekankan bahwa sepak bola menjadi olahraga inklusif yang dapat diakses dan diikuti oleh semua orang tanpa memandang gender. Reformasi FIFA ini tentu saja akan berlangsung dalam skala waktu yang panjang dan memakan biaya yang tidak sedikit. Perubahan ini juga akan diiringi dengan perubahan dinamika manajemen FIFA yang harus disesuaikan untuk menjunjung tinggi kesetaraan gender. Cara yang dilakukan salah satunya adalah dengan penambahan kuota Dewan FIFA sejumlah 6 orang wanita dari berbagai status sebagai langkah awal penerapan reformasi kesetaraan gender. Dalam hal ini, UN Women juga menjamin peningkatan sponsor terhadap sektor olahraga sepak bola wanita, termasuk di Inggris. Peningkatan ini diharapkan membuat FIFA serius dalam melakukan perubahan dan pengorganisasian untuk menjamin kesetaraan gender.

e. Dampak dari Kerjasama UN Women dengan FIFA

Kebijakan dari FIFA tersebut menjadikan adanya seruan untuk mendukung kesetaraan gender menyebabkan FA England memutuskan untuk melaksanakannya. FA England sebagai asosiasi sepak bola Inggris menjadi satu dari beberapa negara yang menyetujui adanya kebijakan *Equal Pay* sebagai bentuk upaya mendukung kesetaraan gender. Meskipun begitu, upaya FA England hanya sebatas pada penampilan tim nasional sepak bola Inggris yang mengharuskan adanya penyetaraan gaji bagi pria dan wanita (Reuters, 2020). Ini disebabkan oleh jarak komersial yang begitu besar antara EPL sebagai turnamen sepak bola pria dengan FAWSL sebagai turnamen sepak bola wanita. Jarak ini menjadi dasar bahwa sangatlah tidak realistis menurut FA England bagi sebuah klub sepak bola wanita membayar gaji yang setara dengan pemain sepak bola pria.

Sebagai contoh adalah gaji Cristiano Ronaldo pada tim sepak bola pria *Manchester United* yang menyentuh angka 70 juta US Dollar, ini jauh berbeda dengan gaji pemain sepak bola wanita Sam Kerr dari klub Chelsea yang mendapatkan gaji sebesar 450.000 US Dollar dalam satu musim (Humphreys, 2021). Menurut FA England, sangatlah tidak mungkin bagi

Chelsea untuk membayar gaji Sam Kerr setara dengan Cristiano Ronaldo dikarenakan Chelsea tidak mendapatkan tingkat komersial setara dengan Ronaldo.

Perbedaan gaji tersebut membuat FA England mengubah haluannya dalam mendukung kesetaraan gender. Hal yang paling masuk akal untuk menjadi seimbang adalah bonus dari setiap pertandingan, seperti bonus goal, bonus assist, dan bonus clean sheet. Melalui penyetaraan bonus tersebut, FA England berharap untuk meningkatkan semangat bagi pemain sepak bola wanita di Inggris. Seperti yang telah diketahui bahwa olahraga sepak bola di Inggris sangatlah menarik dikarenakan tingkat intensitas yang tinggi bila dibandingkan dengan liga sepak bola di negara lain. Maka dari itu, FA England berharap bahwa dengan penyetaraan bonus yang didapat akan meningkatkan intensitas pertandingan yang berdampak pada peningkatan perhatian bagi sektor olahraga sepak bola wanita.

Sesuai dengan komentar Casey Stone sebagai pelatih klub sepak bola *Manchester United Women*, Tim Schumacher sebagai manajer dari tim sepak bola wanita *Vfl Wolfsburg* menyatakan bahwa *Equal Pay* antara pemain sepak bola wanita dan pria di tingkat klub saat ini masih tidak dapat dilaksanakan diakibatkan adanya perbedaan pendapatan yang didapatkan (Langer, 2021). Hal ini yang menyebabkan FA England hanya mampu untuk meningkatkan upah di tim nasional sepak bola wanita, serta peningkatan bonus semata. Ini dikarenakan adanya perbedaan tingkatan komersial dari masing-masing klub dan turnamen sepak bola wanita di Inggris.

Maka dari itu, FA England berencana untuk menggandeng FIFA dan UN Women untuk menarik minat sponsor terhadap sepak bola wanita di FAWSL. Dengan peningkatan tingkat komersial tersebut, penyetaraan upah akan menjadi semakin masuk akal. Salah satunya adalah peningkatan frekuensi sponsor untuk meningkatkan kesadaran terhadap FAWSL yang sedang berlangsung. Dampaknya adalah FAWSL berhasil mencetak rekor baru dengan tingkatan penonton tertinggi pada tahun 2021 dengan jumlah akumulasi sebesar 1,1 juta penonton (Pentland, 2021). Peningkatan jumlah penonton yang signifikan ini berhasil menjadi bukti bahwa langkah FA England untuk meningkatkan tingkat komersialitas FAWSL tergolong berhasil. Hanya saja, untuk mendapatkan tingkat sponsor yang setara dengan EPL harus membutuhkan jangka waktu yang panjang dan strategi yang cemerlang.

Di sisi lain, FA England juga menyebarkan *awareness* terhadap kesetaraan gender melalui berbagai gerakan, termasuk pelaksanaan '*Centre of Excellence*' yang menjadi fokus dari '*Growth Plan*'. Sebagai bukti adalah keberhasilan FA England dalam menarik minat 3,4 juta pemain sepak bola wanita tingkat amatir dan profesional atas peningkatan sponsor dan kerjasama yang didapatkan. Selain itu, FA England juga mengharuskan bagi setiap klub sepak bola wanita untuk mendukung strategi tersebut dengan mempersiapkan standar fasilitas olahraga profesional sesuai aturan FIFA. Hal ini menjadi fokus sementara bagi FA England dalam mendukung kesetaraan gender dikarenakan kesetaraan upah antar pemain sepak bola wanita dan pria masih belum memungkinkan. FA England melalui komite sepak bola wanita juga berusaha untuk mengurangi pelecehan verbal dan fisik yang dialami oleh pemain sepak bola wanita. Hal yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kerjasama dengan klub dan asosiasi fans dari klub tersebut untuk mendukung para pemain sepak bola wanita yang mendapatkan pelecehan untuk berani dalam melawan.

Kesimpulan

Inggris menjadi negara istimewa bagi penikmat olahraga sepak bola dikarenakan budaya dan sejarah negaranya yang menarik. Meskipun begitu, FA England sebagai asosiasi sepak bola Inggris pernah menodai budaya tersebut dengan memaksa pelarangan pertandingan sepak bola wanita profesional yang berdampak pada terhambatnya perkembangan sektor olahraga tersebut. Hal ini terjadi lantaran adanya peningkatan perhatian olahraga sepak bola wanita yang menyamai sektor olahraga sepak bola pria. FA England merasa bahwa hegemoni sepak bola pria terancam dan harus mengalami kerugian yang menyebabkan pelarangan tersebut terjadi pada tahun 1921 sampai dengan 1971. Pelarangan tersebut resmi berakhir atas peningkatan penikmat sepak bola di Inggris pada tahun 1966 dan disusul desakan UEFA untuk mencabut pelarangan tersebut. Meskipun begitu, pelarangan tersebut telah menodai sejarah dari sepak bola wanita di Inggris yang berdampak pada terhambatnya potensi olahraga tersebut.

Namun, seiring berjalannya waktu, sektor olahraga sepak bola wanita mengalami peningkatan perhatian yang begitu pesat, terutama di Inggris. Akan tetapi, hal ini tidak diiringi dengan perlakuan baik yang didapatkan pemain sepak bola di Inggris, seperti upah kecil dan fasilitas olahraga yang tidak memadai. Maka dari itu, UN Women sebagai organisasi perwakilan kesetaraan gender menganggap bahwa fenomena ini harus segera dihapuskan. Dengan menggandeng FIFA, UN Women berusaha untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesetaraan gender di olahraga sepak bola. Hal ini direspon positif dengan pengadaan kampanye *'FIFA Forward Programme'* yang menekankan pada kesetaraan gender, termasuk gaji. FA England sebagai asosiasi sepak bola Inggris menghormati keputusan FIFA, namun karena kurangnya sponsor dan belum maksimalnya tingkat komersial dari FAWSL membuat FA England menghadapi kesulitan. FA England hanya mampu memberikan upah setara di timnas dan bonus setara di klub sepak bola wanita. Hal ini menjadikan UN Women berupaya untuk memberi bantuan dengan meningkatkan promosi dan kesadaran terhadap FAWSL yang secara resmi memecahkan rekor penonton tertinggi pada awal tahun 2021 kemarin.

Bibliografi

- Aarons, E. (2018, December 4). *Ada Hegerberg: first women's Ballon d'Or marred as winner is asked to twerk | Ballon d'Or | The Guardian*.
<https://www.theguardian.com/football/2018/dec/03/ballon-dor-ada-hegerberg-twerk-luka-modric>
- Alegi, P. C. (1999, July 26). *football | History, Rules, & Significant Players | Britannica*.
Britannica. <https://www.britannica.com/sports/football-soccer>
- Avaz, A. (2021, May 17). *Top 10 Most Popular Sports in the World in 2021 - TechnoSports*.
<https://technosports.co.in/2021/05/17/top-10-most-popular-sports-in-the-world-in-2021/>

- Bendi, D. (2020, February 5). *Female Football Fans in 2020 – What Makes Them Tick?* LinkedIn. <https://www.linkedin.com/pulse/female-football-fans-2020-what-makes-them-tick-dan-bedi->
- Brown, J. (2017, July 27). *Manchester universities selected as FA Women's High Performance Football Centre.* <https://www.manchester.ac.uk/discover/news/manchester-universities-selected-as-fa-womens-high-performance-football-centre/>
- Culvin, A., Bowes, A., Carrick, S., & Pope, S. (2022). The price of success: Equal Pay and the US Women's National Soccer Team. *Soccer & Society*, 23(8), 920–931. <https://doi.org/10.1080/14660970.2021.1977280>
- Galdas, P. M., Johnson, J. L., Percy, M. E., & Ratner, P. A. (2010). Help seeking for cardiac symptoms: Beyond the masculine–feminine binary. *Social Science & Medicine* (1982), 71(1), 18. <https://doi.org/10.1016/J.SOCSCIMED.2010.03.006>
- Greenberg, J. A. (1999). Defining Male and Female: Intersexuality and the Collision between Law and Biology. *Arizona Law Review*, 41(2), 265–328. <http://heinonline.org/HOL/License>
- Hess, A. J. (2019, June 8). *The 2019 Women's World Cup prize money is \$30 million.* CNBC. <https://www.cnbc.com/2019/06/07/the-2019-womens-world-cup-prize-money-is-30-million.html>
- Humphreys, J. P. (2021, October 8). *How much are women's footballers paid?* | FourFourTwo. FourFourTwo. <https://www.fourfourtwo.com/features/how-much-are-womens-footballers-paid>
- Kantolla, J. (2006). “Gender and the State: Theories and Debates.” *Palgrave*, 1–21.
- Langer, M. (2021, April 2). *Women's soccer: The dream of fair pay* | Sports | German football and major international sports news | DW | 02.04.2021. DW. <https://www.dw.com/en/womens-soccer-the-dream-of-fair-pay/a-57087378>
- Pentland, D. (2021, September 14). *Huge TV viewing figures revealed for FAWSL's opening weekend -FAWSL Full-Time.* FAWSL Full Time. <https://fawslfulltime.co.uk/2021/09/14/huge-tv-viewing-figures-revealed-for-fawsls-opening-weekend/>
- Reuters. (2020, September 10). *England's men's and women's teams receive equal pay, says FA* | Reuters. REUTERS. <https://www.reuters.com/article/us-soccer-england-pay-i>
- Sellers, R. (2019, July 5). *Women's football may be growing in popularity but the game is still fighting for survival.* The Conversation. <https://theconversation.com/womens->

football-may-be-growing-in-popularity-but-the-game-is-still-fighting-for-survival-119888

- SkySport. (2020, September 5). *Manchester United Women's boss Casey Stoney says women's game can't currently justify equal pay with men* | Football News | Sky Sports. SkySport. <https://www.skysports.com/football/news/28508/12063755/manchester-united-womens-boss-casey-stoney-says-womens-game-cant-currently-justify-equal-pay-with-men>
- Solicitors, B. S. (2019). *What Is The Gender Pay Gap In Sports?* BBS. <https://beestonshenton.co.uk/blog/gender-pay-gap-in-sports/>
- Sutejo, B. (2017, September 26). *Pengertian Studi Literatur* | PDF. Scribd. <https://www.scribd.com/document/440950287/Pengertian-Studi-Literatur>
- UN Women. (2019, June 24). *Women and girls in sport* | UN Women. <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-sport>
- Wrack, S. (2019, June 5). *Toni Duggan: 'I believe we should be better paid, but not the same as the men'* | Women's World Cup 2019 | The Guardian. The Guardian. <https://www.theguardian.com/football/2019/jun/05/toni-duggan-equality-football-england-barcelona-womens-world-cup>



DISKRIMINASI DAN KEKERASAN SEKSUAL DI DUNIA PENDIDIKAN TERHADAP KAUM PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF FEMINISME

Renaldi Afriansyah¹, Habibah Aura Kesuma², Reva Dwy Anggriany³

Email: 190564201022@student.umrah.ac.id,

190564201036@student.umrah.ac.id, dan revadwi738@gmail.com

Artikelinfo

Artikel history:

Diterima: 20 November
2022

Diterima dalam bentuk
revisi: 12 Desember 2022

Diterbitkan: 17 Desember
2022

Kata Kunci:

*Diskriminasi, Kekerasan
Seksual, Pendidikan,
Perempuan, Indonesia,
Feminisme*

Abstrak

Kasus kekerasan seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta diskriminatif lainnya masih sangat sering kita dengar di telinga kita. Saking banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di kehidupan kita, terkadang kita malah terkesan acuh dan kemudian membiarkannya begitu saja. Sehingga semakin lama diskriminasi yang ada di Indonesia ini sering sekali sudah seperti budaya yang harus dimaklumi. Fenomena ini bisa terjadi di mana saja, tidak terkecuali di lingkungan pendidikan. Pada tulisan ini, dalam perspektif feminisme liberal, penulis mencoba menganalisis tentang diskriminasi dan kekerasan seksual dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang sering dialami oleh kaum perempuan.

Corresponden author: Renaldi Afriansyah

Email: 190564201022@student.umrah.ac.id

Pendahuluan

Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang telah terjadi sejak lama dan sudah menjadi isu global yang bahkan telah diatur dalam instrumen hukum dan kebijakan internasional. Salah satu komitmen internasional dalam menangani tindak kekerasan seksual terhadap perempuan telah diatur dalam konvensi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat sebuah konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau lebih dikenal dengan *UN Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1981. Menindaklanjuti komitmen tersebut, terbentuk instrument hukum internasional yaitu *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* 1993 (Ningrum & Hijri, 2021).

Indonesia sebagai salah satu negara yang turut serta meratifikasi CEDAW, bersama dengan negara-negara lain yang juga menyepakati *Beijing Platform for Action* (BPfA). BPfA adalah kesepakatan dari negara-negara PBB dalam rangka melaksanakan konvensi CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms Discriminations Against Women*) pada tahun 1995 di Beijing. Dalam konferensi

dunia tentang perempuan yang dilaksanakan di Beijing tanggal 4 hingga 15 September 1995 ini, seluruh negara anggota PBB sepakat untuk mengadopsi BPfA menjadi resolusi dan merekomendasikan Majelis Umum dalam sesi kelima untuk mengesahkan BPfA.

BPfA menghasilkan 12 bidang kritis dan setiap 5 tahun harus dilaporkan perkembangannya oleh setiap negara. Berikut adalah 12 bidang kritis tersebut: 1) Perempuan dan kemiskinan; 2) Perempuan dalam pendidikan dan pelatihan; 3) Perempuan dan Kesehatan; 4) Kekerasan terhadap perempuan; 5) Perempuan dalam situasi konflik bersenjata; 6) Perempuan dalam ekonomi; 7) Perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan; 8) Perempuan dalam mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan; 9) HAM perempuan; 10) Perempuan dan media; 11) Perempuan dan lingkungan hidup; 12) Anak perempuan (Komnas Perempuan, 2019).

Pendidikan merupakan usaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat digunakan untuk menggali potensi diri yang akan menjadi bekal di masa depan. Melalui pendidikan kita bisa mengetahui dan membedakan mana hal yang dapat dianggap benar dan yang tidak benar. Memperoleh pendidikan adalah wajib bagi setiap manusia di dunia. Begitu juga hak yang lainnya, hak untuk berpendapat, hak untuk menentukan pilihan, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri kita bebas melakukan apa yang kita mau sesuai dengan keinginan kita selagi hal tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku dan tidak menyalahi Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada.

Namun, adanya HAM tidak serta-merta bisa melindungi hak-hak kita yang seharusnya bisa dilindungi. Masih kuatnya budaya diskriminasi serta kurang jelas dan tegasnya hukum yang ada di Indonesia, menjadikan hak-hak tersebut sulit untuk terpenuhi, terlebih lagi bagi kaum perempuan. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak yang seringkali menjadi subyek yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (Purwanti & Zalianti, 2018). Kaum perempuan sangat rawan yang namanya akan aksi kejahatan atau kekerasan seperti halnya pelecehan seksual. Perempuan-perempuan di dunia ini tanpa sadar maupun tidak sadar seringkali mengalami pelecehan seksual baik secara verbal maupun non-verbal.

Diskriminasi serta kekerasan terhadap kaum perempuan diseluruh dunia hingga saat ini masih sering terjadi. Catatan Tahunan (CATAHU) 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badan Peradilan Agama (BADILAG). Terkumpul sebanyak 338.496 kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.383 kasus, Lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Angka-angka ini menggambarkan terjadi peningkatan yang sangat signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari

...

226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52% yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020) (Komnas Perempuan, 2022).

Dalam hal ini, peran institut pendidikan sangat penting untuk menyadarkan dan meluruskan serta memberitahukan penyimpangan sosial atau tindakan asusila yang terjadi. Namun, tidak jarang pula ditemui malah orang-orang yang mengaku berpendidikan yang justru malah melakukan tindakan asusila tersebut. Mulai dari orang yang tidak dikenal oleh korban, bahkan orang terdekat sekalipun. Lingkungan pendidikan yang seharusnya ruang yang aman dan nyaman bagi para pelajar untuk menuntut ilmu menjadi tempat pelaku kekerasan seksual melakukan aksinya (Elindawati, 2021). Pelecehan seksual merupakan perilaku yang sifatnya lebih ke seksual atau sesuatu hal yang tidak diinginkan dan berakibatkan kerugian terhadap korban atau penerima pelecehan tersebut yang diprediksi merusak semua hal-hal baik yang korban inginkan kedepannya, menimbulkan trauma dan ketakutan yang menyebabkan sang korban bahwa dirinya bukan orang yang baik-baik lagi (Nurdiana, 2019). Seperti yang baru-baru ini terjadi yaitu, kasus perempuan yang bunuh diri di makam ayahnya sendiri, yang setelah di selidiki ternyata merupakan korban dari pelecehan seksual dan pemerkosaan oleh senior dan pacarnya sendiri yang merupakan anggota kepolisian. Masalahnya disini, hal tersebut baru diketahui setelah aksi bunuh diri perempuan tersebut viral di media sosial (Rinanda, 2022).

Selain itu terjadi pemerkosaan kepada 21 orang anak dibawah umur di pondok pesantren, beberapa orang justru telah hamil dan melahirkan, yang mana otak dari kejahatan atau pelakunya sendiri merupakan guru sekaligus pemilik pondok pesantren tersebut (Hakim, 2021). Orang yang seharusnya dapat mengayomi serta mengajarkan hal yang baik dan buruk malah justru melakukan perbuatan yang sangat tercela. Hal-hal tersebut bukan hanya sekali dua kali saja terjadi namun sudah seringkali terjadi dan terkadang hanya menjadi kasus yang harus dimaklumi. Padahal dalam kasus-kasus pelecehan seksual dan diskriminasi yang dihadapi perempuan, justru perempuanlah yang menjadi korban dan menjadi pihak yang paling dirugikan dari segi apapun.

Dalam penelitian yang dituliskan oleh Bunga Suci Shopiani, Wilodati, Udin Supriadi tahun 2021 yang berjudul *Fenomena Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual* ditemukan adanya *victim blaming* yang berbentuk korban disalahkan cara berpakaian, cara bergaul dan situasi korban dilecehkan selain itu kerap kali korban direndahkan dengan komentar buruk seperti “Da kamu mah cewek binal pantes juga dilecehkan”, terdapat faktor yang mempengaruhi *victim blaming* diantaranya kurangnya pendidikan seks dan kesetaraan gender, sikap dan identitas gender, pengaruh lingkungan dan asumsi patriarki. *Victim blaming* berdampak buruk terhadap korban terutama pada kesehatan mental korban pelecehan seksual.

Selain itu dalam penelitian yang dituliskan oleh Nikmatullah tahun 2020,

dengan judul *Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus*, hasil kajian menunjukkan adanya kebijakan Rektor tentang kekerasan seksual merupakan komitmen lembaga pendidikan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, jika komitmen tersebut tidak diikuti dengan birokrasi yang baik dan sumber daya manusia yang memadai, maka perjuangan untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan korban menjadi sulit. Apalagi adanya kepentingan politik para *stakeholder* untuk melindungi pelaku atas nama baik kampus.

Adapun beberapa jurnal yang dikumpulkan tersebut ditujukan agar penelitian yang dilakukan menjadi semakin kokoh, karena isi yang terdapat pada masing-masing jurnal dapat dijadikan acuan. Dari beberapa jurnal penelitian yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa tidak ada yang khusus membahas Diskriminasi Gender & Kekerasan Seksual Di Dunia Pendidikan dengan menggunakan teori feminis dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan tergolong masih baru dan belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu

Dari contoh kasus kekerasan seksual maupun diskriminasi terhadap kaum perempuan di lingkungan atau lembaga pendidikan yang terjadi di Indonesia. Para penyintas atau korban dari pelecehan seksual banyak yang tidak berani atau takut untuk berbicara atau *speak-up*, menceritakan ataupun melaporkan kejadian yang mereka alami. Kurangnya bukti, lemahnya penegakan hukum yang ada ataupun di kucilkan oleh lingkungan sosial, menjadi alasan mereka untuk tetap diam. Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba menganalisis mengenai diskriminasi dan kekerasan seksual dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang sering dialami oleh kaum perempuan. Kemudian solusi ataupun saran dari permasalahan maraknya tindak pelecehan seksual dan diskriminasi terhadap kaum perempuan di Indonesia.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif mencakup pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap dunia, yang mana berarti penelitian kualitatif mempelajari sesuatu secara alami, dengan berusaha memahami, ataupun menginterpretasikan fenomena dalam konteks makna yang dibawa oleh orang kedalam fenomena itu (Bakry, 2017). Penelitian kualitatif ini mencakup penelitian dan pengumpulan data-data, informasi, atau material pendukung lainnya secara empiris seperti studi kasus, pengalaman personal, sejarah, interaksional serta studi literatur seperti buku, jurnal, artikel ataupun dokumen-dokumen lainnya yang mendukung (Bakry, 2017).

Berdasarkan pernyataan diatas mengenai pendekatan penelitian kualitatif,

...

pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan atau menjelaskan secara terperinci mengenai analisis diskriminasi dan kekerasan seksual dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang sering dialami oleh kaum perempuan. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu berupa studi literatur seperti dari buku, jurnal, artikel atau dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berbasis internet. Selain melalui studi literatur, penulis juga menjadikan fenomena yang terjadi di masyarakat sebagai bagian dari teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

DISKRIMINASI DAN KETIDAKSETARAAN GENDER YANG DIALAMI PEREMPUAN

Istilah gender pertama kali diperkenalkan untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang terjadi seringkali mencampurkan antara ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dengan sebaliknya (gender) (Puspitawati, 2013). Perbedaan gender yang ada kemudian membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini telah melekat pada diri tiap manusia (antara peran laki-laki dan peran perempuan). Dari alasan tersebut kemudian timbulah gambaran-gambaran yang menganggap peran mana yang kira-kira pantas atau cocok untuk laki-laki dan untuk perempuan.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga segala akses kesempatan untuk berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam segala lapisan masyarakat di sepanjang zaman, dimana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Dari sinilah awal mula doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan (Apriani, 2008).

Perempuan sering kali menjadi korban dari tindak kejahatan, baik itu pelecehan seksual, KDRT, dan sebagainya. Hal ini merupakan fenomena sosial yang sudah berbaur dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali di dalam lingkungan pendidikan. Di lingkungan pendidikan sendiri, merupakan tempat dimana kita memperoleh hak pendidikan yang sama dengan tiap individu lainnya. Namun terkadang sering sekali tempat yang seharusnya dapat memberikan ilmu pengetahuan tersebut, yang harusnya menjadi tempat yang aman, nyaman dan menyenangkan malah justru menjadi tempat dimana berbagai tindak kejahatan terhadap perempuan yang telah disebutkan sebelumnya terjadi (Rahmasari, 2022).

Dalam hal ini, tindakan kekerasan atau pelecehan seksual yang biasanya terjadi terhadap kaum wanita memiliki jangkauan yang luas, mulai dari tindakan berupa ucapan atau ungkapan (secara *verbal*) maupun pelecehan seksual seperti serangan atau pemaksaan (secara *non-verbal*). Secara verbal misalnya seperti

catcalling, berkomentar tidak senonoh, bercanda atau bergurung dengan suatu hal yang berbau seksual, dan sebagainya. Sedangkan secara *non-verbal* seperti, moncolek atau meraba bagian tubuh sembarangan (tanpa izin), pemerkosaan, dan sebagainya.

PELECEHAN SEKSUAL YANG TERJADI DI INDONESIA

Indonesia merupakan salah satu negara yang darurat akan tindakan diskriminasi dan pelecehan seksual khususnya terhadap perempuan. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat kekerasan yang terjadi. Hampir setiap hari media-media *online* atau berita-berita di televisi memberikan informasi mengenai tindak kejahatan berupa kekerasan dan pelecehan seksual. Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tindak asusila, dan sebagainya. Anehnya, di Indonesia sendiri, kasus atau permasalahan seperti yang disebutkan diatas sering kali dibiarkan berlarut-larut oleh berbagai pihak terkhususnya para penegak hukum yang dinilai lamban dalam merespon kejadian yang ada.

Salah satu contohnya adalah kasus Baiq Nuril guru honorer di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencari keadilan terkait pelecehan seksual yang dialaminya, yang ternyata pelakunya sendiri merupakan Kepala Sekolah di tempatnya bekerja. Namun ternyata malah digugat balik oleh pelaku atas pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik, yang kemudian berakhir dengan terpidanya korban yakni Baiq Nuril sendiri (Persada, 2019). Kasus ini merupakan salah satu contoh yang menggambarkan bagaimana kondisi hukum yang ada di Indonesia, terutama hukum yang berkaitan dengan tindak pelecehan seksual.

Kemudian kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswi perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kasus ini bermula saat korban ingin melakukan bimbingan terkait tugas akhir, namun ternyata dosen yang menjadi pembimbingnya malah melakukan pelecehan terhadap korban. Disaat korban mengadu untuk meminta keadilan atas apa yang ia alami, beberapa pihak justru malah menertawakan dan mengatakan agar apa yang sudah terjadi di maklumi saja dan tidak perlu diperpanjang. Setelah kasus ini viral dan bicarakan di mana-mana, bar mulai diselidiki yang berakhir pada pencopotan atau penonaktifan jabatan dari yang pihak terkait (pelaku) (Redaksi, 2022)

Dari contoh kasus di atas, tujuan dari korban yang tidak lain adalah perempuan yaitu hanya ingin meminta keadilan terhadap apa yang mereka alami. Dalam hal ini korban meminta perlindungan dengan memperjuangkan hak-hak yang harusnya mereka dapatkan. Namun pada kenyataannya, banyak hambatan yang harus ditempuh demi mencapai tujuan keadilan tersebut. Malah terkadang keadilan yang justru tidak berpihak kepada korban. Korban yang justru disalahkan atas apa yang telah terjadi, padahal korban yang mengalami kerugian dari segi apapun.

Penegakan hukum serta HAM yang masih kurang tegas dan kurang jelas

...

menjadi salah satu mudah munculnya perbuatan yang tidak diinginkan. Khususnya terhadap kasus pelecehan seksual yang hingga saat ini masih belum ada peraturan yang mengatur dengan jelas. Untuk mengurangi segala bentuk diskriminasi, kekejaman serta kekerasan seksual yang terjadi terhadap kaum perempuan sangat diperlukannya payung hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap para korban dengan tegas dan jelas (Luh et al., 2021).

Jika hal ini dibiarkan secara terus menerus dan dianggap hal biasa yang harus dimaklumi, tentu saja kesejahteraan kaum perempuan di dunia tidak terkecuali di Indonesia akan menjadi sangat terancam. Perempuan akan menjadi pihak yang sangat dirugikan dari segi apapun. Karena dampak yang ditimbulkan juga tidak hanya menyebabkan kerugian fisik namun juga psikis korban. Dalam hal ini tentu sangat dibutuhkan sekali dukungan dari berbagai pihak baik itu pemerintah maupun dukungan dari orang-orang terdekat yang harus melindungi korban (Nurdiana, M. A. & R. A., 2019).

MEDIA SOSIAL SEBAGAI WADAH ATAU TEMPAT KORBAN BERCERITA

Media sosial biasanya memang diperuntukkan menjadi wadah atau tempat orang-orang mengekspresikan diri. Seiring berkembangnya zaman kepopuleran akan media sosial tidak bisa diragukan lagi. Orang-orang di dunia bisa melihat apa yang ingin mereka lihat dan yang ingin mereka tahu hanya dengan mengetik kata kunci pada fitur pencarian. Dalam waktu sekejap apa yang tidak mereka tahu dan yang ingin mereka tahu bisa diakses dan didapatkan dengan sangat mudah. Banyaknya media sosial yang ada hingga saat ini mempunyai kelebihan dan

Dalam hal kasus diskriminasi dan pelecehan seksual, para korban seringkali takut untuk berbicara karena seringkali ketika mereka bercerita malah mendapatkan *victim blaming* dari orang-orang yang mendengarkan dan mengetahui cerita yang diberikan korban. Padahal seperti yang kita ketahui berbicara mengenai kesulitan bukanlah suatu hal yang mudah bagi orang-orang yang memiliki traumatis. Kemudian ketika korban memperjuangkan keadilan di meja hijau prosesnya berjalan sangat lamban karena mungkin kurangnya bukti atau hal-hal yang mendukung lainnya (Elindawati, 2021).

Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan dan pelecehan seksual sering sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat dan tidak tegas dan jelasnya hukum yang ada di Indonesia menjadikan kasus seperti ini sering sekali terjadi. Kini media sosial dijadikan sebagai salah satu wadah atau tempat yang digunakan untuk menyampaikan atau menceritakan segala hal. Tidak terkecuali para korban-korban kekerasan dan pelecehan seksual yang ingin mencari keadilan, mereka berharap agar kasus yang mereka alami mendapat perhatian oleh para penegak hukum ataupun pemerintah, dan kemudian keadilan

yang harusnya mereka dapatkan bisa ditegakkan.

Keberhasilan media sosial yang menjadi wadah atau tempat yang memiliki jangkauan luas ke publik, tidak sedikit dari para korban kekerasan dan pelecehan seksual yang sekarang mulai berani untuk berbicara atau *speak-up* terkait kasus yang menimpa mereka. Meskipun harus menyiapkan mental yang kuat untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun media sosial seperti twitter, facebook, instagram, youtube, dan sebagainya. Menjadi wadah atau tempat yang menjadi tujuan akhir demi tercapainya keadilan yang ingin mereka dapatkan. Dalam hal ini mungkin bisa dikatakan bahwasanya hal-hal penting seperti kekerasan dan pelecehan seksual ini perlu viral terlebih dahulu baru kemudian diperhatikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Adiyanto, 2020).

Seperti beberapa kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang awalnya tidak diperhatikan, dan malah diaggap sebagai suatu hal yang harus dimaklumi. Misalnya kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswi perguruan tinggi negeri, yang mana pada kasus tersebut awalnya hanya ingin diselesaikan secara baik-baik. Namun karena tindakan dari pelaku dan orang-orang sekitar yang menyepelekan hal tersebut, korban mau tidak mau menjadi berani untuk mendapatkan keadilan atas hak-hak yang harusnya ia dapatkan. Setelah kasus tersebut dibawa ke ranah publik melalui media sosial yang kemudian viral dan dibicarakan di mana-mana, barulah kasus tersebut kemudian diselidiki dan diangkat ke muka publik. Pada akhirnya pelaku memperoleh hukuman atas apa yang ia lakukan.

KETERKAITAN STUDI KASUS DENGAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN

Teori Feminisme Liberal

Feminisme merupakan serupakan sebuah gerakan yang selalu digaungkan atau diserukan oleh kaum perempuan sebagai bentuk tuntutan atas kesetaraan peran dan kedudukannya dengan laki-laki didalam kehidupan sosial. Gerakan feminisme timbul dari pemikiran bahwa posisi perempuan dianggap kurang beruntung daripada laki-laki didalam realitas sosial, sehingga dengan tidak adanya hak-hak yang dimiliki perempuan baik itu dalam mendapatkan pendidikan, hak berpolitik, pekerjaan dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, menjadi pemicu dalam memperjuangkan semua hak tersebut melalui gerakan feminisme (Retnani, 2017).

Feminisme liberal merupakan pemikiran yang menekankan pada konsep liberal, dimana feminis liberal menganggap bahwasannya laki-laki dan perempuan diciptakan sama dan mempunyai kesempatan serta hak yang sama pula. Dalam feminisme liberal hak setiap individu harus diperhatikan. Dengan kata lain, feminis liberal berusaha menciptakan kehidupan yang adil, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Intinya, dalam penerapannya feminis liberal menginginkan terbebasnya kaum perempuan dari peranan gender yang opresif

...

(Retnani, 2017).

Feminis liberal mengusahakan untuk menyadarkan para perempuan yang mana dikatakan bahwasannya perempuan adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan perempuan dalam sektor domestik dikampanyekan atau disuarakan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat (Retnani, 2017). Berkembangnya budaya yang materialistis dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme liberal. Akar pada teori feminisme liberal berfokus pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Dengan kata lain, dalam feminisme liberal kaum perempuan menuntut untuk diberikan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Teori feminisme liberal dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu feminisme liberalis klasik dan feminisme liberalis egalitarian. Feminis liberal klasik lebih seperti mengharapkan perlindungan dari negara dalam hal kebebasan sipil, seperti hak kepemilikan, hak untuk memilih, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk berorganisasi, dan sebagainya. Sedangkan untuk feminis liberal egalitarian sendiri, menganggap bahwa negara seharusnya hanya berfokus pada keadilan ekonomi bukan kebebasan sipil (Apriani, 2013). Dalam hal kaitannya dengan tulisan ini, penulis berpendapat bahwa teori feminisme liberal klasik lebih tepat digunakan karena lebih sesuai dengan pandangan dan fenomena kasus yang akan dibahas.

Dalam fenomena kasus yang penulis angkat kaum perempuan saat ini sering mendapatkan diskriminasi serta adanya kekerasan dan pelecehan seksual di dunia pendidikan. Kaum perempuan yang menjadi korban diskriminasi dan pelecehan seksual di dunia pendidikan tidak mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah. Kaum perempuan yang menjadi korban seringkali tidak berani untuk mengungkapkan didepan umum karena takut akan efek samping yang akan diterima selanjutnya namun jika hal ini dilakukan secara terus menerus dan tidak ada tindakan tegas akan semakin banyak kaum perempuan yang akan menjadi korban diskriminasi dan pelecehan seksual (Luh et al., 2021).

Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender

Perbedaan jenis kelamin atau gender seringkali dinilai melahirkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan yang terjadi dapat tercermin dalam berbagai bentuk seperti misalnya asumsi negatif atau *stereotype* yang buruk, diskriminasi, serta kekerasan terhadap gender-gender tertentu. Adanya studi yang membahas dan mendalami gender secara khusus ditujukan untuk mengurangi ataupun menghilangkan ketidakadilan tersebut. Sesuatu hal bisa dikatakan adil jika masing-masing pihak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Dalam hal ini, keadilan terhadap gender yang berbeda merujuk pada aplikasi keadilan sosial dalam pemberian kesempatan yang sama

terhadap laki-laki maupun perempuan (Puspitawati, 2013).

Dengan kata lain, keadilan gender yang dimaksud yaitu antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam berbagai hal apapun itu, tidak boleh ada perbedaan yang tergantung dengan perbedaan gender. Artinya dalam hal ini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk merealisasikan hak-hak serta potensi yang dimiliki dalam segi apapun, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Salah satu upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keadilan gender yaitu menerima dan memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara wajar, wajar dalam artiannya disini tidak menganggap perbedaan sebagai sesuatu yang harus dipermasalahkan, karena penghormatan terhadap hal tersebut termasuk dalam keadilan gender (Hany, 2019).

Status yang sama atau setara antara laki-laki dan perempuan tersebut yang kemudian disebut dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender termasuk kedalam Hak Asasi Manusia (HAM). Hak untuk berpendapat, hak untuk bebas, hak untuk memilih, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama, dsb. Hak-hak tersebut bukan hanya diperuntukkan kepada kaum laki-laki saja, perempuan juga berhak memperoleh hak-hak tersebut tanpa terkecuali. Kesetaraan ini harus bersifat substantif atau dengan kata lain hakiki, maksudnya bukan hanya memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, tetapi juga perlu diberikannya dukungan agar dapat tercapai kesetaraan gender yang nyata. Dalam hal ini, keadilan dapat di ibaratkan sebagai sebuah cara sedangkan kesetaraan merupakan hasilnya.

Keadilan merupakan satu-satunya jalan agar tercapainya kesetaraan gender. Artinya tidak boleh lagi ada diskriminasi yang mengatasmakan gender. Tujuan dari adanya feminisme di dunia hanya untuk memperjuangkan hak dan keadilan yang dinilai berat sebelah hanya kepada kaum laki-laki. Padahal seharusnya hak-hak dan kesempatan yang didapat dari tiap individu haruslah sama. Untuk itulah dalam tulisan ini penulis menggunakan konsep keadilan dan kesetaraan gender karena dinilai cocok jika dikaitkan dengan studi kasus yang diteliti dan teori feminisme liberal yang berusaha memperjuangkan hak-hak individu yang menekankan pada konsep liberal. Jika keadilan di tegakkan dengan benar maka kesetaraan gender akan tercapai sesuai yang di inginkan.

Kesimpulan

Pada contoh kasus kekerasan seksual maupun diskriminasi terhadap kaum perempuan di lingkungan atau lembaga pendidikan yang terjadi di Indonesia. Para penyintas atau korban dari pelecehan seksual banyak yang tidak berani atau takut untuk berbicara atau *speak-up*, menceritakan ataupun melaporkan kejadian yang mereka alami. Kurangnya bukti, lemahnya penekan hukum yang ada ataupun di kucilkan oleh lingkungan sosial, menjadi alasan-alasan mereka untuk tetap diam.

...

Maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia, menjadi ancaman bagi kaum perempuan. Kaum perempuan tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan aktivitas takut akan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual berikutnya. Jika hal ini dibiarkan secara terus menerus dan dianggap hal biasa yang harus dimaklumi, tentu saja kesejahteraan kaum perempuan di dunia tidak terkecuali di Indonesia akan menjadi sangat terancam.

Perempuan akan menjadi pihak yang sangat dirugikan dari segi apapun. Karena dampak yang ditimbulkan juga tidak hanya menyebabkan kerugian fisik namun juga psikis korban. Dalam hal ini tentu sangat dibutuhkan sekali dukungan dari berbagai pihak baik itu pemerintah maupun dukungan dari orang-orang terdekat yang harus melindungi korban.

Feminis liberal mengusahakan untuk menyadarkan para perempuan yang mana dikatakan bahwasannya perempuan adalah golongan tertindas. Berkembangnya budaya yang materialistis dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme liberal. Akar pada teori feminisme liberal berfokus pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Teori feminis liberal menuntut kaum perempuan untuk berani melawan ketidaksetaraan gender. Kesetaraan gender akan didapatkan jika kaum perempuan memiliki keberanian untuk *speak-up* dan berani untuk menuntut keamanan kepada pemerintah.

Kesetaraan gender termasuk kedalam Hak Asasi Manusia (HAM). Hak untuk berpendapat, hak untuk bebas, hak untuk memilih, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama, dan sebagainya. Hak-hak tersebut bukan hanya diperuntukkan kepada kaum laki-laki saja, perempuan juga berhak memperoleh hak-hak tersebut tanpa terkecuali. Kesetaraan ini harus bersifat substantif atau dengan kata lain hakiki, maksudnya bukan hanya memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, tetapi juga perlu diberikannya dukungan agar dapat tercapai kesetaraan gender yang nyata. Dalam hal ini, keadilan dapat di ibaratkan sebagai sebuah cara sedangkan kesetaraan merupakan hasilnya.

SARAN

Diskriminasi, kekerasan dan pelecehan seksual merupakan hal yang sering sekali terjadi terhadap kaum perempuan. Untuk itu dalam hal ini sangat diperlukan solusi dan peran dari berbagai pihak atau kalangan untuk meminimalisir terjadinya tindakan tersebut. Baik dari pemerintah, masyarakat serta para perempuan-perempuan yang ada di dunia terkhususnya di Indonesia harus saling mengingatkan dan menghargai, karena pada dasarnya segala hal bisa di cegah atau di minimalisir asalkan tujuan dan sasarannya tepat.

Dalam hal ini, pemerintah harus lebih *aware* atau peduli terhadap

kesejahteraan masyarakat yang ada, terutama bagi kaum perempuan. Perlindungan prnuh serta hak-hak yang ada harus di berikan secara nyata. Untuk itu perlunya kebijakan atau hukum yang bisa melindungi hal tersebut. Kebijakan atau hukum yang dibuat harus benar-benar jelas dan di tegakkan dengan tegas. Sebagai negara hukum, hukum tersebut tentu tidak boleh berat sebelah. Keadilan yang ada harus benar-benar ditegakkan.

Kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat, memberikan kita kemudahan untuk mengakses informasi yang kita inginkan. Untuk itu, masyarakat haruslah bijak dalam menelaah informasi. Informasi yang telah kita dapatkan jangan langsung kita telan bulat-bulat. Kita harus mencari tahu kebenaran informasi tersebut dari kedua sisi. Dalam hal ini, ketika mendapatkan informasi mengenai diskriminasi, kekerasan dan tindakan pelecehan seksual. Kita sebagai penerima informasi harus benar-benar paham akan informasi yangg kita dapatkan. Jangan sampai kita justru malah melindungi pelaku dan semakin menyakiti korban dengan melakukan *victim blaming*, karena dari segi apapun pada kasus pelecehan seksual, pihak yang paling dirugikan adalah korban itu sendiri.

Selanjutnya kepada para perempuan-perempuan di dunia, terutama di Indonesia. Kita harus peduli terhadap diri kira sendiri. Kita harus tahu apa yang harus menjadi hak-hak dasar kita. Antara sesama perempuan juga harus saling mengingatkan dan melindungi. Karena diciptakan dengan perasaan yang lebih peka, biasanya perempuan lebih sensitif dan mudah empati. Untuk itu, jika mengalami diskriminasi, kekerasan atau pelecehan seksual jangan takut untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak yang kita punya. Begitupula jika mempunyai teman yang mengalami kasus serupa, kita harus saling melindungi dengan merangkul bukan justru malah menjauhi atau melakukan *victim blaming*.

Bibliografi

Pustaka yang berupa judul buku:

- Bakri, Umar Suryadi. (2019). Metode Penelitian Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Indonesia, B. W., & Corporation, F. (2019). Better Work Indonesia, “Pedoman Pencegahan Pelecehan Di Tempat Kerja 2019 ”, (Jakarta, International Finance Corporation, Australian AID, The United States Departmen of Labor, 2019) 1 70. 38, 70–99.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Adiyanto, Wiwid. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Akademis. Jurnal Ilmiah Pengabdih, 6(2), 78 - 83.
- Apriani, F. (2008). Berbagai Pandangan Mengenai Gender dan Feminisme. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 15(1). <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>

...

- Ishak, D. (2020). Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Prespektif Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(2), 136 - 144.
- Kartika, Yuni & Najemi, Andi. (2020). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Cattcalling) Dalam Prespektif Hukum Pidana. *Pampas : Journal of Criminal*, 1(2), 1 - 21.
- Mahfiana, Layyin. (2015). Perempuan Dan Diskriminasi (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan). *Jurnal Al-Adl*, 8(2), 110 - 122.
- Puspitawati, Herien. (2013). Konsep, Teori, Dan Analisis Gender. 1 -13.
- Retnani, S. Dana Panti. (2012). Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Indonesia. 95- 109.
- Shopiani, B. S., Wilodati, & Supriadi, U. (2021). Fenomena Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(2), 940 - 955.
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>
- Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 78–89. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484>
- Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(2), 181–193. <https://doi.org/10.46339/alwardah.xx.xxx>
- Ayu, N. A. (2022). Optimalisasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Gender Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 4(2), 126–140. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i2.86>
- Luh, N., Ratih, P., Dewi, S., Putri, S., & Purwani, M. E. (2021). Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Dunia Pendidikan. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(7), 1235–1248. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p14>
- Nadhira Diva Saraswati. (2022). Arah Pengaturan Hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penangana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 115–137. <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/2464>
- Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C. (2020). Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan *Patriarchal Social System As the Root of Sexual Violence Against Women*. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 121. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27455>
- Nurdiana, M. A. R. A. (2019). Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan

Penegakan Hukumnya Di Indonesia. *Literasi Hukum*, 3(1).

Purwanti, A., & Zaliani, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2).
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>

Ningrum, O. W., & Hijri, Yana. S. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas*, 1(2), 109–125.

Pustaka yang berupa skripsi:

Hany, Dinda Jayzah. (2019). Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan Gender Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual).

Pustaka yang berupa siaran pers:

Komnas Perempuan. (2022, March 8). *Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan.

Pustaka yang berupa artikel berita:

Hakim, I. A. (2021, Desember 12). Ternyata Ada 21 Santri yang Diperkosa, Ini Rencana Keji Herry Wirawan Setelah Hamili Semuanya. *telisikid*. Di akses pada: Agustus 21, 2022, dari: <https://telisikid.com/news/ternyata-ada-21-santri-yang-diperkosa-ini-rencana-keji-herry-wirawan-setelah-hamili-semuanya>

Rinanda, H. M. (2022, Januari 28). Menolak Lupa Kisah Pilu Novia Widyasari, Dihamili-Dipaksa Aborsi Bribda Randy. *detikJatim*. Di akses pada: Agustus 21, 2022, dari: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-5918141/menolak-lupa-kisah-pilu-novia-widyasari-dihamili-dipaksa-aborsi-bribda-randy>

Persada, S. (2019). Perjalanan {Kasus} {Baiq} {Nuril}: {Dari} {Pengadilan} {Sampai} {Amnesti}. In *Tempo*.

Redaksi. (2022, April 15). Kasus Pelecehan Seksual Universitas Riau: Terdakwa Divonis Bebas, Nadiem Makarim Temui Korban Untuk Proses Sanksi Administratif. *BBC NEWS Indonesia*. Di akses pada: Agustus 21, 2022, dari: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61111705>



FENOMENA *CHILDFREE* DI JEPANG DALAM PERSPEKTIF TEORI FEMINISME EKSISTENSIALIS

Mika Ela¹, Aisyah Savira², Nabila Utami Sandra Dewi³, Febi Triyanti⁴

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Email: mikaella281000@gmail.com¹, Asavira5@gmail.com², Nblausd15@gmail.com³,
febity62@gmail.com⁴

Artikelinfo

Artikel history:

Diterima: 20 November 2022

Diterima dalam bentuk revisi: 22 Desember 2022

Diterbitkan: 23 Desember 2022

Kata Kunci:

Childfree, Pemerintah Jepang, Teori feminisme eksistensialis

Abstrak

*Childfree merupakan sebuah keputusan untuk tidak memiliki anak secara sukarela, baik laki-laki atau perempuan lajang maupun juga oleh pasangan yang sudah menikah. Contohnya masyarakat Jepang mewajarkan pilihan tersebut, namun Pemerintah Jepang yang menolak keputusan *childfree* sehingga mengupayakan berbagai program demi meningkatkan tingkat kelahiran di negaranya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) dari buku-buku dan literatur lainnya seperti jurnal dan artikel. Hasil penelitian ini menemukan bahwa menurut penulis dalam feminisme eksistensialis di lingkup domestik yakni dalam rumah tangga dan ruang kerja. Pemerintah Jepang dapat mengupayakan lingkungan kerja yang sehat dengan jam kerja yang tidak terlalu panjang dan beban kerja yang tidak terlalu berat. Serta mensosialisasikan kesetaraan gender agar perempuan di Jepang tidak perlu mengorbankan karirnya saat ia telah menikah dan memiliki anak.*

Corresponden author: Nabila Utami Sandra Dewi

Email: Nblausd15@gmail.com

Pendahuluan

Secara biologis, gender dikelompokkan menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan. Terdapat perbedaan mendasar mengenai karakter fisik antara kedua kelompok gender tersebut, seperti alat kelamin laki-laki yang disebut sebagai penis dan alat kelamin milik perempuan yang disebut sebagai vagina, lalu perempuan memiliki rahim sehingga dapat hamil dan memproduksi susu dari payudara mereka sedangkan laki-laki tidak memiliki kemampuan tersebut. Kemampuan untuk hamil dan menyusui yang hanya dimiliki oleh perempuan, di banyak kelompok masyarakat yang tersebar di berbagai belahan dunia menghasilkan pandangan tradisional di mana nantinya semua perempuan harus dapat hamil, melahirkan, dan menyusui anak-anak mereka (Hajir, 2020).

Pandangan seperti ini telah lama ada dan diyakini oleh banyak orang termasuk diinternalisasi oleh perempuan itu sendiri. Perempuan yang menginternalisasi hasil dari konstruksi sosial ini memiliki pandangan bahwa menikah dan memiliki anak merupakan sebuah pencapaian yang harus mereka peroleh supaya mereka dapat dipandang oleh masyarakat sebagai perempuan yang sesungguhnya. Hal tersebut membuat perempuan tidak menyadari bahwa apa yang ada di tubuh mereka merupakan otoritasnya sendiri dan tidak ada seorang pun yang seharusnya mengatur itu. Keputusan untuk hamil dan melahirkan sepenuhnya ada di tangan perempuan, hal itu merupakan sebuah pilihan dan bukan kewajiban seperti yang selama ini terbangun di dalam kehidupan sosial masyarakat mengenai perempuan. Hamil dan melahirkan memang hanya dapat dilakukan oleh perempuan, namun keputusan untuk itu merupakan pilihan dan bukan kewajiban karena dua hal tersebut merupakan momen yang sangat besar, dibutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk menghadapi kehamilan dan melewati proses melahirkan. Semua proses tersebut hanya dapat dirasakan oleh perempuan sehingga memaksakan kehamilan kepada perempuan dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk kekerasan karena tidak semua perempuan mampu hamil meskipun mereka memiliki rahim dan tidak semua perempuan ingin hamil. Pandangan masyarakat mengenai perempuan yang tidak memiliki anak sebagai perempuan yang tidak utuh justru menunjukkan fakta bahwa perempuan dipandang sebagai objek pemberi keturunan.

Perempuan memang masih banyak yang tidak menyadari bahwa hamil dan memiliki anak merupakan sebuah pilihan. Hal ini terjadi karena masih banyaknya kelompok masyarakat yang melanggengkan budaya patriarki dan memberi stereotype untuk perempuan atau berpikir secara seksis. Bahkan yang menyedihkan perempuan juga ikut meyakini pandangan yang seksis dan patriarki tersebut sehingga membuat banyak kalangan perempuan tidak menyadari hak-hak mereka. Beruntungnya dalam beberapa dekade ini kesadaran perempuan mengenai hak-hak mereka mulai meningkat. Sudah cukup banyak perempuan yang menyadari bahwa mereka sendirilah yang memiliki hak kontrol atas tubuh mereka oleh karena itu hamil dan melahirkan menjadi pilihan yang harus diputuskan sendiri oleh perempuan. Meningkatnya kesadaran pada perempuan mengenai hak-hak yang mereka miliki, terutama pada keputusan memiliki anak membuat beberapa perempuan secara berani mengambil keputusan untuk *childfree* atau tidak memiliki anak karena pilihan secara sukarela. Istilah *childfree* sering kali disandingkan dengan istilah *childless*, kedua istilah ini memang mempunyai dasar yang sama mengenai keputusan untuk tidak memiliki anak namun yang membedakan ialah *childless* tidak didasari oleh pilihan secara sukarela tetapi karena faktor kesehatan. Perempuan tidak hanya menjadi kelompok yang mengambil keputusan untuk *childfree*, tetapi ada juga beberapa kelompok laki-laki dan pasangan yang telah menikah yang mengambil keputusan tersebut. Faktor-faktor yang biasanya melatarbelakangi keputusan seseorang atau pasangan untuk *childfree* yakni faktor lingkungan, ekonomi, psikologis seperti adanya trauma masa kecil, dan dunia yang semakin kejam.

Pembahasan mengenai *childfree* di Indonesia baru-baru ini muncul dan menuai banyak perdebatan di kalangan masyarakat. Pembahasan mengenai *childfree* di Indonesia mulai terangkat saat salah seorang *influencer* Indonesia yang tinggal di Jerman yaitu Gita Savitri secara terbuka menyatakan dirinya dan suami memutuskan untuk tidak memiliki anak. Alasan Gita dan suami untuk tidak memiliki anak karena ia berpandangan bahwa ada atau tidak adanya anak adalah pilihan hidup dan perencanaan matang diperlukan karena memutuskan untuk

mempunyai anak merupakan tanggung jawab besar. Beberapa orang menanggapi keputusan Gita dengan positif, menyetujui pandangannya bahwa memiliki anak memang bentuk tanggung jawab yang besar dan tidak semua orang mampu untuk menanggung tanggung jawab sebagai orang tua, oleh karena itu rencana yang matang sangat dibutuhkan. Kelompok kontra juga muncul dan menganggap bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang Gita dan suami anut serta keputusannya dianggap terlalu idealis dan liberal (Tim detikcom, 2021). Konsep mengenai *childfree* di Indonesia memang masih terdengar baru, aneh, dan justru terkesan sebagai sesuatu yang negatif, tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang cenderung masih konservatif. Di negara-negara lain keputusan untuk *childfree* justru sudah menjadi sesuatu yang biasa, contohnya saja seperti pada salah satu negara di kawasan Asia Timur yaitu Jepang.

Turunnya jumlah populasi di Jepang selama lima tahun (2015-2020) terakhir ini ditengarai karena semakin banyaknya penduduk Jepang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Dalam lima tahun terakhir (2015-2020), Jepang mengalami penurunan jumlah populasi mencapai 948.646 atau 0,7% sehingga di tahun 2020 total populasi Jepang hanya 126.146.099 dengan 23% diantaranya adalah kelompok lansia. Selama 47 tahun terakhir Jepang telah mengalami penurunan rasio penduduk usia anak dan di tahun 2021 mencapai titik terendahnya yakni 11,9%. Berdasarkan Buku Tahunan Demografis PBB, Jepang menjadi negara dengan rasio populasi anak terendah di kelompok negara dengan jumlah populasi penduduk 40 juta ke atas. Pemerintah Jepang bahkan mengeluarkan berbagai langkah seperti memberi tunjangan sebesar Rp 36,7 juta untuk hamil dan melahirkan. Meningkatnya jumlah pernikahan di Jepang pada 2019 yang mencapai angka 598,965 setelah selama tujuh tahun mengalami penurunan, juga sepertinya tidak terlalu mempengaruhi jumlah populasi di sana (Novia Aisyah-detikedu, 2021).

Pilihan untuk tidak memiliki anak di Jepang sebenarnya telah menjadi sesuatu yang biasa di kalangan orang dewasa dan pasangan muda. Sebelum konsep mengenai *childfree* ramai dibahas oleh masyarakat, Jepang bahkan telah memiliki konsep serupa yang muncul pada akhir 1980 namun dengan sebutan yang berbeda yakni *Double Income No Kid* (DINK). DINK merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kondisi untuk pasangan yang menikah namun dengan pengelolaan penghasilan yang dipisah dan tidak ingin memiliki anak. Keputusan *childfree* di Jepang menjadi cukup umum karena banyaknya faktor yang mempengaruhi seperti tingginya biaya hidup, kehidupan yang sangat dinamis, dan stigma yang diterima oleh perempuan dari masyarakat Jepang. Faktor tersebutlah yang membuat beberapa orang di Jepang baik laki-laki, perempuan, bahkan pasangan yang telah menikah memutuskan untuk memiliki anak. Banyaknya masyarakat Jepang memandang bahwa kehadiran anak tidak hanya membawa kebahagiaan tetapi juga secara bersamaan membawa tanggung jawab seumur hidup yang berat sehingga dibanding tidak dapat memberikan anak yang hadir apa yang nantinya dibutuhkan dan kemudian masyarakat Jepang memilih untuk tidak memiliki anak sama sekali.

Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memiliki anak membutuhkan perencanaan yang matang dan kesiapan fisik serta mental yang baik, membuat keputusan mengenai *childfree* sebenarnya tidak dapat disalahkan. Selain karena keputusan tersebut

merupakan hak setiap orang terutama hak perempuan, memaksakan kehamilan dan kehadiran anak justru dapat menyebabkan anak menjadi korban ketidaksiapan orang tua. Sehingga keputusan *childfree* sebenarnya menjadi salah satu tindakan yang dapat menghindari terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Sayangnya keputusan ini masih dipandang sebagai sesuatu yang negatif bahkan egois bagi beberapa orang, bahkan di Jepang sendiri yang sebenarnya di kalangan generasi muda hal tersebut sudah biasa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode studi pustaka (library research) dari buku-buku dan literatur lainnya seperti jurnal dan artikel. Menurut Denzin dan Lincoln (Moleong, 2012:5) penelitian kualitatif menggunakan latar ilmiah dan melibatkan berbagai metode seperti wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menggambarkan fenomena yang terjadi¹. Penelitian ini mengkaji mengenai makna serta uraian Fenomena *Childfree* di Jepang dalam Perspektif Teori Feminisme Eksistensialis. Peneliti memahami, mengumpulkan, mencatat, menguraikan secara deskriptif analitis berbagai dasar fenomena *childfree* untuk mendapatkan dan melengkapi gambaran secara menyeluruh tentang fenomena *childfree* di Jepang.

Hasil dan Pembahasan

a. *Childfree* dalam Masyarakat Jepang

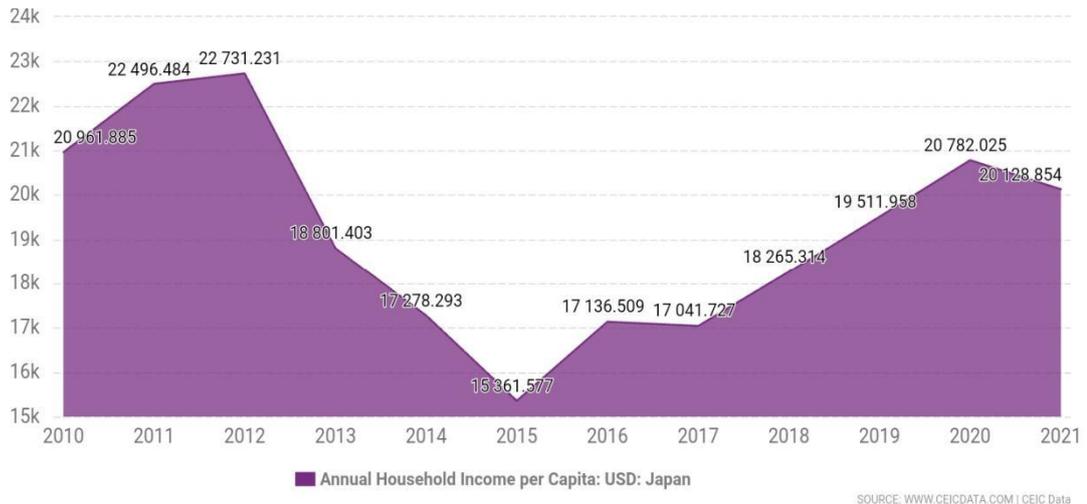
Jepang dapat dikatakan sebagai negara yang mayoritas penduduknya sudah modern. Modern yang dimaksud tidak hanya dalam bidang teknologi, namun juga pola pikir mereka yang sudah maju. Salah satu prinsip yang dipegang oleh masyarakat Jepang adalah bagaimana mereka berdedikasi terhadap profesi mereka. Jepang juga memiliki kinerja yang baik dalam beberapa ukuran kesejahteraan menurut *Better Life Index*. Jepang menjadi salah satu negara yang menempati urutan teratas dalam keamanan pribadi dengan skor 8,4. Hal tersebut merupakan peringkat di atas rata-rata OECD (*the Organization for Economic Co-operation and Development*) dalam pendapatan dan kekayaan, pendidikan dan keterampilan, pekerjaan dan pendapatan, perumahan, keamanan pribadi, dan kualitas lingkungan. Namun Jepang masih menempati peringkat di bawah rata-rata dalam hal keterlibatan sipil, kesejahteraan subjektif, koneksi sosial, keseimbangan kehidupan kerja dan status kesehatan.

Di Jepang, pendapatan rumah tangga rata-rata yang disesuaikan dengan pendapatan bersih per kapita adalah \$29.798/tahun, jauh di bawah rata-rata OECD sebesar \$33.604/tahun. Ada kesenjangan besar antara yang terkaya dan termiskin, dengan 20% populasi terkaya berpenghasilan enam kali lebih banyak daripada 20% termiskin.

Gambar 1.1 pendapatan bersih per kapita Masyarakat Jepang

¹ Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Mycological Research.

FENOMENA CHILDFREE DI JEPANG DALAM PERSPEKTIF TEORI FEMINISME EKSISTENSIALIS



Dalam hal pekerjaan, 75% dari usia 15-64 tahun di Jepang bekerja dengan bayaran, lebih tinggi dari rata-rata OECD sebesar 68%. Sekitar 83% pria bekerja untuk mendapatkan bayaran, dibandingkan dengan 67% wanita. Di Jepang, persentase karyawan yang bekerja berjam-jam adalah 11% lebih tinggi dari rata-rata OECD. Pekerja perempuan dalam ketenagakerjaan internal memiliki struktur tersendiri. Jika ada pekerjaan full time, maka terdapat dua kategori dari pekerja perempuan diantaranya adalah: Pekerja perempuan yang harus bekerja layaknya laki-laki. Ini dinamakan Sogo Shoku (all round employes). Pekerja perempuan harus bekerja lembur serta mau untuk ditempatkan di tempat kerja yang jauh untuk beberapa tahun. Mereka juga diharapkan bekerja tanpa interupsi atau penghambat, salah satunya yakni ketika masuk dalam fase memiliki atau membesarkan anak.

b. Pekerja perempuan yang tidak berperan penting dalam perusahaan atau tempat kerja, serta memiliki gaji yang cukup rendah. Mayoritas pekerja perempuan yang ada di posisi ini adalah mereka yang memiliki anak. Pekerja perempuan ini akan sulit untuk naik jabatan, bahkan kesempatan menduduki posisi penting dalam perusahaan atau tempat kerja tersebut.

Hingga pada tahun 1985 disahkan ketentuan Equal Oportunity Law dan Child-care Leave pada tahun 1992 yang memudahkan perempuan dalam mendapatkan pekerjaan. Ketentuan ini diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan pekerjaan. Perusahaan juga diminta agar mengizinkan perempuan mendapatkan cuti melahirkan dan membesarkan anak. Namun pada kenyataannya, perusahaan tetap tidak memberikan izin pada perempuan untuk cuti. Sehingga perempuan banyak yang bingung jika disuruh memilih antara keluarga atau pekerjaan.

Pendidikan dan keterampilan yang baik merupakan syarat penting untuk mendapatkan pekerjaan. Jepang adalah negara dengan kinerja terbaik dalam hal kualitas sistem pendidikannya. Di Jepang, persentase orang dewasa dengan usia 25-64 yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas, berada di atas rata-rata OECD sebesar 78%. Rata-rata siswa mendapat skor 529 dalam literasi membaca, matematika, dan sains dalam *the OECD's Programme for International Student Assessment (PISA)*. Skor ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata OECD sebesar 486. Meskipun anak perempuan mengungguli anak laki-laki

di banyak negara OECD, di Jepang anak laki-laki mendapat skor 2 poin lebih tinggi daripada rata-rata anak perempuan.

Dengan demikian, masyarakat Jepang banyak yang mendukung konsep *childfree*. Banyak pasangan muda yang memilih untuk tidak memiliki keturunan dengan alasan masing-masing. Alasan yang paling mendasar yakni masyarakat Jepang ingin dan sedang bekerja secara produktif. Sehingga kehadiran anak akan mengganggu mereka. Jam kerja juga menjadi salah satu alasan mengapa mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Di Jepang jam kerja normal pegawai dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore hari dan beberapa mulai bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore.

Masyarakat Jepang pun sadar bahwa memiliki anak bukanlah sesuatu hal yang sepele. Memiliki anak artinya mereka akan memiliki tanggung jawab yang besar. Memiliki anak bukan hanya sebatas melahirkan, namun juga orang tua berperan besar dalam membentuk kepribadian dan karakter anak. Bagaimana orang tua mampu untuk mengajarkan anak mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Ini bukan menjadi hal yang sepele. Didikan orang tua adalah hal yang pertama dan penting. Jika orang tua gagal mendidik anak, maka ini akan berpengaruh terhadap masa depan si anak. Jika membahas mengenai agama, maka orang tua nantinya yang akan bertanggungjawab jika perilaku anak menjadi buruk dan salah. Sadar bahwa membesarkan anak adalah tanggung jawab besar, dan orang Jepang banyak berpikir sebelum membuat keputusan. Ini merupakan pemikiran yang sepenuhnya benar, karena terdapat banyak negara yang penduduknya banyak memiliki anak namun orangtua mereka tidak mampu untuk mendidik mereka, atau sejenak meluangkan waktu untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Ketidaksetaraan gender juga menjadi salah satu alasan mengapa perempuan di Jepang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Selama ini perempuan menjadi pihak di dalam keluarga yang mengambil peran ganda untuk mengurus rumah dan anak sehingga sering kali perempuan harus merelakan karir yang selama ini sudah di bangun, sedangkan laki-laki sering tidak berkontribusi pada urusan pekerjaan rumah dan anak. Wanita Jepang seringkali harus memilih antara karir dan keluarga. Menurut beberapa statistik, sekitar 70% wanita Jepang pada dasarnya terpaksa berhenti bekerja setelah mempunyai anak pertama.

Pola pikir masyarakat Jepang yang tidak ingin memiliki anak juga dikarenakan mereka telah memikirkan berapa besar biaya hidup yang perlu dikeluarkan untuk membesarkan anak. Setiap tahun dan seiring berjalannya waktu, zaman akan terus berkembang, sehingga biaya yang akan mereka keluarkan pun akan meningkat. Jepang secara konsisten menjadi salah satu negara dengan biaya hidup rata-rata tertinggi di dunia. Pengeluaran harian dapat dengan mudah mencapai 280.000–300.000 JPY (Rp 35.932.500- Rp 38.807.100) per bulan. Ini dikarenakan tiga faktor yakni letak geografis negara karena Jepang yang berjarak 124 mil dari daratan Asia, budaya masyarakat Jepang, dan wilayah Tokyo. Hal itu menyebabkan banyak barang kebutuhan sehari-hari yang harus diimpor agar tingkat kuantitas barang menjadi lebih tinggi dari harga sebelumnya. Contohnya seperti sebagian besar produk susu yang harus diimpor terlebih dahulu. Ekspatriat (masyarakat yang hidup atau menetap di Jepang, namun bukan warga asli Jepang) mungkin menemukan barang-barang yang ada di Jepang dengan kuantitas jauh sekiranya harga dua atau tiga kali lebih mahal daripada di wilayah Eropa atau di wilayah Amerika Utara maupun Selatan. Budaya Jepang yang menghargai barang dan jasa berkualitas tinggi juga menjadi faktor tingginya biaya hidup di Jepang. Barang-barang dari makanan hingga pakaian hingga elektronik harus berkualitas tinggi, seperti halnya layanan di industri

makanan, perhotelan, dan lainnya. Berharap untuk hal-hal baik ini datang dengan harga yang mahal.

Salah satu kota di Jepang yang dianggap sebagai kota paling mahal ialah Tokyo. Ibukota negara Jepang ini secara terus menerus menduduki peringkat sebagai kota paling mahal di dunia. Sebagai kota terpadat di Jepang, biaya kota yang tinggi mempengaruhi seluruh negara. Untuk Satu orang yang menetap di Tokyo dapat menghabiskan biaya mencapai sekitar 120.000 JPY (Rp 15.810.300) per bulan, angka tersebut belum termasuk biaya sewa apartemen. Jika suatu ketika harga nominal sewa rata-rata untuk apartemen satu kamar menjadi naik dengan tinggi, misal biaya sewa dapat naik hingga mencapai 245.000 JPY (Rp 31.620.600), sebuah keluarga yang tinggal di Tokyo akan memerlukan biaya tiga kali lipat.

Biaya hidup yang sedemikian mahal dan keputusan untuk memiliki anak berarti pasangan akan bersedia untuk mengeluarkan biaya hidup yang jauh lebih banyak lagi. Membangun rumah tangga berarti biaya yang akan dikeluarkan dua kali lebih banyak dari kehidupan sebelum menikah. Apalagi jika mereka memiliki anak, maka biaya yang dikeluarkan akan juga ikut meningkat seiring dengan penambahan jumlah anak atau penambahan usia anak dalam suatu keluarga. Biaya sekolah yang mahal, biaya kehidupan sehari-hari dimana setiap aspek dalam kehidupan akan semakin mahal. Bahkan sebelum melahirkan juga membutuhkan biaya untuk check up atau periksa kehamilan, ketika melahirkan, dan setelah melahirkan pun akan ada biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan juga akan meningkat jika ada biaya pengeluaran untuk perawatan kesehatan, mendukung hobi sang anak, terkadang juga butuh les tambahan untuk anak, dll. Sehingga ini mengakibatkan masyarakat Jepang dituntut untuk giat bekerja. Mereka akan fokus dan lebih sibuk untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Faktor lainnya adalah masyarakat Jepang kurang berminat pada seks. Kurangnya minat pada seks dikenal dengan *sekkusu shinai shokogun* atau "*celibacy syndrome*". Lebih dari 50% populasi tidak berhubungan seks hingga satu bulan. Bahkan orang Jepang yang sudah menikah mengatakan jarang berhubungan seks karena mereka tiba di rumah dalam keadaan lelah dari pekerjaan mereka atau hanya tidak berminat. Ini adalah faktor lain mengapa banyak pasangan yang tidak memiliki anak. Mereka terlalu berambisi untuk mendapatkan penghasilan dan ditekan oleh keadaan sekitar. Sejak pertengahan 1990-an, ekonomi Jepang mengalami stagnasi dan harga-harga menjadi semakin naik. Hal ini membuat semakin sulit bagi kaum muda untuk meninggalkan rumah atau memiliki kehidupan mereka sendiri, sehingga mereka akan memilih tinggal di rumah yang kecil. Mereka merasa akan sulit untuk memulai sebuah keluarga di keadaan yang demikian. Kebanyakan mereka yang mengambil keputusan untuk childfree disebabkan oleh masalah personal, masalah finansial keluarga, latar belakang keluarga, ragu akan tumbuh kembang anak, hingga psikologi dari kedua orang tua.

b. Pemerintah Jepang & Childfree

Bagi beberapa orang keputusan untuk tidak ingin memiliki anak mungkin dianggap sebagai sebuah keputusan yang egois, namun bagi beberapa orang pilihan ini justru menjadi keputusan yang paling baik. Keputusan itu tidak hanya baik untuk orang tersebut agar mereka dapat lebih fokus dengan tujuan jangka panjang yang ingin mereka capai seperti

karir atau pendidikan, tetapi keputusan tersebut juga akan baik untuk anak yang nantinya lahir. Semua anak yang lahir di dunia pantas mendapatkan orang tua yang baik, banyak kasih sayang, serta dipenuhi segala kebutuhannya. Sayangnya tidak semua orang dan pasangan menikah mampu menjadi orang tua dan dapat memenuhi kebutuhan anak, baik dari segi kasih sayang maupun materi, sehingga di sini keputusan untuk menjadi *childfree* menjadi keputusan yang tepat. Memaksakan untuk memiliki anak di saat kita menyadari ketidakmampuan kita dalam mengurus anak justru akan menjadi keputusan yang lebih egois dan berdampak negatif pada diri sendiri, namun dampak tersebut akan lebih besar terhadap anak. Keputusan untuk *childfree* di beberapa negara mungkin tidak terlalu ditanggapi oleh pemerintahannya, tetapi bagi beberapa pemerintahan negara lain isu mengenai *childfree* menjadi penting.

Dalam beberapa tahun ini Jepang menjadi salah satu negara di Asia yang mengalami permasalahan mengenai rendahnya angka kelahiran. Hasil survey penduduk yang dilakukan sejak 2015 hingga 2020 menunjukkan hasil bahwa persentase penurunan jumlah populasi di Jepang adalah 0,7% atau sebesar 948.646 jiwa penduduk. Jepang saat ini hanya memiliki 11,9% penduduk usia anak dan 23% penduduk lanjut usia dari total penduduk Jepang yang berjumlah 126.146.099. Pada 2020, tingkat kelahiran di negara tersebut juga mengalami penurunan sebesar 9,2%. Beberapa ahli juga menilai bahwa dengan tingkat kelahiran yang rendah ini, di masa depan Jepang akan mengalami penurunan populasi secara drastis. Bagi Pemerintah Jepang permasalahan ini menjadi salah satu perhatian utama yang ingin segera diselesaikan sehingga ada banyak program yang digalakan oleh Pemerintah Jepang untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa langkah yang diambil oleh Pemerintah Jepang untuk meningkatkan angka kelahiran yakni dengan memberi bantuan sebesar 100.000 yen (Rp 12.600.000) untuk pasangan yang baru memiliki anak. Pemerintah Jepang juga mengadakan kampanye untuk suami dan ayah supaya mereka terlibat dalam pengerjaan pekerjaan rumah dan mengurus anak yang selama ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Tujuan yang ingin dicapai melalui program kampanye ini ialah supaya perempuan tetap dapat berkarir meskipun mereka memiliki anak, sehingga perempuan tidak perlu mengorbankan salah satu perannya. Negara dengan kemajuan teknologi tersebut juga memanfaatkan teknologi AI atau *Artificial Intelligence* untuk meningkatkan angka pernikahan yang nantinya diharapkan juga berdampak pada peningkatan angka kelahiran bayi di Jepang.

Jepang memang tidak dapat dikatakan sebagai sebuah negara dengan masyarakat yang konservatif secara keseluruhan, namun dari segi pemerintahan yang ada Jepang dapat disebut sebagai model pemerintahan yang konservatif. Di dalam kalangan masyarakat Jepang, keputusan untuk tidak memiliki anak memang sudah dianggap sesuatu yang biasa tapi hal ini berbeda dengan pandangan Pemerintah Jepang. Bagi Pemerintah Jepang keputusan *childfree* merupakan mimpi buruk, tidak ada hal baik yang datang dari keputusan tersebut. Semakin banyaknya warga Jepang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak akan berbahaya untuk keberlangsungan dan perkembangan Jepang karena di masa mendatang jumlah penduduk di usia produktif akan berkurang. Hal ini dikhawatirkan akan membawa Jepang pada permasalahan sosial dan ekonomi. Maka dari itu, ada berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk meningkatkan angka kelahiran. Salah satu Pejabat Pemerintahan Jepang, Toshihiro Nikai bahkan dengan berani menyebut bahwa keputusan untuk *childfree* merupakan keputusan yang egois. Menurutnya kunci

kebahagiaan setiap orang adalah dengan memiliki banyak anak bahkan di saat Jepang mengalami perang dan krisis pangan tidak ada keluarga yang berpikir untuk tidak memiliki anak sama sekali, oleh karena itu perempuan harus mau melahirkan anak. Apa yang dikatakan oleh Nikai justru bukan sesuatu yang dapat memotivasi masyarakat Jepang untuk memiliki anak karena pernyataannya justru sangat tidak sensitive. Nikai melupakan fakta bahwa beberapa orang atau pasangan tidak memiliki anak bukan karena mereka memilih keputusan tersebut secara sukarela, tetapi karena terpaksa oleh kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Selain itu kebahagiaan seseorang juga tidak dapat diukur hanya dengan melihat apakah orang tersebut memiliki anak. Ada yang tetap dapat hidup bahagia meskipun mereka tidak memiliki anak dan sebaliknya. Tidak hanya berhenti di situ, pernyataan tersebut juga melupakan adanya hak kebebasan setiap masyarakat Jepang untuk menentukan keputusan hidupnya sendiri termasuk mengenai anak dan jumlah anggota keluarga. Ia juga melupakan bahwa perempuan lah yang mengalami proses kehamilan dan melahirkan sehingga tidak seharusnya laki-laki menuntut perempuan untuk melahirkan banyak anak.

Kesimpulan

Perbedaan persepsi antara masyarakat dan Pemerintahan Jepang yang besar cukup terlihat. Masyarakat Jepang menerima adanya fenomena childfree karena realita masyarakat Jepang yang sibuk atas karir mereka dan juga besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membesarkan anak, selain itu isu ketidaksetaraan gender dalam hal pembagian kerja dalam rumah tangga juga menjadi salah satu faktor pendorong, sedangkan Pemerintahan Jepang tampak menolak childfree meskipun tidak sampai melarang warga negaranya untuk tidak memiliki anak tetapi menyebut bahwa keputusan childfree merupakan sesuatu yang egois. Program-program yang diselenggarakan Pemerintahan Jepang dengan tujuan meningkatkan angka kelahiran bayi juga memiliki alasan tertentu. Childfree dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan, bukan budaya yang akan memberikan dampak buruk bagi negara. Jika fenomena ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dikhawatirkan akan terjadi penurunan angka umur produktif. Negara akan mengalami ketidakstabilan ekonomi. Begitu juga dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, namun tidak sebanding dengan angkatan kerja. Maka, ini akan mengundang para pekerja asing untuk bekerja di Jepang. Memang benar jika perempuan berhak untuk memutuskan menjadi perempuan yang “seutuhnya” atau menjadi diri mereka sendiri, namun tidak benar jika hal ini menjadi sebuah trend yang harus dikampanyekan sebagai bentuk gerakan feminisme.

Dalam menjelaskan fenomena childfree di Jepang, penulis dapat menyimpulkan perjuangan perempuan Jepang menurut feminisme eksistensialis di lingkup domestik yakni dalam rumah tangga dalam ruang kerja. Perjuangan yang dimaksud adalah bagaimana perempuan Jepang berupaya untuk menjadi dirinya sendiri karena mereka ingin, namun tindakan ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Berdasarkan teori feminisme eksistensialis keputusan untuk *childfree* merupakan hak semua orang khususnya untuk perempuan. Otoritas tubuh perempuan ada pada kendali perempuan itu sendiri, bukan pada laki-laki atau masyarakat yang menciptakan konstruksi sosial yang membatasi perempuan, bahkan pemerintah. Di Jepang salah satu alasan mengapa perempuan memilih untuk tidak memiliki

anak tidak hanya karena alasan ekonomi, tetapi juga karena dibatasinya peranan perempuan dalam masyarakat. Perempuan Jepang dipaksa oleh masyarakat untuk memilih ingin menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga, saat perempuan yang memiliki anak tetap berkarir maka hal tersebut menjadi salah. Padahal tidak ada salahnya juga perempuan tetap berkarir meskipun mereka menjadi ibu dan memiliki anak, dalam rumah tangga tugas mengurus anak dan pekerjaan rumah bukan hanya dimiliki perempuan tetapi juga laki-laki. Selama ini masyarakat melanggengkan tradisi untuk mengatur perempuan harus seperti apa karena perempuan dianggap sebagai objek yang ada untuk orang lain, bukan manusia yang lahir dan ada untuk dirinya sendiri. Sangat tidak adil saat laki-laki dapat menjadi ayah dan suami tetapi tetap dapat memiliki karir sedangkan perempuan tidak. Perempuan dapat menjadi apapun yang mereka mau, mengambil keputusan apapun yang membuat mereka bahagia dan merasa utuh sebagai manusia yang bebas dari konstruksi sosial masyarakat.

Perlu diakui memang bahwa semakin sedikit tingkat kelahiran di suatu negara akan membawa dampak buruk bagi ekonomi dan kehidupan sosial. Oleh karena itu apa yang diupayakan Pemerintah Jepang untuk meningkatkan tingkat kelahiran memang tepat, selama tidak ada unsur paksaan atau hukuman denda bagi orang-orang yang memutuskan untuk tidak ingin memiliki anak. Hal yang disayangkan adalah pernyataan salah satu Pejabat Pemerintahan Jepang yang menilai keputusan untuk *childfree* merupakan sesuatu yang egois. Menurut penulis keputusan *childfree* tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang egois karena menjadi orang tua dan memiliki anak merupakan pekerjaan dengan tanggung jawab yang besar dan berat. Tidak semua orang sanggup untuk mengambil peran sebagai orang tua. Perlu diingat bahwa setiap warga Jepang memiliki kebebasan untuk menentukan hidup mereka sendiri, termasuk mengenai anak dan besar kecilnya keluarga. Dibanding menilai keputusan untuk *childfree* merupakan sesuatu yang egois, akan lebih baik apabila Pemerintah Jepang fokus untuk mengurai faktor-faktor yang membuat banyak warga negara mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Pemerintah Jepang dapat mengupayakan membangun lingkungan kerja yang sehat dengan jam kerja yang tidak terlalu panjang dan beban kerja yang tidak terlalu berat. Selain itu dapat pula dengan menurunkan sedikit biaya hidup seperti untuk makanan dan tempat tinggal yang selama ini masih dinilai paling banyak menghabiskan dana. Mengampanyekan serta mensosialisasikan mengenai kesetaraan gender juga menjadi penting supaya perempuan di Jepang tidak perlu mengorbankan karirnya saat ia telah menikah dan memiliki seorang anak.

Bibliografi

- Associated Press. (2018, Juni 27). Lawmaker slammed for calling people without children selfish. Diakses pada 8 Desember 2021, dari <https://nypost.com/2018/06/27/lawmaker-slammed-for-calling-people-without-children-selfish/>
- Baseel, Casey. (2021, Januari). Tokyo's latest plan to boost birth rate: Pay people 100,000 yen per baby they give birth to. Diakses pada 8 Desember 2021, dari <https://japantoday.com/category/features/lifestyle/Tokyo%E2%80%99s-latest-plan-to-boost-birth-rate-Pay-people-100-000-yen-per-baby-they-give-birth-to>

FENOMENA CHILDFREE DI JEPANG DALAM PERSPEKTIF TEORI FEMINISME EKSISTENSIALIS

- BBC. (2020, Desember 8). Japan to fund AI matchmaking to boost birth rate. Diakses pada 8 Desember 2021, dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-55226098>
- BCCJ Acumen. (2015, November). Japan's new dinks break trends. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://bccjacumen.com/news/japans-new-dinks-break-trends/>
- Dennis-Embury, Tom. (2018, Juni 27). Childless couples are 'selfish', senior Japanese politician says. Diakses pada 8 Desember 2021, dari <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/japan-birth-rate-parents-children-childless-toshihiro-nikai-liberal-democratic-party-a8419346.html>
- Faridah, S. (2021, Agustus 24). Childfree: Fenomenan childfree dan konstruksi masyarakat Indonesia. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://heylawedu.id/blog/childfree-fenomena-childfree-dan-konstruksi-masyarakat-indonesia>
- FertilitySmarts. Childfree. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://www.fertilitysmarts.com/definition/1152/childfree>
- HAJIR, MOHAMMAD (2020) *Bias Gender Dalam Buku Teks Bahasa Indonesia Sma Kurikulum 2013 Edisi Revisi*. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Huang, Silvia. (2020, Juni 21). 5 Facts About Healthcare in Japan. Diakses pada 7 Desember 2021, dari <https://borgenproject.org/healthcare-in-japan/>
- Japan Educational Travel. JAPANESE EDUCATIONAL SYSTEM. Diakses pada 7 Desember 2021, dari <https://education.jnto.go.jp/en/school-in-japan/japanese-education-system/>
- Kobayashi, Nobuko. (2021, Mei 29). Men must change to reverse Japan's rapidly declining birthrate. Diakses pada 8 Desember 2021, dari <https://asia.nikkei.com/Opinion/Men-must-change-to-reverse-Japan-s-rapidly-declining-birthrate>
- Kyodo News. (2021, Mei 4). Japan's child population hits record low after 40 years of decline. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://www.thejakartapost.com/news/2021/05/04/japans-child-population-hits-record-low-after-40-years-of-decline.html>
- Live Japan. (2019, Desember 12). Is Japan Really a Safe Country? Let's Take a Look at How Their Crime Rate Compares to the Rest of the World! Diakses pada 7 Desember 2021, dari <https://livejapan.com/en/article-a0002373/>
- Media Indonesia. (2021, September 2). Fenomena childfree di Indonesia. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia>
- Muliana A, V. (2018, Maret 16). Ingin tambah populasi, kota di Jepang ini bayar Rp 36,7 juta untuk wanita hamil. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3376480/ingin-tambah-populasi-kota-di-jepang-ini-bayar-rp-367-juta-untuk-wanita-hamil>
- NHK World-Japan. (2021, Desember 1). Japan's population continues to decline. Diakses pada 4 Desember 2021, dari https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20211201_05/
- Nippon. (2020, Juli 7). Marriage statistics in Japan: Average age of couple continues to rise. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://www.nippon.com/en/japan-data/h00759/>

- Pratama, Novrian. (2021, Agustus 23). Childfree dan Dampaknya Bagi Negara. Diakses pada 9 Desember 2021, dari <https://kumparan.com/novrian-pratama/childfree-dan-dampaknya-bagi-negara-1wNy0mVmVhR>
- Tim detikcom. (2021, Agustus 16). Gita Savitri ungkap alasan tak mau punya anak. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://hot.detik.com/celeb/d-5683516/gita-savitri-ungkap-alasan-tak-mau-punya-anak>
- Aisyah, N. DetikEdu (2021, September 23). Ini Penyebab Jepang Alami Penurunan Jumlah Penduduk, Siswa Sudah Tahu?. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5735856/ini-penyebab-jepang-alami-penurunan-jumlah-penduduk-siswa-sudah-tahu>
- Prameswari, N. P. L. M., Nugroho, W. B., & Mahadewi, N. M. A. S. (2019). Feminisme Eksistensial Simone De Beauvoir: Perjuangan Perempuan di Ranah Domestik. *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 1(2).
- Oecd.org. Better Life Index. Diakses melalui <https://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/japan/> pada tanggal 13 Desember 2021
- Wingfield, Rupert. 2013. Japan: The Worst Developed Country for Working Mothers?. Diakses melalui <https://www.bbc.com/news/magazine-21880124> pada tanggal 13 Desember 2021
- Internations.org. 2020. The Cost of Living in Japan. Diakses melalui <https://www.internations.org/go/moving-to-japan/living/the-cost-of-living-in-japan> pada tanggal 13 Desember 2021.
- Christiansen, Shawn L, dkk. 2013. A Nation Without Children: A Discussion of Fertility Decline in Japan. Diakses melalui <https://www.ncfr.org/ncfr-report/focus/family-focus-global-families/nation-without-children-discussion-fertility-decline-> pada tanggal 13 Desember 2021.